



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH**  
**TAHUN 2025**



**BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 - 2029;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 ...

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
dan  
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

11. Arah ...



11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah Sumba Tengah.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
  - a. mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses dan substansi capaian kinerja pembangunan sebagai arah pembangunan Sumba Tengah tahun 2025-2029;
  - b. mengintegrasikan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 dengan rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045;

c. sebagai ...

- c. sebagai landasan operasional arah kebijakan, sasaran pokok, target indikator dan capaian kinerja pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan selama periode 2025-2029;
- d. pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan dan pemangku pembangunan lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Sumba pembangunan Sumba Tengah tahun 2025- 2029;
- e. menjadi dasar penyusunan RKPD yang memuat program indikator kinerja, target dan pagu yang bersifat indikatif;
- f. menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
- g. mewujudkan implementasi kebijakan daerah dalam mendukung kebijakan dan program prioritas provinsi dan nasional.

## BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
  - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan

dan ...



dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

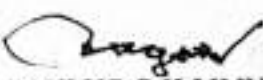
#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

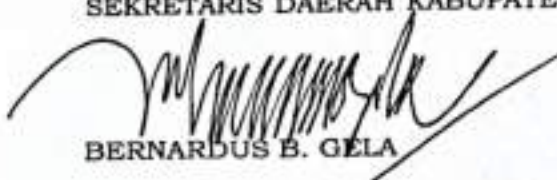
Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI SUMBA TENGAH, 

  
PAULUS S.K LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA  
TENGAH : 03/2025

PENJELASAN ...

dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

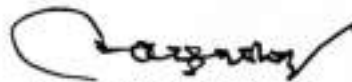
#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI SUMBA TENGAH, 7<sup>n</sup>

  
PAULUS S.K LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA  
TENGAH : 03/2025

PENJELASAN ...

dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

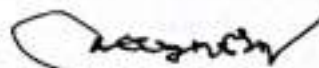
#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S.K LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA  
TENGAH : 03/2025

PENJELASAN ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2025 – 2029

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Seluruh dokumen rencana pembangunan daerah tersebut disusun sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagai tindaklanjut dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025- 2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilu kepala daerah serentak, maka Bupati bersama DPRD Kabupaten menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD dimulai dari 1) persiapan penyusunan, 2) penyusunan rancangan awal, 3) Penyusunan

rancangan ...

rancangan, 4) pelaksanaan musrenbang, 5) Perumusan rancangan akhir, dan 6) penetapan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki nilai strategis sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam kebijakan, program, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN dan dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik- tematik, integratif dan spasial. Periodisasi RPJMD Kabupaten Sumba Tengah selaras dengan periodisasi RPJMN yaitu 2025-2029 untuk masa bakti kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2025- 2030 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Kabupaten Sumba Tengah adalah salah satu kabupaten di Pulau Sumba dan merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu kabupaten yang terbentuk pada tahun 2007 pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, disamping menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke depan.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok periodisasi lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2045 yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sumba Tengah pada periode berkenaan. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator makro pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan gini rasio masih menempatkan Sumba Tengah dibawah rata-rata capaian provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Sumba Tengah ke depan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Adapun latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Analisis capaian dan kendala yang dihadapi dalam periode tersebut memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang perlu dilanjutkan, disesuaikan, atau ditingkatkan.

2. Tantangan dan Peluang Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumba Tengah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diantisipasi dan dimanfaatkan secara optimal. Tantangan

tersebut ...



tersebut meliputi isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta masalah lingkungan. Sementara itu, peluang yang dapat dioptimalkan mencakup potensi sumber daya alam, pariwisata, serta keunggulan geografis yang dimiliki. RPJMD 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat.

3. Sinkronisasi dengan dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 secara konsisten dan berjenjang merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Demikian halnya juga dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara program pembangunan di tingkat kabupaten dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
4. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat  
RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan konsultasi publik sehingga dapat mengoptimalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Penggunaan Pendekatan Penyusunan RPJMD.  
Penyusunan RPJMD 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan penyusunan RPJMD menekankan pada penggunaan data dan analisis ilmiah yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan metode analisis ilmiah, penyusunan RPJMD dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih rasional, realistis dan relevan, akurat, efektif, dan efisien. Pendekatan ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti empiris yang kuat, sehingga dapat memitigasi risiko, resiliensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program pembangunan. Dengan latar belakang tersebut, RPJMD Kabupaten Sumba Tengah 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan pembangunan ...



pembangunan daerah. Melalui implementasi RPJMD Kabupaten Sumba Tengah pada perencanaan tahunan diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 147

LAMPIRAN ...



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun melalui serangkaian proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang secara aktif memberikan kontribusi pemikiran dan masukan untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan, menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah, memanfaatkan peluang potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumba Tengah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan secara konstruktif dan terus menerus akan dilakukan dari waktu ke waktu agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Tengah dapat berjalan menuju arah yang lebih baik.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya kita bersama dalam pembangunan Kabupaten Sumba Tengah dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat demi ***“Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”***.

Waibakul, 27 Agustus 2025  
BUPATI SUMBA TENGAH,  
  
Drs. PAULUS S.K. LIMU





## DAFTAR ISI

### HAL

|                                                           |       |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                      | ..... | i         |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                     | ..... | ii        |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                         | ..... | iii-v     |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                       | ..... | vi-vii    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                      | ..... | viii      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                 | ..... | 1/Bab I   |
| 1.1. Latar belakang                                       | ..... | 1/Bab I   |
| 1.2. Dasar hukum                                          | ..... | 4/Bab I   |
| 1.3. Hubungan antar dokumen                               | ..... | 7/Bab I   |
| 1.4. Maksud dan tujuan                                    | ..... | 9/Bab I   |
| 1.5. Sistematika penulisan                                | ..... | 10/Bab I  |
| <b>BAB II. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH</b>               | ..... | 1/Bab II  |
| 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah                         | ..... | 1/Bab II  |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi                       | ..... | 1/Bab II  |
| 2.1.1.1. Luas Wilayah Sumba Tengah                        | ..... | 1/Bab II  |
| 2.1.1.2. Letak dan Kondisi geografis                      | ..... | 2/Bab II  |
| 2.1.1.3. Potensi Sumber Daya Alam                         | ..... | 5/Bab II  |
| 2.1.1.4. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan | ..... | 8/Bab II  |
| 2.1.1.5. Lingkungan hidup berkualitas                     | ..... | 10/Bab II |
| 2.1.1.6. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim   | ..... | 11/Bab II |
| 2.1.1.7. Demografi                                        | ..... | 16/Bab II |
| 2.2. Aspek kesejahteraan masyarakat                       | ..... | 18/Bab II |
| 2.2.1. Kesejahteraan ekonomi                              | ..... | 18/Bab II |
| 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB                                 | ..... | 18/Bab II |
| 2.2.1.2. Pertumbuhan ekonomi                              | ..... | 18/Bab II |
| 2.2.1.3. PDRB Perkapita                                   | ..... | 19/Bab II |
| 2.2.1.4. Inflasi                                          | ..... | 19/Bab II |
| 2.2.1.5. Pemerataan ekonomi (indeks gini)                 | ..... | 20/Bab II |
| 2.2.1.5. Nilai Tukar petani                               | ..... | 20/Bab II |
| 2.2.1.7. Tingkat pengangguran terbuka                     | ..... | 21/Bab II |
| 2.2.1.8. Penduduk miskin                                  | ..... | 21/Bab II |
| 2.2.1.9. Ketahanan pangan                                 | ..... | 22/Bab II |
| 2.2.2. Kesehatan untuk semua                              | ..... | 24/Bab II |
| 2.2.2.1. Usia harapan hidup                               | ..... | 25/Bab II |
| 2.2.2.2. Indek keluarga sehat                             | ..... | 25/Bab II |
| 2.2.2.3. Prevelensi stunting                              | ..... | 26/Bab II |
| 2.2.2.4. Angka kematian ibu dan bayi                      | ..... | 26/Bab II |
| 2.2.2.5. Insiden tuberkolosis                             | ..... | 27/Bab II |
| 2.2.2.6. Cakupan kepesertaan jaminan                      | ..... |           |



|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| kesehatan nasional                                                              | 27/Bab II |
| 2.2.2.7. Ketersediaan dokter tenaga medis                                       | 27/Bab II |
| 2.2.2.8. Ketersediaan fasilitas kesehatan                                       | 27/Bab II |
| 2.2.3. Pendidikan berkualitas dan merata                                        | 28/Bab II |
| 2.2.3.1. Angka rata –rata lama sekolah                                          | 28/Bab II |
| 2.2.3.2. Harapan lama sekolah                                                   | 28/Bab II |
| 2.2.3.3. Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar                    | 29/Bab II |
| 2.2.3.4. Angka literasi/numerasi                                                | 29/Bab II |
| 2.2.4. Perlindungan sosial yang adaptif                                         | 30/Bab II |
| 2.2.5. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju                                 | 31/Bab II |
| 2.2.6. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif         | 31/Bab II |
| 2.3. Aspek daya saing                                                           | 32/Bab II |
| 2.3.1. Daya saing sumber daya manusia                                           | 32/Bab II |
| 2.3.2. Daya saing inovasi dan produktifitas ekonomi                             | 32/Bab II |
| 2.3.3. Penerapan ekonomi hijau dan biru                                         | 33/Bab II |
| 2.3.4. Trasformasi digital                                                      | 34/Bab II |
| 2.3.5. Integrasi ekonomi domestik dan global                                    | 34/Bab II |
| 2.3.6. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi                 | 34/Bab II |
| 2.3.7. Stabilitas ekonomi Makro                                                 | 35/Bab II |
| 2.4. Asek pelayanan umum                                                        | 37/Bab II |
| 2.4.1. Standar pelayanan minimal                                                | 37/Bab II |
| 2.4.2. Penerapan dan capaian standar pelayanan minimal ( SPM) Kab. Sumba Tengah | 38/Bab II |
| 2.4.3. Kerjasama antar daerah                                                   | 51/Bab II |
| 2.4.4. Rencana pembangunan infrastruktur sumber APBN/APBD                       | 51/Bab II |
| 2.4.5. Badan Usaha Milik Daerah (BMD) yang mendukung pemerintah                 | 52/Bab II |
| 2.5. Gambaran keuangan daerah                                                   | 52/Bab II |
| 2.5.1. Realisasi APBD Sumba Tengah 2020-2024                                    | 53/Bab II |
| 2.5.2. Proyeksi APBD Sumba Tengah 2025-2029                                     | 55/Bab II |
| 2.6. Permasalahan dan isu strategis                                             | 59/Bab II |
| 2.6.1. Permasalahan pembangunan daerah                                          | 59/Bab II |
| 2.6.2. Isu strategis                                                            | 75/Bab II |
| 2.6.2.1. Isu strategis wilayah Bali Nusa Tenggara dalam RPJPN 2025-2029         | 75/Bab II |
| 2.6.2.2. Telaah kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Sumba Tengah             | 76/Bab II |
| 2.6.2.3. Telaah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab. Sumba Tengah      | 76/Bab II |



|                                                                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2.6.2.4. Telaah dokumen perencanaan<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                      | ..... | 76/Bab II  |
| 2.6.2.5. Telaah rencana induk percepatan<br>pembangunan Pulau Sumba                                      | ..... | 77/Bab II  |
| <b>BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                 | ..... | 1/Bab III  |
| 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran                                                                      | ..... | 1/Bab III  |
| 3.1.1. Visi                                                                                              | ..... | 1/Bab III  |
| 3.1.2. Misi                                                                                              | ..... | 4/bab III  |
| 3.1.3. Tujuan sasaran RPJMD 2025-2029                                                                    | ..... | 8/Bab III  |
| 3.2. Arah kebijakan dan program prioritas<br>pembangunan daerah                                          | ..... | 19/Bab III |
| 3.2.1. Startegis dan arah kebijakan daerah dalam<br>mencapai tujuan dan sasaran RPJMD<br>tahun 2025-2029 | ..... | 19/Bab III |
| 3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam<br>pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD<br>tahun 2025-2029  | ..... | 28/Bab III |
| <b>BAB IV. PROGRAM PERANGKAT<br/>DAERAH DAN KINERJA<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAH DAERAH</b>        | ..... | 1/Bab IV   |
| 4.1. Program perangkat daerah                                                                            | ..... | 1/Bab IV   |
| 4.2. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah                                                           | ..... | 36/Bab IV  |
| 4.2.1. Indikator kinerja utama (IKU)                                                                     | ..... | 37/Bab IV  |
| 4.2.2. Indikator kinerja penyelenggaraan<br>pemerintah daerah (IKD)                                      | ..... | 38/Bab IV  |
| <b>BAB V. PENUTUP</b>                                                                                    | ..... | 1/Bab V    |





## DAFTAR TABEL

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabel 2. 1 Kecamatan, Ibu Kota dan Jumlah Desa .....                                                       | 4- BAB II  |
| Tabel 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....                                                   | 5- BAB II  |
| Tabel 2. 3 Ketinggian Lahan Kab. Sumba Tengah.....                                                         | 6- BAB II  |
| Tabel 2. 4 Daya Dukung Lahan Kabupaten Sumba Tengah .....                                                  | 9- BAB II  |
| Tabel 2. 5 Kajian KLHS Daya Dukungan Ketahanan Air Sumba Tengah .....                                      | 10- BAB II |
| Tabel 2. 6 Daya Dukung Lahan Pertanian .....                                                               | 11- BAB II |
| Tabel 2. 7 Nilai CCR.....                                                                                  | 11- BAB II |
| Tabel 2. 8 Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029.....              | 13- BAB II |
| Tabel 2. 9 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumba Tengah .....                                            | 14- BAB II |
| Tabel 2. 10 Indeks Resiko Bencana .....                                                                    | 15- BAB II |
| Tabel 2. 11 Kerentanan Iklim Kabupaten Sumba Tengah .....                                                  | 18- BAB II |
| Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 - 2024 ....                                  | 19- BAB II |
| Tabel 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Tengah .....                                          | 19- BAB II |
| Tabel 2. 14 Tingkat kepadatan penduduk Sumba Tengah 2024.....                                              | 19- BAB II |
| Tabel 2. 15 Struktur kelompok umur penduduk.....                                                           | 20- BAB II |
| Tabel 2. 16 Nilai dan Kontribusi Sektor Pengeluaran dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumba Tengah ..... | 21- BAB II |
| Tabel 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                 | 21- BAB II |
| Tabel 2. 18 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025 - 2030 .....                                            | 21- BAB II |
| Tabel 2. 19 PDRB Per Kapita Kabupaten Sumba Tengah.....                                                    | 21- BAB II |
| Tabel 2. 20 Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030..                                  | 22- BAB II |
| Tabel 2. 21 Inflasi Sumba Tengah 2020 – 2024.....                                                          | 22- BAB II |
| Tabel 2. 22 Proyeksi Inflasi Sumba Tengah 2025 – 2030 .....                                                | 22- BAB II |
| Tabel 2. 23 Indeks Gini Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024.....                                            | 22- BAB II |
| Tabel 2. 24 Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030 .....                                  | 23- BAB II |
| Tabel 2. 25 Nilai Tukar Petani 2019 - 2024 .....                                                           | 23- BAB II |
| Tabel 2. 26 Proyeksi Nilai Tukar Petani 2025 – 2030.....                                                   | 23- BAB II |
| Tabel 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumba Tengah 2020 - 2024.....                                     | 24- BAB II |
| Tabel 2. 28 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Sumba Tengah 2025 – 2030.                                | 24- BAB II |
| Tabel 2. 29 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah .....                                            | 24- BAB II |
| Tabel 2. 30 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030 ....                                 | 24- BAB II |
| Tabel 2. 31 Usia Harapan Hidup kabupaten Sumba Tengah .....                                                | 28- BAB II |
| Tabel 2. 32 Tren Balita Stunting Kabupaten Sumba Tengah.....                                               | 29- BAB II |
| Tabel 2. 33 Proyeksi Prevalensi Stunting Tahun 2025 – 2030 (Menurut SKI).....                              | 29- BAB II |
| Tabel 2. 34 Angka Kematian Ibu dan bayi Sumba Tengah 2020 - 2024.....                                      | 29- BAB II |



|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tabel 2. 35 Tren Penyakit TB Paru Sumba Tengah 2020 – 2024.....                                           | 30- BAB II  |
| Tabel 2. 36 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah.....                                           | 30- BAB II  |
| Tabel 2. 37 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah .....                                              | 30- BAB II  |
| Tabel 2. 38 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024...                                | 31- BAB II  |
| Tabel 2. 39 Proyeksi Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah.....                                 | 31- BAB II  |
| Tabel 2. 40 Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi NTT 2020 - 2024.....                                        | 31- BAB II  |
| Tabel 2. 41 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024.....                                  | 32- BAB II  |
| Tabel 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2029.....                                  | 32- BAB II  |
| Tabel 2. 43 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumba Tengah .....  | 32- BAB II  |
| Tabel 2. 44 Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial .....                                             | 33- BAB II  |
| Tabel 2. 45 Daya Saing SDM.....                                                                           | 35- BAB II  |
| Tabel 2. 46 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2024 .....                                                    | 38- BAB II  |
| Tabel 2. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka 2020 - 2024.....                                                 | 39- BAB II  |
| Tabel 2. 48 Angka Kemiskinan Kab. Sumba Tengah 2020 - 2024 .....                                          | 39- BAB II  |
| Tabel 2. 49 Pendapatan Asli Daerah 2023 - 2024 .....                                                      | 39- BAB II  |
| Tabel 2. 50 PDRB Per Kapita 2020 - 2024.....                                                              | 40- BAB II  |
| Tabel 2. 51 Belanja Konsumsi.....                                                                         | 40- BAB II  |
| Tabel 2. 52 Pencapaian dan Target Standar Pelayanan Minimal .....                                         | 42- BAB II  |
| Tabel 2. 53 Eksisting Proyeksi Kebutuhan Sambungan Rumah (SR).....                                        | 51- BAB II  |
| Tabel 2. 54 Eksisting Proyeksi Kebutuhan Sarpras dan Fasilitas Lingkungan .....                           | 51- BAB II  |
| Tabel 2. 55 Realisasi APBD Sumba Tengah 2020-2024 .....                                                   | 53- BAB II  |
| Tabel 2. 56 Neraca Daerah .....                                                                           | 55- BAB II  |
| Tabel 2. 57 Proyeksi APBD Sumba Tengah 2025 - 2030.....                                                   | 56- BAB II  |
| Tabel 2. 58 Identifikasi Masalah Berdasarkan SDGs Urusan Pembangunan Daerah                               | 61- BAB II  |
| Tabel 2. 59 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....                                     | 71- BAB II  |
| Tabel 2. 60 Daftar Panjang Isu Strategis.....                                                             | 84- BAB II  |
| Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 .....                          | 15- BAB III |
| Tabel 3. 2 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah 2025- 2029 ...                                   | 15- BAB III |
| Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....       | 17- BAB III |
| Tabel 3. 4 Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumba Tengah..... | 24- BAB III |
| Tabel 4. 1 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 – 2030 .....                           | 2– BAB IV   |
| Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumba Tengah .....                                     | 38– BAB IV  |
| Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).....                               | 40– BAB IV  |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gambar 1. 1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....                       | 8 – BAB I   |
| Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya..... | 9 – BAB I   |
| Gambar 2.1 Peta Wilayah Sumba Tengah.....                                                    | 2 – BAB II  |
| Gambar 2.2 Peta Geologi Sumba Tengah.....                                                    | 3 – BAB II  |
| Gambar 2.3 Peta Topografi Sumba Tengah.....                                                  | 4 – BAB II  |
| Gambar 2.4 Peta Pola Ruang.....                                                              | 5 – BAB II  |
| Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan.....                                                      | 9 – BAB II  |
| Gambar 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan.....                                    | 10 – BAB II |
| Gambar 2.7 Indeks Risiko Bencana.....                                                        | 12 – BAB II |
| Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana banjir.....                                                    | 13 – BAB II |
| Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi.....                                                | 13 – BAB II |
| Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kebakaran.....                                                | 14 – BAB II |
| Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Longsor.....                                                  | 14 – BAB II |
| Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana Kekeringan.....                                               | 15 – BAB II |
| Gambar 2.13 Peta Rawan Bencana Cuaca Ekstrim.....                                            | 15 – BAB II |
| Gambar 2.14 Indeks Komposit Ketahanan Pangan.....                                            | 22 – BAB II |
| Gambar 2.15 Peta Mata Pencaharian.....                                                       | 23 – BAB II |
| Gambar 2.16 Tingkat Sensitivitas Mata Pencaharian.....                                       | 23 – BAB II |
| Gambar 2.17 Resilensi Mata Pencaharian.....                                                  | 24 – BAB II |
| Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Literasi.....                                                 | 30 – BAB II |
| Gambar 2.19 Jumlah Rumah Ibadah.....                                                         | 31 – BAB II |
| Gambar 2.20 Indeks Inovasi Daerah.....                                                       | 33 – BAB II |
| Gambar 2.21 Indikator Penilaian Aspek Sosial.....                                            | 79 – BAB II |
| Gambar 2.22 Peta Sektor Pengembangan Pulau Sumba.....                                        | 79 – BAB II |
| Gambar 2.23 Isu Strategis Aspek Sosial, Ekonomi, Sarpras dan Kelembagaan...<br>II            | 80 – BAB II |
| Gambar 2.24 Sektor Unggulan, Potensial, Berkembang, Tertinggal.....                          | 81 – BAB II |
| Gambar 2.25 Capaian Indikator TPB.....                                                       | 83 – BAB II |
| Gambar 2.26 Perbandingan Indikator TPB.....                                                  | 83 – BAB II |





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Seluruh dokumen rencana pembangunan daerah tersebut disusun sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagai tindaklanjut dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilu kepala daerah serentak, maka Bupati bersama DPRD Kabupaten menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD dimulai dari 1) persiapan penyusunan, 2) penyusunan rancangan awal, 3) penyusunan rancangan, 4) pelaksanaan musrenbang, 5) perumusan rancangan akhir, dan 6) penetapan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki nilai strategis sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam kebijakan, program, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN dan dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif,



akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan spasial. Periodisasi RPJMD Kabupaten Sumba Tengah selaras dengan periodisasi RPJMN yaitu 2025-2029 untuk masa bakti kepemimpinan Bupati Drs. Paulus S.K Limu dan Wakil Bupati M. Umbu Djoka, S.Hut., M.Si yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.

Kabupaten Sumba Tengah adalah salah satu kabupaten di Pulau Sumba dan merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu kabupaten yang terbentuk pada tahun 2007 pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, disamping menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke depan.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok periodisasi lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2045 yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sumba Tengah pada periode berkenaan. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator makro pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan gini rasio masih menempatkan Sumba Tengah dibawah rata-rata capaian provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Sumba Tengah ke depan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Adapun latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Analisis capaian dan kendala yang dihadapi dalam periode tersebut memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang perlu dilanjutkan, disesuaikan, atau ditingkatkan.

2. Tantangan dan Peluang Pembangunan Daerah.

Kabupaten Sumba Tengah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diantisipasi dan dimanfaatkan secara optimal. Tantangan tersebut meliputi isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta masalah lingkungan. Sementara itu, peluang yang dapat dioptimalkan mencakup potensi sumber daya alam, pariwisata, serta keunggulan geografis yang dimiliki. RPJMD



2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat.

3. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 secara konsisten dan berjenjang merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Demikian halnya juga dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara program pembangunan di tingkat kabupaten dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

4. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan konsultasi publik sehingga dapat mengoptimalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Penggunaan Pendekatan Penyusunan RPJMD.

Penyusunan RPJMD 2025- 2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan penyusunan RPJMD menekankan pada penggunaan data dan analisis ilmiah yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan metode analisis ilmiah, penyusunan RPJMD dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih rasional, realistis dan relevan, akurat, efektif, dan efisien. Pendekatan ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti empiris yang kuat, sehingga dapat memitigasi risiko, resiliensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program pembangunan. Dengan latar belakang tersebut, RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah. Melalui implementasi RPJMD





Kabupaten Sumba Tengah pada perencanaan tahunan diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534).
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0138);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2043 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);



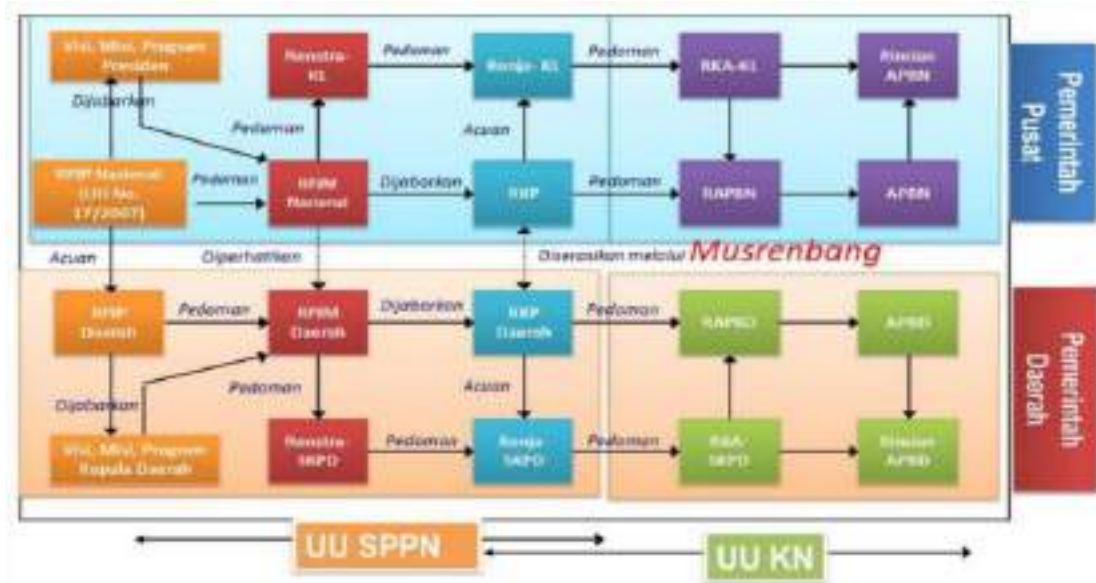


28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang SOTK Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor ...);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusna Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional sebagaimana termuat dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi tahun 2025-2045. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025- 2045, dan arahan struktur dan pola ruang serta indikasi program dalam RTRW Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2019-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kajian masterplan pengembangan pulau sumba, kajian riset lembaga perguruan tinggi dan badan riset inovasi nasional serta kebijakan nasional utamanya yang berkontribusi pada ASTA CITA 2025-2029. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan. Hubungan keterkaitan dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan diatas dengan dokumen lainnya seperti pada gambar berikut :

**Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Tengah.  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan Tahap Pertama Dokumen RPJPD.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040.  
Dokumen RTRW menjadi acuan spasial penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang untuk tahun 2025-2029.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2029, terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.
5. Dokumen Perencanaan Multi Sektor/Sektoral lainnya.  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (Hasil Kajian BRIN), Studi Pendekatan Mata Pencarian Terpadu untuk Analisis Ketahanan Iklim (Hasil kajian Studi Clear+), dan lain sebagainya. RPJMD juga akan

menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

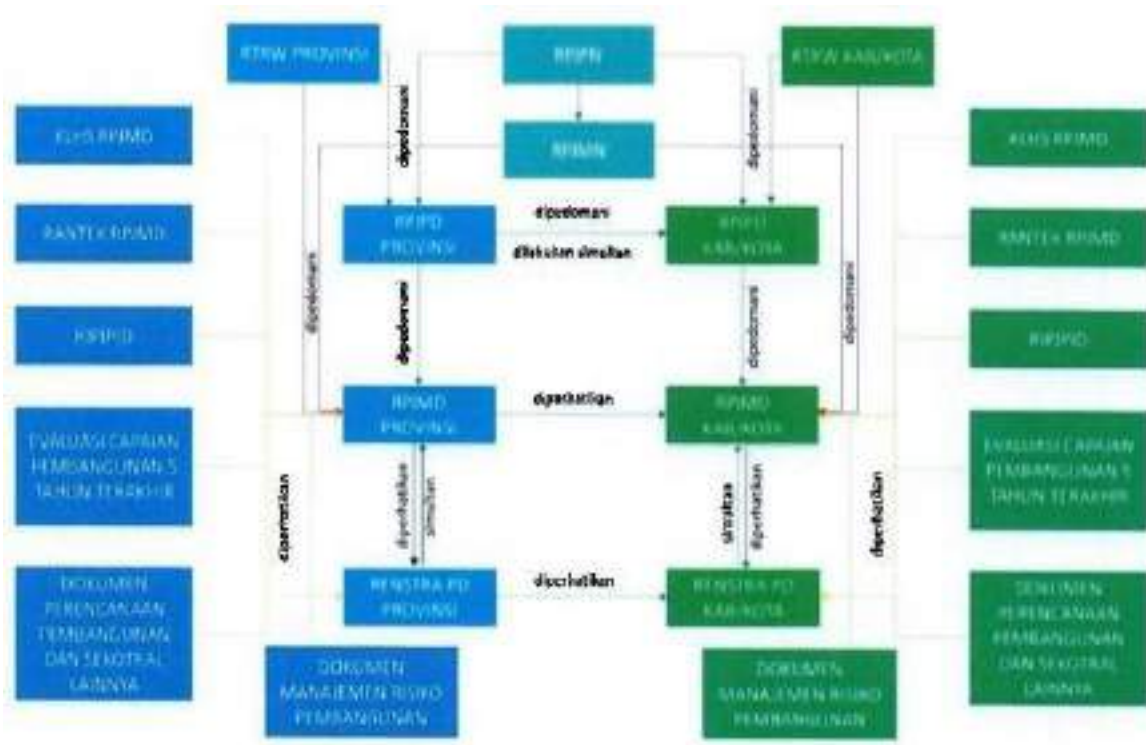
6. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2029 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

**Gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.**



#### 1.4. Maksud Dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025- 2029;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing – masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;





4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumba Tengah; dan
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### **1.5. Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJMD**

Sistematika RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat :
  - a. Aspek geografi dan demografi;
  - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
  - c. Aspek Daya Saing Daerah;
  - d. Aspek Pelayanan Umum;

Catatan : Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai kondisi daerah, seperti :

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. Kerjasama daerah;
  - c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di kabupaten/kota; dan
  - d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029
  3. Subbab permasalahan dan isu strategis paling sedikit memuat :
    - a. Permasalahan pembangunan daerah;
    - b. Isu strategis daerah.



### BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat :
  - a. Visi dan Misi; dan
  - b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat :
  - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029; dan
  - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.

### BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
  - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
  - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
  - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
  - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Sumba Tengah merupakan daerah otonomi berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah 20 (dua puluh) tahun ke depan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045. Prinsip penetapan dokumen perencanaan daerah dimaksud adalah untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah secara substansi untuk mewujudkan :

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
2. Peningkatan dan pemerataan lapangan usaha dan kesempatan kerja masyarakat;
3. Peningkatan dan pemerataan akses kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
4. Peningkatan daya saing daerah.

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1. Luas Wilayah Sumba Tengah

Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 - 2040 ditetapkan luas wilayah daratan 181.760 Ha, panjang garis pantai 104,93 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

|                 |   |                                                                              |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : | Selat Sumba                                                                  |
| Sebelah Timur   | : | Kecamatan Haharu, Kecamatan Lewa, dan Kecamatan Lewa Tidahu Kab. Sumba Timur |
| Sebelah Selatan | : | Samudera Hindia                                                              |
| Sebelah Barat   | : | Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli, dan Kecamatan Tanarighu Kab. Sumba Barat |

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :





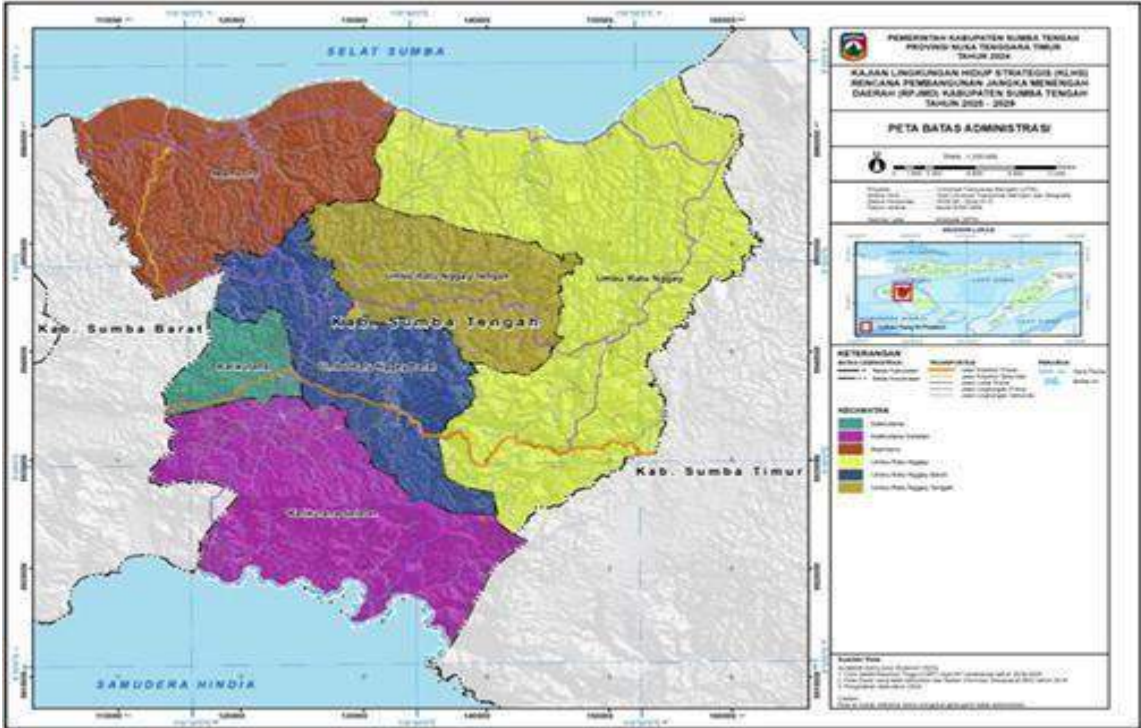
Tabel 2.1.  
Kecamatan, Ibu Kota dan Jumlah Desa

| No     | Kecamatan              | Jumlah Desa | Ibukota Kecamatan | Luas (Ha)  | Persentase (%) |
|--------|------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 1      | Katikutana             | 7           | Anakalang         | 6.854,90   | 4              |
| 2      | Katikuna Selatan       | 9           | Waikabeti         | 34.820,77  | 19             |
| 3      | Umbu Ratu Nggay Barat  | 15          | Maderi            | 23.637,66  | 13             |
| 4      | Umbu Ratu Nggay        | 11          | Lendi Wacu        | 63.508,66  | 35             |
| 5      | Umbu Ratu Nggay Tengah | 10          | Rita Bowa         | 21.103,70  | 12             |
| 6      | Mamboro                | 13          | Mananga           | 31.834,37  | 18             |
| Jumlah |                        | 65          | Waibakul          | 181.760,06 | 100            |

Sumber data : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

Gambaran data administrasi sebagaimana di atas dapat dilihat pada peta wilayah Sumba Tengah seperti gambar berikut :

Gambar 2.1. Peta Wilayah Sumba Tengah



2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

- 1) Posisi Astronomis
- Posisi geografis wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana terletak antara garis koordinat 9° 18’ – 10° 20’ Lintang Selatan dan 118 ° 55 ° – 120 ° 23 ° Bujur Timur.
- 2) Posisi Geostrategis
- Geostrategis sebagai rumusan basis wilayah memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Perumusan geostrategis memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, sosial ekonomi dan ketahanan serta memperhitungkan *trend* perkembangan situasi regional, nasional dan bahkan global. Posisi geostrategis Sumba Tengah sebagai bagian integral Pulau Sumba

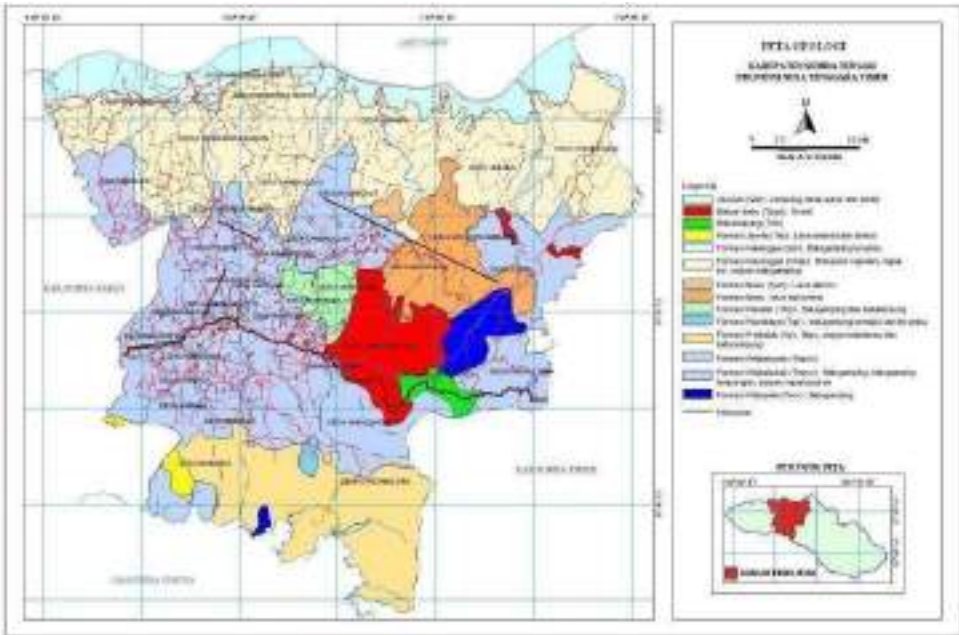


ditentukan oleh transformasi perubahan struktur penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, geoekonomi, perubahan iklim dan geopolitik nasional. Posisi geostrategis Sumba Tengah dengan andalan potensi sumber daya alam dan kekayaan nilai sosial dan budaya mendukung superhub pariwisata dan ekonomi kreatif kawasan bertaraf nasional dan internasional.

3) Potensi Kandungan (Geologis)

Peta Geologi Kabupaten Sumba Tengah dalam Pusat Penelitian Geologi LIPI (2009) yang disajikan pada **Gambar 2.2** didominasi oleh batuan karbonat berupa batu gamping terumbu, batu gamping berlapis dan napal. Sebagian kecil berupa batuan vulkanik (batuan beku, lava, tufa dll) dengan penyebaran terbatas.

Gambar 2.2. Peta Geologi Kab. Sumba Tengah



4) Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kesehatan Lingkungan. Kualitas lingkungan hidup suatu kawasan dapat ditentukan oleh beberapa indeks seperti indeks kualitas air laut, indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan. Data kualitas lingkungan hidup Sumba Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

| Uraian                                                                                                                       | TAHUN          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                              | 2021           | 2022         | 2023          |
| IndekKualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Berserta<br>Indek Kualitas Udara, Ar<br>dan Lahan Kab. Sumba<br>Tengah tahun 2021-2023 | IKA; 0,00 %    | IKA; 50,00%  | IKA; 50,00%   |
|                                                                                                                              | IKU : 91,75 %  | IKU : 92,86% | IKU : 93,62%  |
|                                                                                                                              | IRL : 52, 38 % | IRL : 52,38% | IRL : 52,39%  |
|                                                                                                                              | IKLH : 48,63%  | IKLH : 68,19 | IKLH : 68,19% |

Sumber : Data Lingkungan Hidup Kab. Sumba Tengah, 2024

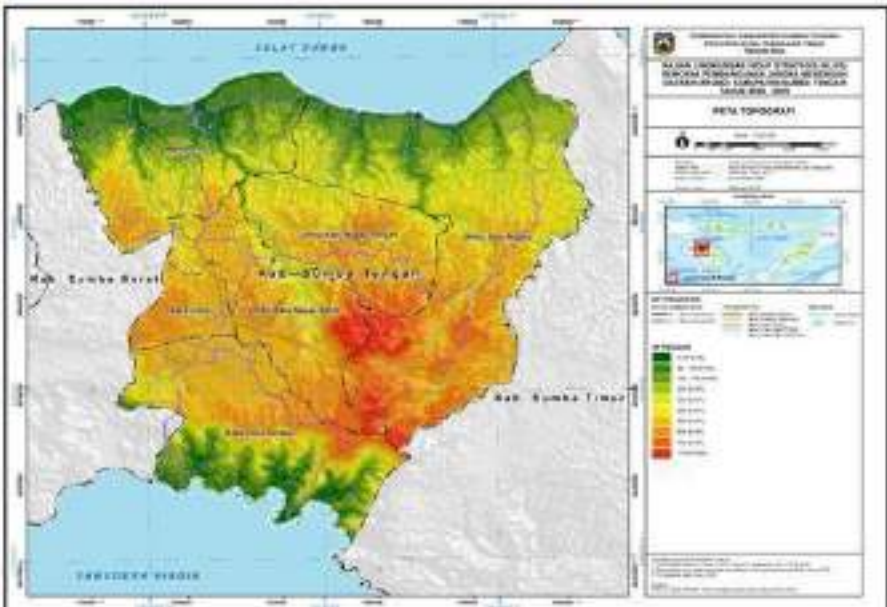


5) Topografi

Kondisi topografi Pulau Sumba pada umumnya menurut penelitian Meizer dan Pfeifer (1964) membagi daratan Sumba dalam 7 kategori topografi, karena pembagiannya sangat sulit diamati, maka untuk kemudahan pengamatan topografi dibagi dalam 5 kategori sebagai berikut :

- Wilayah gunung ditandai dengan kemiringan yang tinggi wilayah ini meliputi Gunung Tana Daru.
- Wilayah perbukitan ditandai dengan kemiringan yang lebih rendah dari wilayah gunung.
- Wilayah undukan dekat laut yang ditandai undukan dan jurang yang curam sepanjang pantai selatan
- Wilayah datar yang cukup luas dan dikelilingi bukit seperti dataran Kawasan Umbu Ratu Nggay Barat beririsan wilayah Anakalang hingga kecamatan Katiku Tana Selatan
- Wilayah daratan alluvial ditandai dataran agak sempit di sekitar sungai

Gambar 2.3. Peta Topografi Sumba Tengah



6) Ketinggian Lahan

Rata – rata ketinggian lahan Kabupaten Sumba Tengah di atas permukaan laut sebagai berikut :

Tabel 2.3. Ketinggian Lahan Kab. Sumba Tengah

| No | Kecamatan              | Ketinggian (mdpl) |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | Katiku Tana            | 0 – 800           |
| 2. | Katiku Tana Selatan    | 0 – 720           |
| 3. | Umbu Ratu Nggay Barat  | 0 – 800           |
| 4. | Umbu Ratu Nggay        | 0 – 800           |
| 5. | Umbu Ratu Nggay Tengah | 0 – 800           |
| 6. | Mamboro                | 0 – 450           |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah



#### 7) Ancaman Perubahan Iklim

Karakteristik klimatologi iklim Sumba Tengah dominan beriklim kering dengan 4 (empat) bulan musim hujan (November - Maret) dan 8 (delapan) bulan musim kemarau/kering (April - Oktober). Karakter iklim di atas serta tren pemanasan global dengan anomali iklim el nino dan la nina berpengaruh pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

##### 2.1.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Mengacu pada pemetaan kawasan berdasarkan RTRW Sumba Tengah potensi sumber daya alam Sumba Tengah dibagi sebagai berikut :

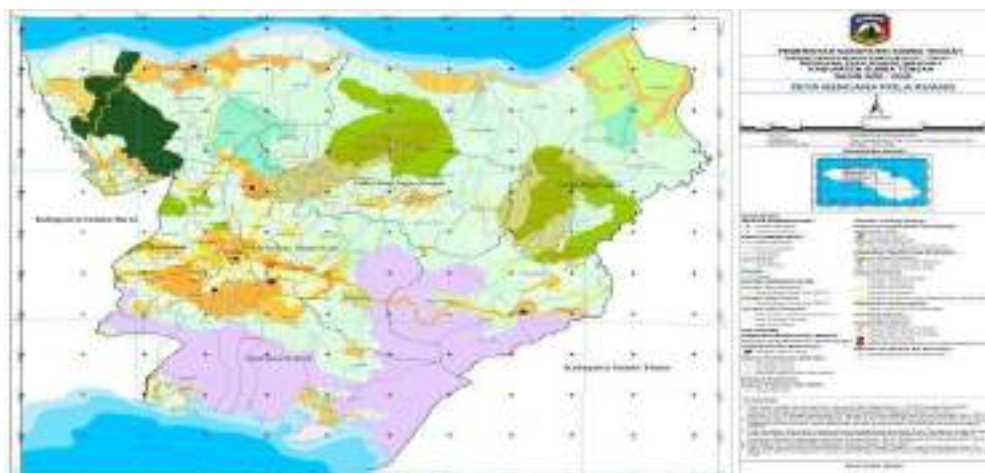
- Kawasan Hutan Produksi dengan luasan 14,875 Ha terdapat pada semua kecamatan;
- Kawasan Pertanian mencakup kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan luasan 77,942 Ha;
- Kawasan Perikanan mencakup perikanan tangkap pada 7 desa pesisir garis pantai dan perikanan budidaya terdapat diseluruh kecamatan;
- Kawasan Peruntukan Industri sebagai sentra industri kecil dan menengah untuk seluruh kecamatan yang belum optimal;
- Kawasan Pariwisata mencakup pariwisata alam, budaya dan buatan tersebar pada seluruh kecamatan dan secara sektoral telah tersedia dokumen kajian masterplan pengembangan pariwisata Sumba Tengah;
- Kawasan Permukiman

Untuk mendukung penataan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi mencakup permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan dalam pembangunannya.

- Kawasan Strategis mencakup kawasan strategis kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Potensi sumber daya alam Sumba Tengah belum optimal dalam pengembangannya sehingga secara bertahap akan menjadi perhatian dalam pengembangannya sebagaimana peta pola ruang berikut :

**Gambar 2.4. Peta Pola Ruang**



h. Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang. Kriteria tata cara penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II1980.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan peta dengan tiap- tiap variabel seperti keadaan iklim, kondisi tanah, dan kemiringan lereng, maka diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di Kabupaten Sumba Tengah paling sesuai untuk kawasan budidaya sebesar 181.760,00 Ha.

i. Daya dukung dan daya tampung lahan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang agar tidak melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya. Konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki banyak definisi, namun kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan (*suplly*) dan permintaan (*demand*) dan ke-semuanya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Secara umum teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Muta'ali (2014) dalam *Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2014* telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang akan digunakan sebagai pendekatan



dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung di RTRW Kabupaten Sumba Tengah.

- **Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan**  
Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang. Kriteria tata cara penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II1980. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan peta dengan tiap- tiap variabel seperti keadaan iklim, kondisi tanah, dan kemiringan lereng, maka diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di Kabupaten Sumba Tengah paling sesuai untuk kawasan budidaya sebesar 181.760,00 Ha.
- **Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan Mengacu** pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL ) dan kebutuhan lahan (DL) . Bila  $SL > DL$  , daya dukung lahan dinyatakan surplus atau terlampaui. Bila  $SL < DL$ , daya dukung lahan dinyatakan defisit atau belum terlampaui. Daya dukung lahan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2023 dinyatakan **Terlampaui**. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Daya Dukung Lahan Kabupaten Sumba Tengah

| No    | Kecamatan              | Ketersediaan Lahan 2023 (Ha) SL | Daya Dukung Lahan |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|-------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|       |                        |                                 | DL                | 2023  | DL     | 2025  | DL     | 2026  | DL     | DL    | DL     | 2028  | DL     | 2029  |
| 1     | Katikutana             | 6.854,91                        | 2.518             | SL>DL | 2.620  | SL>DL | 2.672  | SL>DL | 2.725  | SL>DL | 2.779  | SL>DL | 2.835  | SL>DL |
| 2     | Katikutana Selatan     | 34.820,77                       | 2.707             | SL>DL | 2.740  | SL>DL | 2.756  | SL>DL | 2.773  | SL>DL | 2.790  | SL>DL | 2.806  | SL>DL |
| 3     | Umbu Ratu Nggay Barat  | 23.665,28                       | 3.314             | SL>DL | 3.371  | SL>DL | 3.399  | SL>DL | 3.428  | SL>DL | 3.456  | SL>DL | 3.486  | SL>DL |
| 4     | Umbu Ratu Nggay        | 63.500,21                       | 2.012             | SL>DL | 2.026  | SL>DL | 2.033  | SL>DL | 2.040  | SL>DL | 2.048  | SL>DL | 2.055  | SL>DL |
| 5     | Umbu Ratu Nggay Tengah | 21.084,52                       | 1.420             | SL>DL | 1.421  | SL>DL | 1.422  | SL>DL | 1.423  | SL>DL | 1.424  | SL>DL | 1.425  | SL>DL |
| 6     | Mamboro                | 31.834,37                       | 3.417             | SL>DL | 3.458  | SL>DL | 3.479  | SL>DL | 3.499  | SL>DL | 3.520  | SL>DL | 3.541  | SL>DL |
| Total |                        | 181.760,07                      | 15.389            | SL>DL | 15.635 | SL>DL | 15.761 | SL>DL | 15.888 | SL>DL | 16.017 | SL>DL | 16.147 | SL>DL |

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Sumba Tengah 2025 – 2029

Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa proyeksi daya dukung lahan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025 – 2029 di 6 kecamatan dijelaskan bahwa SL (Ketersediaan Lahan) > DL (Kebutuhan Lahan) yang artinya **terlampaui** hingga





akhir tahun perencanaan. Daya dukung lahan merujuk pada kapasitas maksimum suatu area untuk mendukung kegiatan manusia tanpa merusak lingkungan atau mengurangi kualitas tanah. Kondisi yang dapat mempengaruhi daya dukung lahan yang pertama adalah kualitas tanah (Kesehatan tanah, kesuburan, dan kemampuan tanah untuk mendukung pertanian atau Pembangunan), topografi (kemiringan dan bentuk lahan yang memengaruhi kemampuan untuk mendukung berbagai jenis kegiatan), iklim (kondisi iklim yang mempengaruhi potensi untuk pengembangan lahan), sumber daya air (ketersediaan air untuk irigasi, konsumsi, dan kegiatan lainnya), dan ekosistem serta biodiversitas (keberadaan flora dan fauna yang harus dipertimbangkan agar tidak terganggu). Aktivitas yang diperbolehkan di suatu area tergantung pada perencanaan tata ruang meliputi pertanian, permukiman, industri, rekreasi dan konservasi.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Asta Cita dan Dasa Cita secara berjenjang harus terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah untuk ketahanan energi, air dan pangan. Dukungan ketahanan energi Sumba Tengah adalah mengoptimalkan EBT potensi tenaga matahari, air dan bauran energi baru terbarukan lainnya. Secara geologi ketahanan air Sumba Tengah mengandalkan air permukaan dan air tanah dalam baik untuk kebutuhan air bersih dan pertanian dalam arti luas. Kajian KLHS mengkonfirmasi daya dukungan ketahanan air Sumba Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.5. Kajian KLHS Daya Dukungan Ketahanan Air Sumba Tengah

| No    | Kecamatan              | SA             | DA 2023     | Status DDA | DA 2025     | Status DDA | DA 2026     | Status DDA | DA 2027     | Status DDA | DA 2028     | Status DDA | DA 2029     | Status DDA | Ket     |
|-------|------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| 1     | Katikutana             | 19.042.477,41  | 23.700.800  | SA<DA      | 24.654.222  | SA<DA      | 25.145.221  | SA<DA      | 25.645.998  | SA<DA      | 26.156.749  | SA<DA      | 26.677.671  | SA<DA      | Defisit |
| 2     | Katikutana Selatan     | 95.976.327,70  | 25.476.800  | SA>DA      | 25.785.015  | SA>DA      | 25.940.518  | SA>DA      | 26.096.959  | SA>DA      | 26.254.344  | SA>DA      | 26.412.677  | SA>DA      | Surplus |
| 3     | Umbu Ratu Nggay Barat  | 64.984.278,67  | 31.195.200  | SA>DA      | 31.723.087  | SA>DA      | 31.990.371  | SA>DA      | 32.259.906  | SA>DA      | 32.531.713  | SA>DA      | 32.805.810  | SA>DA      | Surplus |
| 4     | Umbu Ratu Nggay        | 179.951.374,67 | 18.937.600  | SA>DA      | 19.070.566  | SA>DA      | 19.137.398  | SA>DA      | 19.204.465  | SA>DA      | 19.271.767  | SA>DA      | 19.339.304  | SA>DA      | Surplus |
| 5     | Umbu Ratu Nggay Tengah | 59.993.230,71  | 13.361.600  | SA>DA      | 13.378.150  | SA>DA      | 13.386.433  | SA>DA      | 13.394.721  | SA>DA      | 13.403.015  | SA>DA      | 13.411.313  | SA>DA      | Surplus |
| 6     | Mamboro                | 88.668.970,54  | 32.161.600  | SA>DA      | 32.545.697  | SA>DA      | 32.739.462  | SA>DA      | 32.934.381  | SA>DA      | 33.130.460  | SA>DA      | 33.327.707  | SA>DA      | Surplus |
| Total |                        | 508.616.659,71 | 144.833.600 | SA>DA      | 147.156.737 | SA>DA      | 148.339.403 | SA>DA      | 149.536.431 | SA>DA      | 150.748.047 | SA>DA      | 151.974.482 | SA>DA      | Surplus |

Sumber Data : Dokumen Kajian KLHS RPJMD Kab. Sumba Tengah 2025 - 2029

Ketahanan pangan Sumba Tengah didukung dengan luasan lahan pertanian eksisting budidaya ataupun pengembangan secara bertahap mendukung swasembada pangan nasional. Kajian daya dukung lahan pertanian sebagai data KLHS sebagai berikut.



Tabel. 2.6. Daya Dukung Lahan Pertanian

| No    | Kecamatan             | Daya Dukung Lahan Pertanian |          |          |          |          |            |
|-------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|       |                       | 2024                        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029       |
| 1     | Katikutana            | 26,2874                     | 25,27082 | 24,77737 | 24,29355 | 23,81919 | 23,3540803 |
| 2     | Katikutana Selatan    | 31,12284                    | 30,75082 | 30,56648 | 30,38325 | 30,20111 | 30,0200701 |
| 3     | Umbu Ratu Nggay Barat | 28,12513                    | 27,65712 | 27,42604 | 27,19689 | 26,96966 | 26,7443219 |
| 4     | Umbu Ratu Nggay       | 36,97234                    | 36,71456 | 36,58634 | 36,45857 | 36,33125 | 36,2043723 |
| 5     | Umbu R. Nggay Tengah  | 35,93179                    | 35,88734 | 35,86513 | 35,84294 | 35,82076 | 35,7985975 |
| 6     | Mamboro               | 23,42943                    | 23,15292 | 23,01589 | 22,87967 | 22,74426 | 22,6096535 |
| Total |                       | 45,8468                     | 45,123   | 44,7632  | 44,4049  | 44,048   | 43,692534  |

Sumber Data : Dokumen Kajian KLHS RPJMD

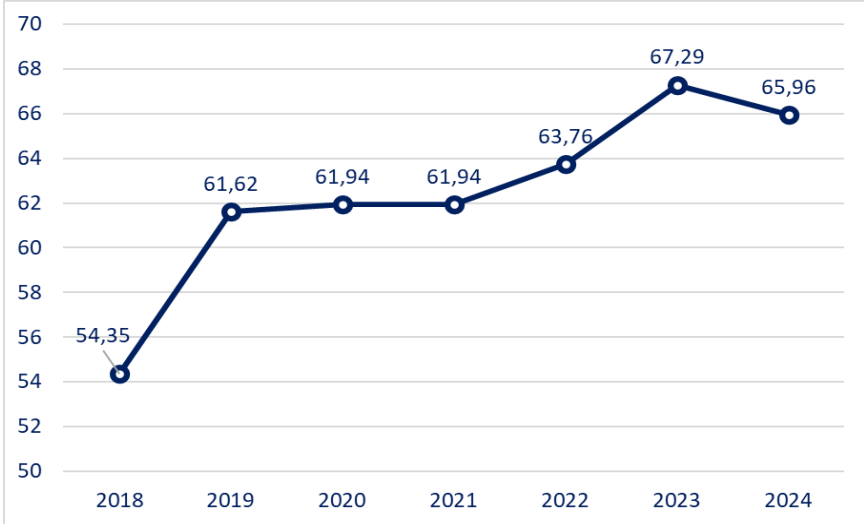
Tabel 2.7. Nilai CCR

| No.   | Kecamatan              |        | CCR    |         |         |         |         | Keterangan  |
|-------|------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|       |                        |        | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |             |
| 1     | Katikutana             | 2,4491 | 2,9855 | 2,92724 | 2,87008 | 2,81404 | 2,75909 | Sangat Baik |
| 2     | Katikutana Selatan     | 7,5693 | 6,8365 | 6,79552 | 6,75478 | 6,71429 | 6,67404 | Sangat Baik |
| 3     | Umbu Ratu Nggay Barat  | 9,0938 | 5,9591 | 5,9093  | 5,85992 | 5,81096 | 5,76241 | Sangat Baik |
| 4     | Umbu Ratu Nggay        | 20,984 | 10,691 | 10,6539 | 10,6167 | 10,5796 | 10,5426 | Sangat Baik |
| 5     | Umbu Ratu Nggay Tengah | 1,9779 | 4,6461 | 4,64322 | 4,64035 | 4,63748 | 4,63461 | Sangat Baik |
| 6     | Mamboro                | 8,4014 | 4,3932 | 4,36718 | 4,34134 | 4,31564 | 4,2901  | Sangat Baik |
| Total |                        | 5,802  | 5,762  | 5,7163  | 5,6705  | 5,6249  | 5,5795  | Sangat Baik |

Sumber Data : Dokumen Kajian KLHS RPJMD

Sajian data daya dukung Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025 – 2029 terkategori sangat baik, di 6 Kecamatan nilai CCR sampai akhir tahun perencanaan yakni Tahun 2029 masih bernilai >2 sehingga dapat dikatakan juga masih mampu merealisasikan program strategis nasional yaitu swasembada pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah secara umum terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2018 nilai IKP Kabupaten Sumba Tengah senilai 54,35 yang meningkat menjadi 67,29 pada Tahun 2023, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 65,96. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, capaian ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sumba Tengah terus membaik. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2024

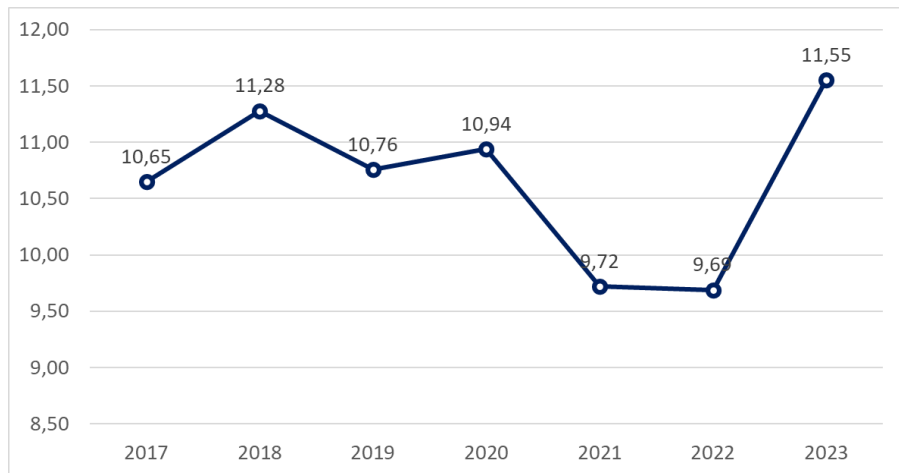


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025



Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Sumba Tengah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Sumba Tengah senilai 10,65 persen naik menjadi 11,28 persen pada Tahun 2018, kemudian turun menjadi 9,69 persen pada Tahun 2023, dan pada Tahun 2024 naik menjadi 11,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, proporsi penduduk di Kabupaten Sumba Tengah yang konsumsi makanannya tidak mencukupi untuk menyediakan tingkat energi makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat, mengalami fluktuasi, sehingga dibutuhkan kerangka intervensi yang tepat agar dapat diturunkan. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017-2023**



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

**2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas**

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit atau gabungan dari indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Pada tabel dibawah ini merupakan data IKLH di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019- 2023. Penghitungan IKLH dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan KLHK dengan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKLH Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023, yaitu 68,19 (Kategori sedang), Pengkategorian nilai IKLH yaitu: nilai IKLH  $\geq 90$  tergolong sangat baik, nilai  $70 < \text{IKLH} < 90$  tergolong baik, nilai  $50 < \text{IKLH} < 70$  tergolong sedang, nilai  $25 < \text{IKLH} < 50$  tergolong buruk, nilai  $30 < \text{IKLH} < 25$  mendapatkan predikat sangat buruk.

Nilai IKLH Kabupaten Sumba Tengah meningkat jika dilihat dari tren pada tahun 2022 hingga 2023, di mana indeks lingkungan hidup tersebut pada tahun 2022 adalah 67,88 menjadi 68,19 pada tahun 2023, kondisi ini meningkat 0,31. Dimana target IKLH Kabupaten/Kota sebesar 64 persen, sehingga dalam





hal ini Sumba Tengah telah memenuhi target tersebut dengan capaian 68,19. Mengingat Target IKLH Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbangda Provinsi NTT dan DLHK Provinsi NTT, serta dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024. Target Kabupaten/Kota diharapkan untuk menyesuaikan dengan target yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga linear antara perencanaan daerah dan pusat. Target ini juga wajib untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Adapun target IKLH Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.8. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029**

| No. | Prov./Kab.          | Tahun | Target IKLH |       |       |       |                                 |
|-----|---------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------------------------------|
|     |                     |       | IKLH        | IKU   | IKA   | IKL   | IKAL                            |
|     | Sumba Tengah        | 2025  | 71,57       | 89,78 | 56,40 | 63,92 | IKAL adalah kewenangan Provinsi |
|     |                     | 2026  | 71,74       | 89,98 | 56,60 | 63,99 |                                 |
|     |                     | 2027  | 71,91       | 90,18 | 56,80 | 64,06 |                                 |
|     |                     | 2028  | 72,08       | 90,38 | 57,00 | 64,13 |                                 |
|     |                     | 2029  | 72,25       | 90,58 | 57,20 | 64,20 |                                 |
| 2   | Nusa Tenggara Timur | 2025  | 80,02       | 89,03 | 71,10 | 70,75 | 84,15                           |
|     |                     | 2026  | 80,19       | 89,23 | 71,30 | 70,82 | 82,40                           |
|     |                     | 2027  | 80,36       | 89,43 | 71,50 | 70,89 | 84,25                           |
|     |                     | 2028  | 80,52       | 89,63 | 71,70 | 70,96 | 84,30                           |
|     |                     | 2029  | 80,69       | 89,83 | 71,90 | 71,03 | 84,35                           |

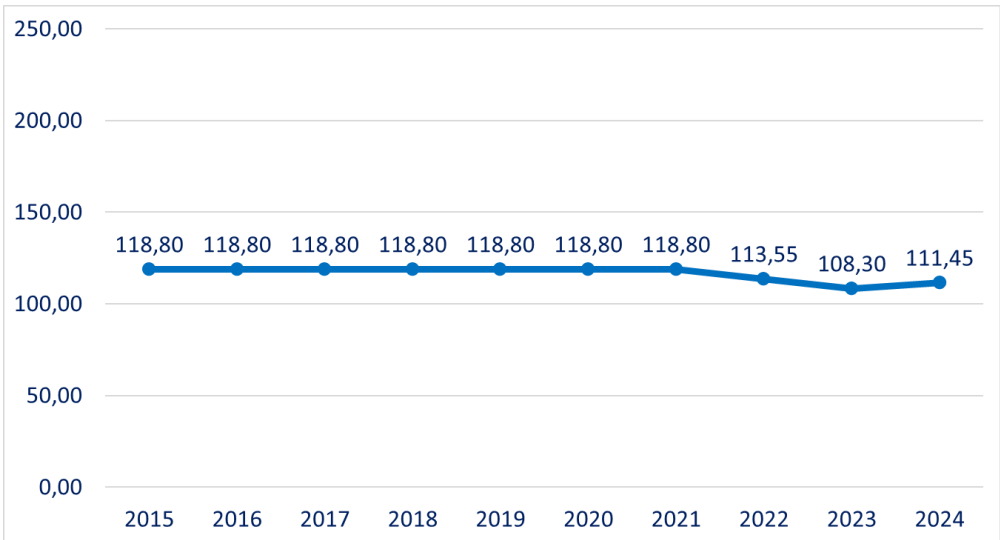
Sumber Data : Dokumen Kajian KLHS RPJMD

**2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Secara historis, dalam kurun waktu 24 tahun terakhir atau periode 2000-2024 telah terjadi 28 kejadian bencana di Kabupaten Sumba Tengah yang meliputi banjir, cuaca ekstrem serta kekeringan. Jenis Bencana yang paling sering terjadi dalam 24 tahun terakhir adalah Cuaca Ekstrem. Dari 28 kejadian bencana tersebut 1 korban meninggal, 2 korban terluka, 69.938 korban menderita serta 123 korban yang mengungsi. Dari sisi infrastruktur rumah, kejadian tersebut telah menyebabkan 113 rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang, serta 50 rumah rusak ringan. Dari sisi infrastruktur fasilitas publik, telah menyebabkan kerusakan pada 2 fasilitas peribadatan. Pada Tahun 2015 Kabupaten Sumba Tengah memiliki nilai indeks risiko bencana senilai 118,80 dengan kategori sedang, dan terus menurun hingga Tahun 2023 senilai 108,30 kemudian pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 111,45 dengan kategori yang sama yaitu sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrem/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstrem. Rincian perkembangan nilai indeks risiko bencana Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015-2024 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015-2024



Sumber: BNPB Tahun 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai proyeksi dari kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten Sumba Tengah cenderung berfluktuasi selama periode 2022-2024. Pada Tahun 2022, nilai IKD Kabupaten Sumba Tengah sebesar 0,38 dengan kategori rendah dan meningkat menjadi 0,40 di Tahun 2023 dan kemudian menurun menjadi 0,25 pada tahun 2024 atau berada pada kategori yang sama yaitu rendah. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019-2024

| No. | Kabupaten/Kota      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Sumba Tengah        | n.a. | n.a. | n.a. | 0,38 | 0,40 | 0,25 |
| 2.  | Nusa Tenggara Timur | 0,37 | n.a. | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,50 |

Sumber: BPBD Provinsi NTT, 2025

Wilayah rawan bencana dapat dianalisa dengan indeks resiko kebencanaan dominan mengacu pada data publikasi Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023 untuk Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Indeks Resiko Bencana

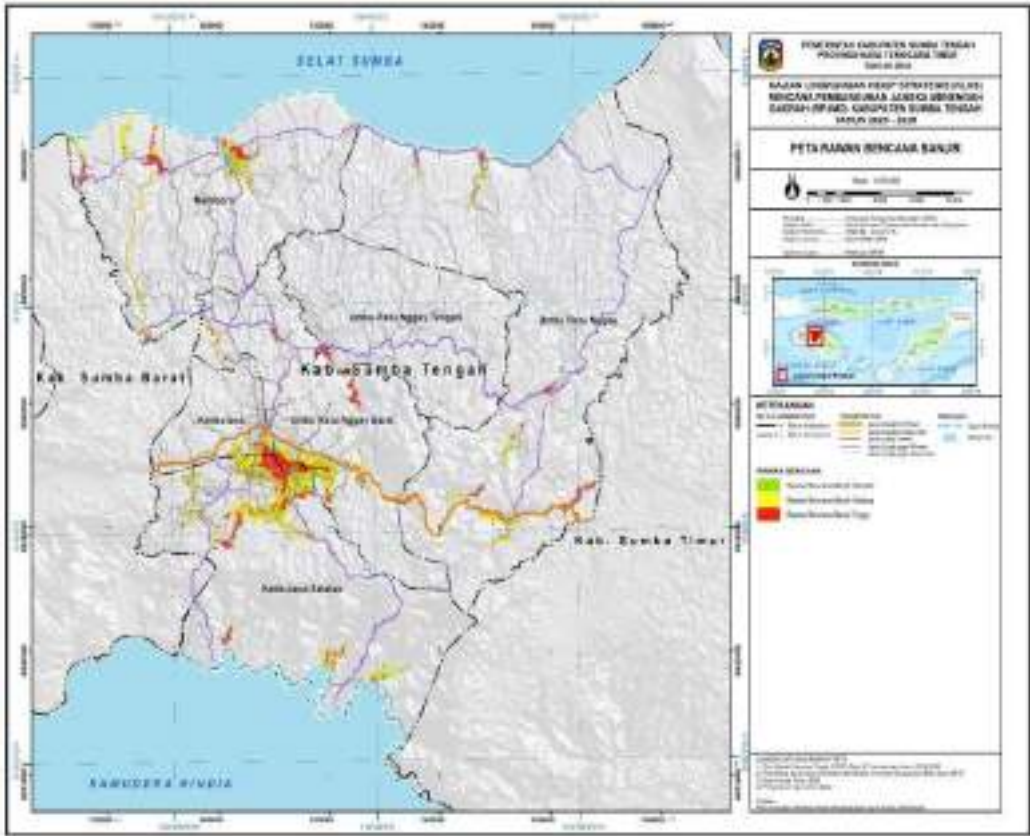
| Deksripsi Resiko      | Skor  | Kelas Resiko | Kecamatan                                        |
|-----------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|
| Banjir                | 6,14  | Sedang       | Mamboro                                          |
| Gempa Bumi            | 18,42 | Tinggi       | Katiku Tana Selatan                              |
| Tsunami               | 8,19  | Sedang       | Katiku Tana Selatan, Mamboro, Umbu Ratu Nggay    |
| Kebakaran Hutan/Lahan | 20,47 | Tinggi       | Umbu Ratu Nggay                                  |
| Longsor               | 10,23 | Sedang       | Umbu Ratu Nggay                                  |
| Gelombang Ekstrim     | 6,82  | Sedang       | Mamboro, Umbu Ratu Nggay                         |
| Kekeringan            | 13,65 | Tinggi       | Mamboro, Umbu Ratu Nggay                         |
| Cuaca Ekstrim         | 17,40 | Tinggi       | Katiku Tana Selatan, Mamboro dan Umbu Ratu Nggay |

Sumber Data : Dokumen IRBI Nasional Tahun 2023

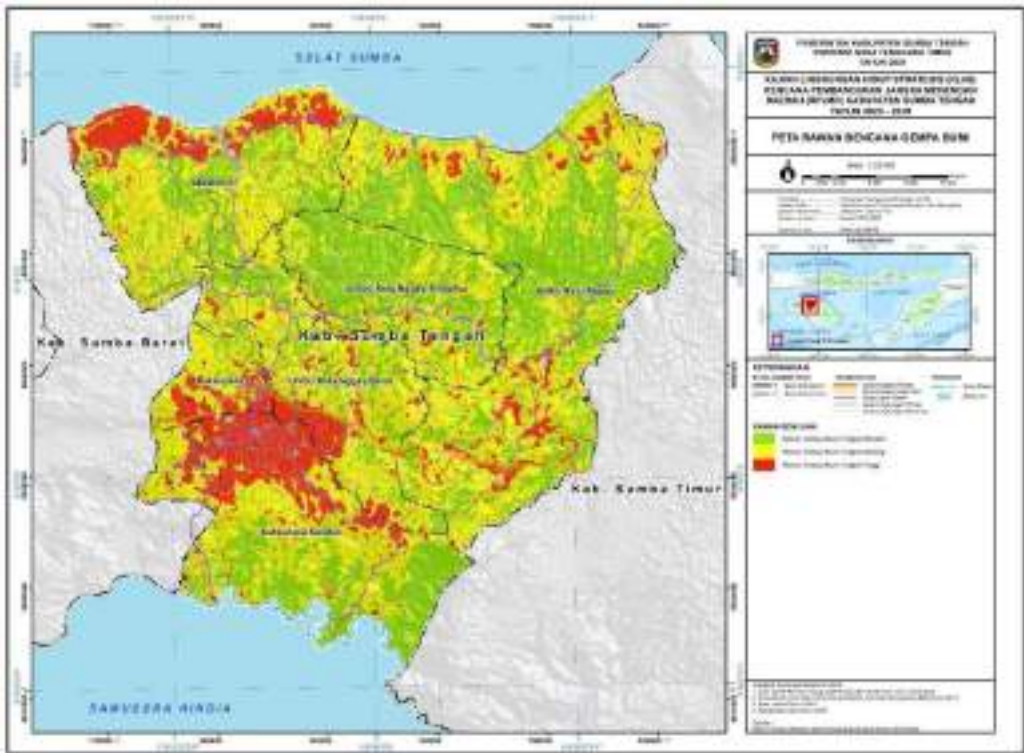


Berikut disajikan beberapa peta yang relevan dengan indeks ketahanan bencana Sumba Tengah.

Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Banjir



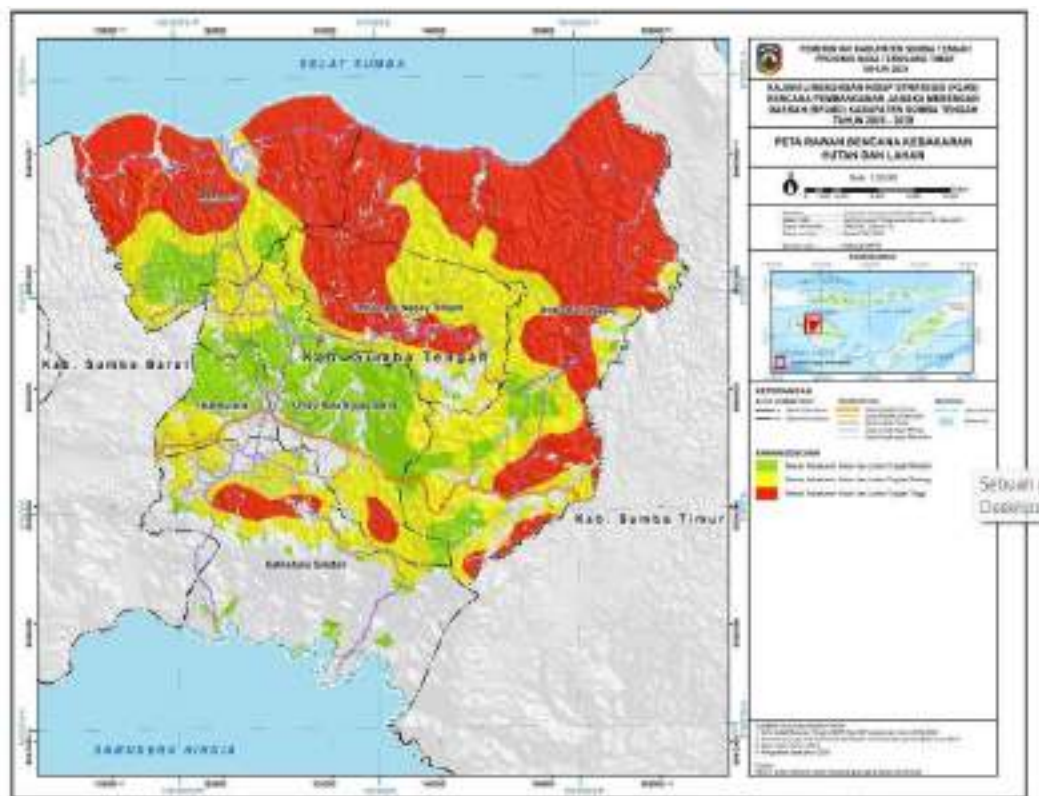
Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



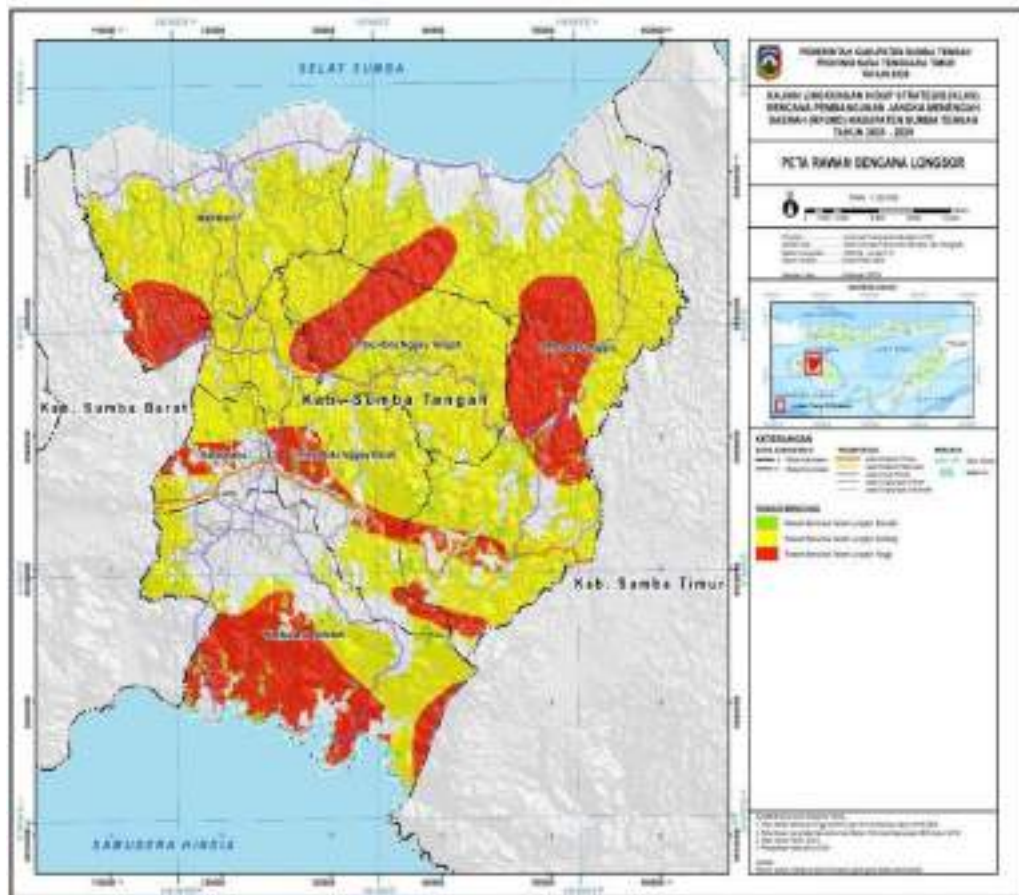




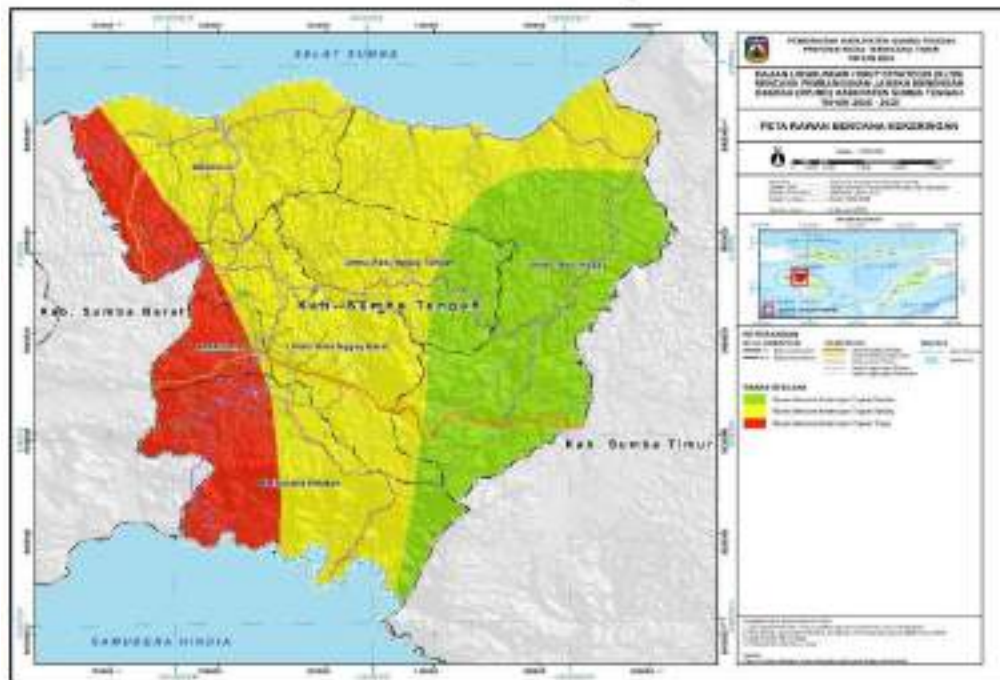
Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan/Lahan



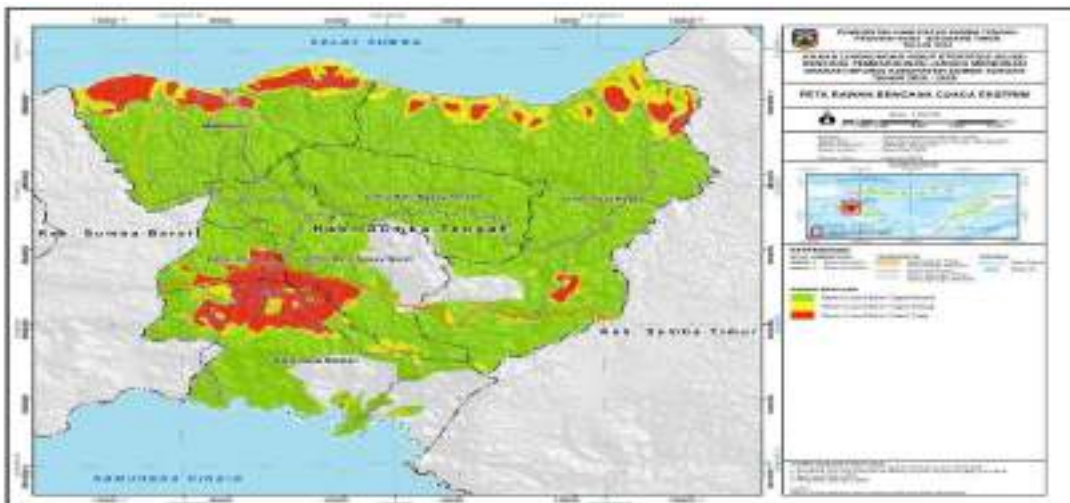
Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana Longsor



Gambar 2.12. Peta Rawan Bencana Kekeringan



Gambar 2.13. Peta Rawan Bencana Cuaca Ekstrim



Karakteristik klimatologi iklim Sumba Tengah dominan beriklim kering dengan 4 (empat) bulan musim hujan (November- Maret) dan 8 (delapan) bulan musim kemarau/kering (April-Oktober). Karakter iklim diatas serta tren pemanasan global dengan anomali iklim el nino dan la nina berpengaruh pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah





kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Peraturan iklim adalah jasa ekosistem yang mengatur proses yang berkaitan dengan komposisi kimia atmosfer, efek rumah kaca, lapisan ozon, curah hujan, kualitas udara, dan moderasi suhu dan pola cuaca (termasuk pembentukan awan), baik pada skala global maupun local. Dalam kaitannya dengan regulasi GRK pada skala global, hal ini dapat mencakup kemampuan ekosistem dalam mengeluarkan dan menyerap bahan kimia.

Tabel 2.11. Kerentanan Iklim Kabupaten Sumba Tengah

| No.                    | Kecamatan              | Kerentanan Iklim |        |              |           |            |
|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------------|-----------|------------|
|                        |                        | Cukup Rendah     | Rendah | Cukup Tinggi | Tinggi    | Total (Ha) |
| 1                      | Katikutana             | 1.883,81         | Na     | 1,37         | 4.962,06  | 6.847,25   |
| 2                      | Katikutana Selatan     | 15.461,13        | Na     | 4.418,72     | 14.883,05 | 34.762,90  |
| 3                      | Mamboro                | 24.591,29        | 724,13 | 3,42         | 6.476,51  | 31.795,35  |
| 4                      | Umbu Ratu Nggay        | 23.566,04        | Na     | 21.652,63    | 18.191,17 | 63.409,84  |
| 5                      | Umbu Ratu Nggay Barat  | 4.316,95         | Na     |              | 19.290,93 | 23.607,88  |
| 6                      | Umbu Ratu Nggay Tengah | 1.752,00         | Na     | 7.425,57     | 11.897,42 | 21.074,98  |
| Kabupaten Sumba Tengah |                        | 71.571,22        | 724,13 | 33.501,70    | 75.701,13 | 181.498,19 |

Sumber data : Dokumen KLHS RPJMD

2.1.1.7. Demografi

a. Keadaan jumlah penduduk

Keadaan jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tren pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 - 2024

| Tahun | Laki-Laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Total (jiwa) |
|-------|------------------|------------------|--------------|
| 2020  | 43.877           | 41.605           | 85.482       |
| 2021  | 45.433           | 43.172           | 88.605       |
| 2022  | 46.422           | 44.060           | 90.482       |
| 2023  | 46.420           | 44.101           | 90.521       |
| 2024  | 47.349           | 45.005           | 92.354       |

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Proyeksi pertumbuhan penduduk merupakan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan untuk menjawab tuntutan mendasar pada seluruh tahapan siklus kehidupan. Kaitannya dengan itu, maka proyeksi penduduk Sumba Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan tren pertumbuhan dan populasi sebagai berikut :

Tabel 2.13. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Tengah  
Tahun 2025 - 2029

| Tahun | Laki-Laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Total (jiwa) |
|-------|------------------|------------------|--------------|
| 2025  | 48.275           | 45.915           | 94.190       |
| 2026  | 49.210           | 46.830           | 96.040       |
| 2027  | 47.750           | 50.140           | 97.890       |
| 2028  | 51.080           | 48.670           | 99.750       |
| 2029  | 52.030           | 49.580           | 101.610      |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025





b. Tingkat Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.14. Tingkat kepadatan penduduk Sumba Tengah 2024

| No                           | Kecamatan              | Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                            | Katiku Tana            | 187,91                            |
| 2                            | Katiku Tana Selatan    | 43,23                             |
| 3                            | Umbu Ratu Nggay Barat  | 71,67                             |
| 4                            | Umbu Ratu Nggay        | 14,96                             |
| 5                            | Umbu Ratu Nggay Tengah | 43,64                             |
| 6                            | Mamboro                | 56,06                             |
| Rata-rata kepadatan penduduk |                        | 43,93                             |

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Tampilan tabel diatas kepadatan penduduk terdapat pada Kecamatan Katiku Tana dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat yang disebabkan oleh lokasi pusat pemerintahan, pendidikan dan aktivitas ekonomi.

c. Struktur kelompok umur penduduk

Tabel 2.15. Struktur kelompok umur penduduk

| Kelompok Umur Penduduk (Tahun) | Jumlah Penduduk Per Tahun (Jiwa) |        |        |        |        |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 2020                             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 0–4                            | 11631                            | 11818  | 12101  | 11842  | 11511  |
| 5–9                            | 9339                             | 9556   | 9823   | 9796   | 10334  |
| 10–14                          | 8715                             | 8932   | 9246   | 9031   | 9171   |
| 15–19                          | 7827                             | 7900   | 8059   | 8333   | 8529   |
| 20–24                          | 7574                             | 7619   | 7695   | 7643   | 7677   |
| 25–29                          | 6722                             | 6926   | 7163   | 7474   | 7687   |
| 30–34                          | 6333                             | 6549   | 6832   | 6660   | 6810   |
| 35–39                          | 5429                             | 5587   | 5791   | 5996   | 6201   |
| 40–44                          | 4886                             | 5038   | 5230   | 5143   | 5250   |
| 45–49                          | 4185                             | 4326   | 4505   | 4571   | 4689   |
| 50–54                          | 3338                             | 3464   | 3617   | 3776   | 3931   |
| 55–59                          | 2718                             | 2825   | 2958   | 2972   | 3076   |
| 60–64                          | 2196                             | 2290   | 2404   | 2382   | 2458   |
| 65–69                          | 1740                             | 1818   | 1915   | 1856   | 1907   |
| 70–74                          | 1363                             | 1424   | 1500   | 1393   | 1421   |
| 75+                            | 1486                             | 1558   | 1643   | 1653   | 1702   |
| Total                          | 85.482                           | 87.630 | 90.482 | 90.521 | 92.354 |

Sumber Data : (data diolah) Tahun 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah bagian penting yang mencakup tujuan, strategi, dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun. Secara umum aspek ini meliputi ekonomi masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, perumahan dan permukiman, perlindungan social, ketahanan pangan dan lingkungan. Aspek ini menjadi indicator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterahkan rakyatnya.



2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi  
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi sebagai pembanding nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai gambaran pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan peningkatan selama 2018-2023. Gambaran pertumbuhan PDRB dalam lima tahun mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian daerah terus berkembang. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan PDRB terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PDRB merupakan indikator utama untuk mengukur total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai dan Kontribusi Sektor Pengeluaran dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumba Tengah seperti tabel berikut.

Tabel 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor Pengeluaran dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumba Tengah

| Jenis Pengeluaran                 | Harga Konstan (Juta Rupiah) |         |         |         |         |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                                   | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 902,21                      | 885,81  | 916,89  | 966,25  | 1032,59 | 1.077,12 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPR         | 44,15                       | 43,28   | 45,83   | 50,36   | 55,73   | 62,13    |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 665,90                      | 611,14  | 598,92  | 590,98  | 601,29  | 647,39   |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 521,10                      | 498,05  | 533,93  | 566,52  | 620,69  | 642,95   |
| Perubahan Inventori               | 20,49                       | 22,36   | 23,22   | 23,29   | 23,00   | 24,84    |
| Net Ekspor Barang dan Jasa        | -977,21                     | 859,78  | 888,39  | -894,00 | 935,38  | 927,25   |
| PDRB                              | 1176,63                     | 1195,86 | 1230,40 | 1303,39 | 1397,92 | 1.527,18 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2019-2024, dan data proyeksi 2025-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi

| Uraian                   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | 0,86 % | 1,41 % | 2,58% | 2,85% | 3,71% |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel 2.18. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025 - 2030

| Uraian                   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,25 | 5,5  | 5,8  | 6,2  | 6,6  | 7,0  |

Data Olahan 2025



2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.19. PDRB Per Kapita Kabupaten Sumba Tengah

| Tahun | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) | Keterangan                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020  | 14,09                         | Terjadi fluktuatif karena terjadi Covid 19, Perubahan Geo Politik Global dan kemampuan fiskal daerah serta belum optimalnya komponen PAD dalam kebijakan fiskal daerah |
| 2021  | 14,04                         |                                                                                                                                                                        |
| 2022  | 14,40                         |                                                                                                                                                                        |
| 2023  | 15,44                         |                                                                                                                                                                        |
| 2024  | 16,54                         |                                                                                                                                                                        |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel 2.20. Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030

| Tahun | PDRB Per Kapita (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025  | 16,54                | Terjadi fluktuatif karena terjadi Covid 19, Perubahan Geo Politik Global dan kemampuan fiskal daerah serta belum optimalnya komponen PAD dalam kebijakan fiskal daerah |
| 2026  | 17,22                |                                                                                                                                                                        |
| 2027  | 17,92                |                                                                                                                                                                        |
| 2028  | 18,66                |                                                                                                                                                                        |
| 2029  | 19,41                |                                                                                                                                                                        |
| 2030  | 20,20                |                                                                                                                                                                        |

Data Olahan 2025

2.2.1.4 Inflasi

Inflasi suatu daerah menggambarkan ketahanan ekonomi dari stabilisasi harga dengan jaminan daya beli, ketersediaan, akses dan distribusi barang jasa di pasar.

Inflasi Sumba Tengah ditentukan perhitungan IHK acuan pasar Waingapu Sumba Timur yang berada dibawah rata-rata inflasi provinsi dan nasional selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.21. Inflasi Sumba Tengah 2020 – 2024

| Uraian  | Tahun |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
|         | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Inflasi | -     | 0,96 | 1,14 | 3,27 | 1,66 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik NTT Tahun 2021-2025

Tabel 2.22. Proyeksi Inflasi Sumba Tengah 2025 – 2030

| Uraian  | Tahun |      |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Inflasi | 2,12  | 2,5  | 2,00 | 1,9  | 1,7  | 1,5  |

Data Olahan 2025





2.2.1.5. Pemerataan Ekonomi (Indeks Gini)

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.23. Indeks Gini Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024

| Uraian          | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indeks Gini (%) | 0,327 | 0,328 | 0,298 | 0,330 | 0,334 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel 2.24. Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030

| Uraian          | Tahun |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Indeks Gini (%) | 0,375 | 0,369 | 0,363 | 0,357 | 0,351 | 0,345 |

Data Olahan 2025

Dengan data diatas menunjukan bahwa Kabupaten Sumba Tengah masuk dalam kategori ketimpangan sedang atau tingkat kesenjangan distribusi pendapatan sedang. Ini mencerminkan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat belum merata. Beberapa factor yang secara umum mempengaruhi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan sedang antara lain : kesenjangan akses terhadap lapangan kerja dan usaha, ketimpangan wilayah, kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

2.2.1.6 Nilai Tukar Petani

Pengembangan bidang pertanian sebagai sektor unggulan dan andalan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sumba Tengah. Dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada sektor pertanian hulu hilir akan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan kemampuan petani secara berkelanjutan meningkatkan budidaya dengan para meter nilai tukar petani sebagai berikut:

Tabel 2.25. Nilai Tukar Petani 2019 - 2024

| Indikator          | Tahun |      |      |      |      |        |
|--------------------|-------|------|------|------|------|--------|
|                    | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
| Nilai tukar petani | 97    | 99   | 101  | 102  | 105  | 100,96 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel 2.26. Proyeksi Nilai Tukar Petani 2025 – 2030

| Indikator          | Tahun  |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Nilai tukar petani | 101,45 | 101,94 | 102,43 | 102,92 | 103,41 | 103,91 |

Data olahan 2025



2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sumba Tengah mengalami penurunan menjadi 1,45% Tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 1,21 %; kondisi membaik dari tahun 2020 yang mencapai 4,02%. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk akan mempengaruhi daya saing di pasar kerja. Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, seperti program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.

Tabel 2.27. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumba Tengah 2020 - 2024

| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | TAHUN |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                  | 4,02  | 1,45 | 1,21 | 1,89 | 1,89 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel. 2.28. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Sumba Tengah 2025 – 2030

| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | TAHUN |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                  | 1,84  | 1,75 | 1,70 | 1,67 | 1,65 | 1,60 |

Data Olahan 2025.

2.2.1.8. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan; hal ini didukung dengan beberapa faktor antara lain: Intervensi program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; verifikasi dan validasi data kemiskinan yang semakin akurat; fokus penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh intervensi nonbaudgetter pemangku pembangunan NGO, BUMN/BUMD dan lembaga swasta lainnya. Jumlah penduduk miskin yang menurun tiap tahunnya mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kebijakan public yang konsisten, pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dan dukungan sosial pemerintah terhadap masyarakat yang kuat.

Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2020  | 25.370                        | 34,49                          |
| 2021  | 25.480                        | 34,27                          |
| 2022  | 24.490                        | 32,51                          |
| 2023  | 24.240                        | 31,78                          |
| 2024  | 23.810                        | 30.84                          |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025



Tabel. 2,30. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2030

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2025  | 23,434                        | 29,90                          |
| 2026  | 23,063                        | 28,96                          |
| 2027  | 22,697                        | 28,02                          |
| 2028  | 22,337                        | 27,08                          |
| 2029  | 21,983                        | 26,14                          |
| 2030  | 21,634                        | 25,20                          |

Data Olahan 2025

2.2.1.9. Ketahanan Pangan / Food Security

Mata Pencaharian dan Perubahan Iklim Merujuk pada laporan analisis indeks komposit ketahanan pangan pada FSVA Tahun 2023 sebanyak 24,62% desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Tengah masuk kategori sangat rentan, rentan dan agak rentan, dengan rincian sebanyak 1 desa/kalurahan dengan kategori sangat rentan, 5 desa/kelurahan dengan kategori Rentan, dan 10 desa/ kelurahan dengan kategori agak rentan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sumba Tengah dengan kategori Sangat Rentan, Rentan dan Agak Rentan berdasarkan Indeks Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022.

Gambar 2.14. Indeks Komposit Ketahanan Pangan

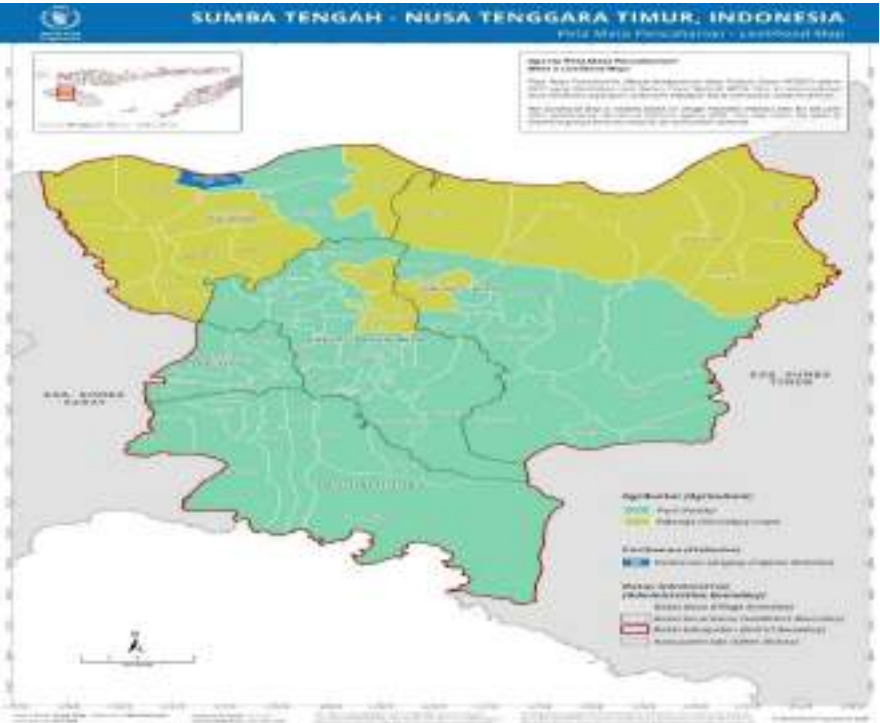


Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan mata pencaharian yang responsif terhadap perubahan iklim, dapat digambarkan bahwa Kabupaten Sumba Tengah memiliki keragaman mata pencaharian yang tergolong sedikit, dari keseluruhan mata pencaharian yang berjumlah 22 mata pencaharian, 3 diantaranya dijalankan oleh penduduk di Kabupaten Sumba Tengah. Padi dan Palawija merupakan mata pencaharian yang paling dominan. Rincian selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 2.15. Peta Mata Pencanharian Penduduk Sumba Tengah



Sumber: WFP Indonesia, 2024

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan mata pencaharian yang responsif terhadap perubahan iklim, Kabupaten Sumba Tengah memiliki 3 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Tinggi (*High Sensitivity*) yang meliputi (1) Sawah, (2) Palawija, dan (14) Perikanan Tangkap. Sedangkan apabila dilihat dari tingkat resiliensi mata pencaharian penduduk, Kabupaten Tengah memiliki 3 Mata Pencaharian dengan kategori Resiliensi Menengah (*Moderate Sensitivity*) yang meliputi (1) Sawah, (2) Palawija, (3) Hortikultura dan (14) Perikanan Tangkap. Rincian dan sebaran tingkat sensitivitas dan resiliensi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tengah selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Tingkat Sensitivitas dan Resiliensi Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

Gambar 2.16. Tingkat Sensitivitas Mata Pencanharian Penduduk Sumba Tengah



Gambar 2.17. Resiliensi Mata Pencarian Penduduk Sumba Tengah



Sumber: WFP Indonesia, 2024

### 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua (*Health For All*) adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kesehatan yang baik, dan bahwa kesehatan merupakan fondasi untuk mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa sistem kesehatan harus menjangkau semua orang, tidak peduli latar belakang sosial- ekonomi, geografis, atau kelompok lain, dan memastikan mereka memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Kesehatan untuk semua tidak hanya fokus pada ketiadaan penyakit, tetapi juga pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Konsep ini juga menekankan pentingnya pendekatan perawatan kesehatan primer yang efektif dan efisien untuk membawa layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting yang terkait dengan kesehatan untuk semua;

- **Hak yang Sama:** Setiap individu berhak atas kesehatan yang baik, tanpa diskriminasi.
- **Kesehatan sebagai Kesejahteraan:** Kesehatan tidak hanya tentang tidak sakit, tetapi juga tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial.
- **Akses yang Merata:** Sistem kesehatan harus dapat dijangkau oleh semua orang, di mana pun mereka berada.



- **Pendekatan Primer:** Perawatan kesehatan primer (pencegahan, promosi, dan pelayanan dasar) merupakan fondasi sistem kesehatan yang efektif dan efisien.
- **Kehidupan Produktif:** Kesehatan memungkinkan individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- **Pembangunan yang Berkelanjutan:** Kesehatan yang baik adalah dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- Definisi sehat menurut “*World Health*”

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Semakin tinggi AHH memberikan indikasi bahwa semakin baik kualitas fisik penduduk suatu daerah. Pada tahun 2018, AHH Kabupaten Sumba Tengah mencapai 68,32 tahun dan pada tahun 2023 nilainya meningkat menjadi 69,46 tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka capaian AHH Kabupaten Sumba Tengah termasuk tinggi. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumba Tengah semakin tinggi mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan layanan dasar semakin membaik diantaranya layanan Kesehatan yang semakin membaik, kesadaran masyarakat akan hidup sehat semakin tinggi, Pendidikan yang semakin membaik, dan perbaikan ekonomi serta lingkungan masyarakat yang semakin baik.

Tabel 2.31. Usia Harapan Hidup kabupaten Sumba Tengah

| Uraian                           | Tahun |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Angka/Umur Harapan Hidup (Tahun) | 68,32 | 68,38 | 68,42 | 67.73 | 69.21 | 69.46 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan keluarga melalui 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. IKS membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kesehatan keluarga di berbagai tingkat, mulai dari keluarga hingga nasional. Pembobotan IKS antara 0 sampai 1; Keluarga sehat memiliki nilai IKS > 0,8, Keluarga prasehat memiliki nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga tidak sehat memiliki nilai IKS < 0,5. Indeks Keluarga Sehat sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program KB;
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat ASI eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar;





- 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dantidak ditelantarkan;
- 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
- 11. Keluarga memiliki akses air bersih;
- 12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat.

2.2.2.3. Prevalensi Stunting

Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan cakupan balita ditimbang 100%. Selama periode Agustus 2023 - Agustus 2024. Tren jumlah balita *stunting* di Kabupaten Sumba Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32. Tren Balita Stunting Kabupaten Sumba Tengah

| Tahun | Total Balita pendek + Sangat pendek | Jumlah Balita Yang diukur panjang/tinggi badan (cm) | Persentase (%) |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2020  | 1.109                               | 7.428                                               | 14,4           |
| 2021  | 690                                 | 7.383                                               | 9,3            |
| 2022  | 659                                 | 7.662                                               | 8,7            |
| 2023  | 549                                 | 7,563                                               | 7,3            |
| 2024  | 925                                 | 6.196                                               | 14,9           |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel. 2.33. Proyeksi Prevalensi Stunting Tahun 2025 – 2030 (Menurut SKI)

| Uraian                            | Tahun |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Persentase balita <i>stunting</i> | 35,00 | 33,70 | 32,50 | 31,10 | 30,00 | 29,00 |

Data olahan 2025

Dilihat dari tabel di atas, terjadi peningkatan jumlah balita stunting dari tahun 2023 – 2024 yang secara signifikan. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan metode pengukuran dari SSGI ke e-PPBGM.

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Tingkat kematian ibu hamil di Sumba Tengah selama lima tahun terakhir dapat dicermati trend melahirkan hidup dan kematian bayi pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Angka Kematian Ibu dan bayi Sumba Tengah 2020 - 2024

| Tahun | Data Cakupan Akses Ibu Hamil yang dapat pelayanan Kesehatan (KI) (jiwa) | DataLahir Hidup (Jiwa) | Data Kematian Ibu (Jiwa) | Data Kematian Bayi (Jiwa) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2020  | 1912                                                                    | 1448                   | 2                        | 29                        |
| 2021  | 1708                                                                    | 1718                   | 3                        | 28                        |
| 2022  | 1243                                                                    | 1107                   | 1                        | 28                        |
| 2023  | 1431                                                                    | 1240                   | 1                        | 23                        |
| 2024  | 1377                                                                    | 1281                   | 3                        | 24                        |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Terjadi fluktuasi angka kematian ibu dan bayi bahkan terjadi peningkatan di satu tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena akses layanan kesehatan yang belum memadai di wilayah – wilayah tertentu.



2.2.2.5. Insiden Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)

Trend penyakit TB Paru Kabupaten Sumba Tengah dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Tren Penyakit TB Paru Sumba Tengah 2020 – 2024

| Tahun | Jumlah Kasus TB<br>(Orang) | Jumlah Terduga<br>(Orang) |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 2020  | 163                        | 1391                      |
| 2021  | 111                        | 1576                      |
| 2022  | 131                        | 1611                      |
| 2023  | 126                        | 1197                      |
| 2024  | 158                        | 1923                      |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

2.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Masyarakat Sumba Tengah telah terdaftar dan menggunakan jaminan kesehatan sebagai metode pembayaran kesehatan sebanyak 100 persen pasien menggunakan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran untuk berobat (*Universal Health Care*) UHC 100.

2.2.2.7. Ketersediaan Dokter Tenaga Medis

Tabel 2.36. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

| Kabupaten           | Tenaga Kesehatan - Perawat |        |         |        |         |       |              |                  |                    |                  |                  |
|---------------------|----------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                     | Perawat                    | Bidan  | farmasi | KesMas | Kesling | Gizi  | Tenaga Medis | Psikologi Klinis | Keterampilan Fisik | Keteknisan Medis | Teknik Biomedika |
| Sumba Tengah        | 451                        | 204    | 41      | 31     | 27      | 40    | 33           | 2                | 1                  | 18               | 20               |
| Nusa Tenggara Timur | 16.046                     | 12.382 | 1.967   | 1.334  | 1.199   | 1.638 | 2.501        | 6                | 150                | 629              | 978              |
| % Deviasi           | 2,81                       | 1,65   | 2,08    | 2,32   | 2,25    | 2,44  | 1,32         | 33,33            | 0,67               | 2,86             | 2,04             |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik NTT Tahun 2025

2.2.2.8. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.37. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

| No | Deskripsi                           | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Rumah Sakit Umum Daerah             | 1      |
| 2. | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat      | 10     |
| 3. | Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu | 6      |
| 4. | Pondok Persalinan Desa              | 29     |
| 5. | Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan     | 204    |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025



2.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

2.2.3.1. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, namun jumlah tahun sekolah tidak termasuk kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Perhitungan angka RLS dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelaster tinggi yang pernah ditempuh seseorang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih lebih rendah dari capaian HLS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.38. Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024

| Uraian                         | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 6,25  | 6,47 | 6.73 | 7.00 | 7,2  |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

Tabel 2.39. Proyeksi Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah  
2025 - 2029

| Uraian                         | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,76  | 8,09 | 8,42 | 8,75 | 9,08 |

Data olahan 2025

Tabel 2.40. Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi NTT 2020 - 2024

| Uraian                         | Tahun |       |      |      |       |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|-------|
|                                | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024  |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,63  | 7,69  | 7,7  | 7,82 | 8,02  |
| Indeks Pembangunan Manusia(%)  | 65,19 | 65,28 | 65,9 | 68,4 | 69,14 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, namun jumlah tahun sekolah tidak termasuk kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Perhitungan angka RLS dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelaster tinggi yang pernah ditempuh seseorang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih lebih rendah dari capaian HLS Provinsi Nusa Tenggara Timur.





Tabel 2.41. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2020 - 2024

| Uraian                       | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,96 | 13,04 | 13,12 | 13,13 | 13,14 |

Sumber Data; Dinas PPO Tahun 2025

Tabel 2.41. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Tengah 2025 - 2029

| Uraian                       | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13,30 | 13,40 | 13,50 | 13,60 | 13,70 |

Data Olahan 2025

2.2.3.3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah digambarkan dalam indicator Angka Partipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni. APK diartikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APM adalah proporsi anak sekolah pada suatukelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Sepanjang tahun 2021-2024 secara umum capaian persentase capaian APK Sumba Tengah untuk SD dan SMP telah di atas 95%, sedangkan untuk SMA masih di bawah 95%. Untuk APM SD telah persentasinya mengalami penurunan sebesar 99,29% untuk jenjang pendidikan SD, sedangkan SMP secara umum 84,3% dan SMA 61,82%. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sumba Tengah periode 2021 – 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Pertisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumba Tengah

| Jenjang Pendidikan | Tahun                         |       |       |       |                              |        |        |        |
|--------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|
|                    | Angka Partisipasi Murni (APM) |       |       |       | AngkaPartisipasi Kasar (APK) |        |        |        |
|                    | 2021                          | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   |
| SD/MI              | 99,42                         | 96,86 | 99,40 | 99,29 | 108,79                       | 111,92 | 111,55 | 112,95 |
| SMP/MTs            | 75,42                         | 75,86 | 80,69 | 84,3  | 97,71                        | 85,38  | 87,02  | 99,23  |
| SMA                | 44.33                         | 44,88 | 55,63 | 61,82 | 84,36                        | 84,27  | 79,27  | 91,22  |

Sumber data : Sumba Tengah Dalam Angka 2025

2.2.3.4. Angka Literasi / Numerasi

Kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan Kabupaten Sumba Tengah digambarkan dalam indikator cakupan pembinaan perpustakaan, jumlah koleksi buku yang tersedia dan cakupan literasi. Indeks Pembangunan literasi SumbaTengah dapat disajikan data capaian pembanding kabupaten se Sumba dan Provinsi sebagai berikut :



Gambar 2.18. Indeks Pembangunan Literasi



Sedangkan pembinaan perpustakaan sekolah dilakukan pada 80 perpustakaan dengan kemampuan literasi siswa rata-rata 70% dari *sampling data survey* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pencermatan data diatas perlu pembenahan sehingga dengan dukungan fasilitas perpustakaan yang dibangun pada tahun 2023 dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi Sumba Tengah.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kinerja perlindungan sosial di Kabupaten Sumba Tengah digambarkan dalam beberapa indikator meliputi cakupan sarana sosial, cakupan penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial dan cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial serta cakupan asuransi jasa tenaga kerja pekerja rentan. Gambaran sarana sosial dan cakupan penyandang cacat dan lanjut usia yang menerima jaminan sosial serta cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Sumba Tengah 2021- 2023 diajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.43. Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial  
Kabupaten Sumba Tengah 2021- 2024

| No | Penerima                                               | Tahun |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| A  | Jumlah Lansia                                          | 4.300 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
|    | Jumlah Lansia Yang Mendapat bantuan                    | 80    | 55    | 35    | 25    |
|    | Persentase                                             | 1,86  | 4,49  | 3,5   | 2,03  |
| B  | Jumlah Penyandang Disabilitas                          |       |       |       |       |
|    |                                                        | NA    | 1.365 | 1.365 | 397   |
|    | Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan | NA    | 45    | 45    | 45    |
|    | Persentase                                             | NA    | 3,30  | 3,30  | 3,30  |
| C  | Jumlah Anak-anak                                       | 232   | 226   | 250   | 255   |
| D  | Jumlah Naker Rentas Kepesertaan BPJS NAKER             | -     | -     | -     | 200   |

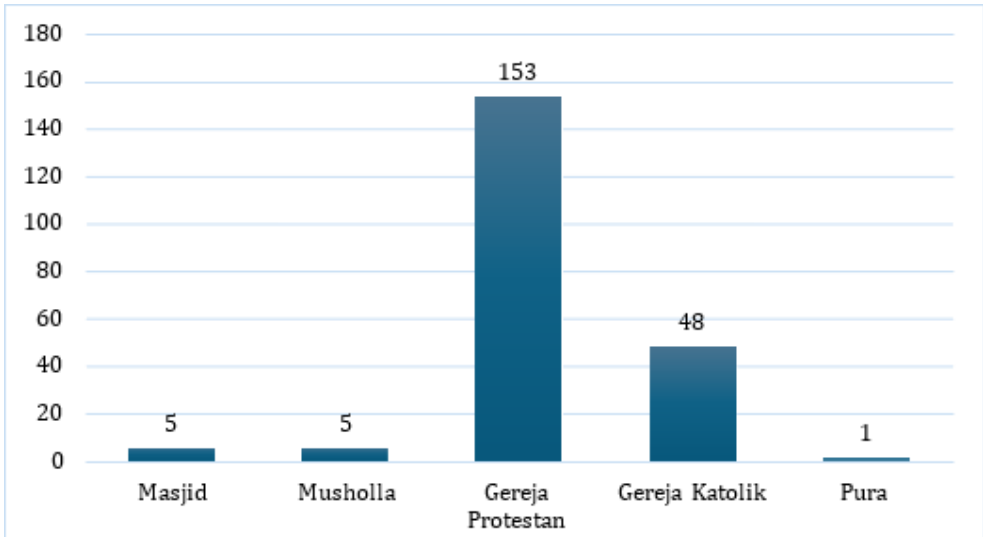
Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025



2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju” adalah konsep yang menekankan pada praktik beragama yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara, serta yang selaras dengan kemajuan peradaban dan nilai-nilai kebudayaan positif. Konsep ini menekankan pentingnya beragama yang tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Gambar 2.19. Jumlah Rumah Ibadah Kab. Sumba Tengah



Pembangunan kebudayaan dengan modal kebudayaan lokal daerah merupakan modal pembangunan yang secara dini disadari sehingga Kabupaten Sumba Tengah sudah menghasilkan dokumen Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dalam perumusan kebijakan pembangunan yang utuh dan menyeluruh.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

| Cakupan                | Satuan | IPM    | IPM Laki-laki | IPM Perempuan | IPG    | IDG    | IKG   |
|------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| KABUPATEN SUMBA TENGAH | Indeks | 63,480 | 67,410        | 61,170        | 90,740 | 54,160 | 0,775 |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025





2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan parameter pembangunan daerah yang dapat dicermati dari potensi kapasitas sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, fasilitas infrastruktur kewilayahan, iklim investasi, , penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru dan integrasi ekonomi domestik global. Dengan demikian daya saing daerah diukur dengan tujuan:

- Mengukur pencapaian aktivitas di daerah dalam memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan;
- Pendorong stakeholder pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar terpacu mewujudkan ide kreatif penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan berkelanjutan;
- Upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing lokal, regional dan nasional;
- Dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- Alat dalam proses harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pada level daerah dan nasional.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

*Human depelovment indeks* /Indeks Pembangunan Manusia Sumba Tengah sebagai indikator makro pembangunan dapat dilihat dari beberapa variabel indikator penentu sebagai sebagai berikut:

Tabel 2.44. Daya Saing SDM

| Uraian                               | Tahun |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Angka/Umur Harapan Hidup (Tahun)     | 68,32 | 68,38 | 68,42 | 67.73 | 69.21 | 69.46 |
| Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)   | 12,66 | 12,96 | 13,04 | 13.12 | 13.13 | 13.14 |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)       | 5,96  | 6,25  | 6,47  | 6.73  | 7.00  | 7,3   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)     | 3,43  | 4,02  | 1,45  | 1.21  | 1.89  | 1.89  |
| Pengeluaran Riil PerKapita (Ribu Rp) | 6.198 | 6.108 | 6.061 | 6.288 | 6.484 |       |
| Indeks Pembangunan Manusia(%)        | 61,01 | 61,53 | 61,80 | 62.84 | 63.63 | 64.46 |

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

2.3.2. Daya Saing Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Riset dan Inovasi berpengaruh pada daya saing daerah dalam tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Formulasi kebijakan berbasis riset, kajian akan optimal dalam tataran implementatif untuk melahirkan budaya kerja inovasi daerah. Dengan indeks inovasi daerah Sumba Tengah masuk kategori daerah belum inovatif dan jika disandingkan dengan pengukuran Badan Riset Inovasi Nasional terhadap 12 Pilar Indeks, maka datanya sebagai berikut :



Gambar 2.20. Indeks Inovasi Daerah



Dimensi Lingkungan Penunjang dengan 4 pilar Institusi tidak bernilai, pilar infrastruktur 1.94, pilar adopsi TIK 1.99, dan pilar stabilitas ekonomi 1.89, Dimensi Sumber Daya Manusia dengan 4 pilar yaitu kesehatan 3.69, pilar keterampilan 2.52, Dimensi Pasar dengan pilar pasar produk 3.43, pilar pasar tenaga kerja 2. 73, pilar sistem keuangan 1,64, pilar ukuran pasar 5.00 dan pilar dinamisme bisnis 5.00, serta Dimensi Ekosistem Inovasi dengan pilar kapasitas inovasi 0.92. Data kajian ini menggambarkan bahwa bobot besar pada pilar 10 dan 11 dalam arti bahwa masyarakat Sumba Tengah menjadi pangsa pasar dalam dinamisme bisnis serta perdagangan dan masih lemah pada produksi barang untuk pangsa pasar keluar, demikian halnya juga beberapa pilar diatas perlu dibenahi dalam tatakelola pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan produktivitas ekonomi berdasarkan data diatas Kabupaten Sumba Tengah harus optimal untuk meningkat nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi produk untuk daya saing dan nilai tambah ekonomi. Sehingga dengan demikian sektor tersier dan sekunder akan menjadi lokomotif ekonmi Sumba Tengah hingga periode akhir perencanaan pada tahun 2030.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Sumba Tengah didukung oleh berbagai kebijakan nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam tersedia dan peluang pengembangannya, Dukungan potensi itu dibenahi dengan berbagai regulasi daerah yang memudahkan formulasi kebijakan dan arah pembangunannya berdasarkan pola ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah Sumba Tengah. Untuk pembangunan ekonomi hijau diarahkan pada pembangunan pertanian yang berbasis teknologi subsistem hulu hingga subsistem hilirisasi pada kawasan pengembangan pertanian terintegrasi pariwisata selatan Sumba Tengah. Sedangkan untuk mendukung implementasi ekonomi biru pada optimalisasi potensi ekonomi

pesisir dan kelautan dengan dukungan potensi energi baru terbarukan dan *carbon storage*. Secara spasial telah dilaksanakan detail tata ruang untuk optimalnya implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru Sumba Tengah dengan penguatan tata kelola energi hingga di tingkat desa sehingga dapat mewujudkan transisi energi berkeadilan.

#### **2.3.4. Transformasi Digital**

Kemajuan digitalisasi pelayanan publik merupakan tuntutan dalam menjawab tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persalan infrastruktur penunjang akan berpengaruh terhadap percepatan implementasinya. Dalam transformasi pelayanan untuk tata tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik sudah diimplementasikan walaupun belum optimal. Transformasi digital yang dilaksanakan pada aspek pemerintahan untuk mendukung layanan publik baik dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, perijinan hingga pada pelaporan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan transformasi digital ekonomi disesuaikan oleh pelaku usaha untuk efisiensi dan efektivitas dan kemudahan usaha.

#### **2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Eksisting ekonomi Sumba Tengah didominasi sektor pertanian sebagai andalan untuk mencukupi kebutuhan domestik. Dengan kebijakan swasembada pangan nasional Asta Cita dan sinergi arah kebijakan Dasa Cita dapat diintegrasikan dengan prioritas pengembangan ketahanan pangan Sumba Tengah utamanya pada subsektor peternakan dan perkebunan sebagai komoditi ekonomiyang dapat masuk pasar regional, nasional dan bahkan global. Dengan kebijakan arah pengembangan pariwisata Bali Nusra, maka Sumba Tengah dapat berpeluang menjadi penyangga sebagai lompatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

#### **2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Pemetaan desa dan kota dengan dinamika pembangunan merupakan strategi berkelanjutan pusat pertumbuhan ekonomi. Dukungan kebijakan prioritas Bantuan Makan Gratis Bergizi dapat dijadikan momentum desa bangkit membangun, dari sawah, kebun, ladang, padang dan laut hingga ke pasar untuk peningkatan kesejahteraan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi.

Gambaran tingkat perkembangan desa dengan ukuran indeks desa membangun di Sumba Tengah merupakan tantangan dan peluang dengan mengoptimalkan BUMDes dalam keterpaduan pembentukan Koperasi Merah Putih pada seluruh desa.

##### **Indeks Desa Membangun**

Desa Kategori Maju 2

Desa Kategori Berkembang 25

Desa Kategori Tertinggal 48





Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah strategis dalam menunjang dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur merupakan indikator daya saing yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan fasilitas publik memberikan akselerasi terhadap pemberdayaan manusia di daerah terpencil dan terpinggir. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya saing dan juga menarik minat investor untuk berinvestasi atau menanamkan modal.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Perubahan kebijakan fiskal nasional pada tahun 2025 akan berdampak pada daerah-daerah kemampuan fiskal rendah dan menengah yang hampir 96 % tergantung pada transfer pemerintah pusat. Perubahan kebijakan dimaksud akan berpengaruh pada makro ekonomi daerah khususnya pada investasi belanja publik layanan pemerintahan. Perubahan kebijakan fiskal nasional merupakan tantangan dan pada saat yang sama merupakan momentum untuk merumuskan fondasi pembangunan daerah yang mengandalkan potensi daerah dengan menciptakan iklim investasi untuk :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tren pertumbuhan ekonomi Sumba Tengah hingga tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.45. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2024

| Uraian                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | 0,86% | 1,41% | 2,58% | 2,85% | 3,71% |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

b. Membuka Peluang atau Kesempatan Lapangan Kerja

Dengan dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB berdampak pada tingkat pengangguran terbuka, maupun terselebung yang terkonformasi dengan indeks tingkat pengangguran terbuka Sumba Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.46. Tingkat Pengangguran Terbuka 2020 - 2024

| Tahun | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|-------|----------------------------------|
| 2020  | 4,02                             |
| 2021  | 1,45                             |
| 2022  | 1,21                             |
| 2023  | 1,89                             |
| 2024  | 1,89                             |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025



c. Berkurangnya Angka Kemiskinan

Stabilisasi makro ekonomi daerah berdampak pada penurunan angka kemiskinan dengan perumusan kebijakan program yang terintegrasi dan sinergi untuk pemberdayaan sehingga kemiskinan tidak menjadi beban dalam pembangunan berkelanjutan. Data kemiskinan Sumba Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.47. Angka Kemiskinan Kab. Sumba Tengah 2020 - 2024

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2020  | 25.370                        | 34,49                          |
| 2021  | 25.480                        | 34,27                          |
| 2022  | 24.490                        | 32,51                          |
| 2023  | 24.240                        | 31,78                          |
| 2024  | 23.810                        | 30.84                          |

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Sumba Barat Tahun 2025

d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pendapatan asli daerah terhadap total APBD setiap tahun masih jauh dari proporsionalitas dan rasional perimbangan antara transfer keuangan pemerintah pusat dengan substansi otonomi daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah. Sejalan dengan itu Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai arah kebijakan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Gambaran Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.48. Pendapatan Asli Daerah 2023 - 2024

| URAIAN                                            | TAHUN           |                 |       |                   |                  | %      |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|------------------|--------|
|                                                   | 2023 (Rp)       | Realisasi 2023  | %     | 2024 (Rp)         | Realisasi 2024   |        |
| PENDAPATAN DAERAH                                 |                 |                 |       |                   |                  |        |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 29.281.516.531  | 26.200.953.048  | 89,48 | 28.240.524.743    | 24.236.695.519   | 85,82  |
| Pajak Daerah                                      | 6.531.112.750,  | 5.893.172.206,  | 90,23 | 8.746.702.792,    | 7.603.884.892,61 | 86,93  |
| Retribusi Daerah                                  | 4.114.422.000,  | 2.146.431.750   | 52,17 | 3.231.100.000,    | 2.314.742.567,46 | 71,64  |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.476.891.405,  | 5.476.891.405   | 100,  | 2.759.129.716,    | 2.759.129.716,00 | 100,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 13.159.090.376, | 12.684.457.687  | 96,39 | 13.503.592.235,00 | 11.558.938.343,  | 85,60  |
| PENDAPATAN TRANSFER                               | 641.775.987.739 | 636.647.367.817 | 99,20 | 639.188.113.307   | 629.340.026.908  | 98,46  |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sumba Tengah

Data tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan asli daerah hanya sebesar 4 % jika dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 96 %. Dengan data diatas perlu upaya pembenahan rasio, basis pajak yang disertai diversifikasi obyek pajak pendapatan asli daerah untuk membiayai program prioritas disamping peruntukan yang selama ini pada hak protokoler keuangan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Bertumbuhnya Sektor Jasa

Dengan dominannya sektor primer sebagai lokomotif ekonomi daerah dan belum terbukanya peluang sektor sekunder dan tersier memberikan gambaran bahwa daya saing dan nilai tambah belum optimal.



f. Meningkatnya PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita Kabupaten Sumba Tengah mengalami trend peningkatan sejalan dengan dukungan kebijakan ekonomi makro, walaupun masih berada dibawah rata-rata provinsi dan nasional.

Tabel 2.49. PDRB Per Kapita 2020 - 2024

| Tahun | PDRB PerKapita (Rp) |
|-------|---------------------|
| 2020  | 14.097.952          |
| 2021  | 14.040.836          |
| 2022  | 14.404.990          |
| 2023  | 15.443.000          |
| 2024  | 16.536.000          |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

g. Meningkatnya Belanja Konsusmsi

Pengeluaran belanja Sumba Tengah dengan jenis pengeluarannya sebagai berikut.

Tabel 2.50. Belanja Konsumsi

| Jenis Pengeluaran                 | Harga Konstan (Juta Rupiah) |         |         |         |         |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                                   | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 902,21                      | 885,81  | 916,89  | 966,25  | 1032,59 | 1.077,12 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 44,15                       |         | 45,83   | 50,36   | 55,73   | 62.13    |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 665,90                      | 611,14  | 598,92  | 590,98  | 601,29  | 647.39   |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 521,10                      | 498,05  | 533,93  | 566,52  | 620,69  | 642.95   |
| Perubahan Inventori               | 20,49                       | 22,36   | 23,22   | 23,29   | 23,00   | 24.84    |
| Net Ekspor Barang dan Jasa        | -977,21                     | 859,78  | -888,39 | -894,00 | -935,38 | -927.25  |
| PDRB                              | 1176,63                     | 1195,86 | 1230,40 | 1303,39 | 1397,92 | 1.527,18 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan juga segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

2.4.1. Standar Pelayanan Minimal

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Tujuannya antara lain; 1) Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar secara adil, 2) Mendorong pemerataan dan keadilan pelayanan publik di seluruh daerah, 3) Menjadi tolok ukur minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.





#### **2.4.2. Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024.**

Penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024 sebagai berikut :



## 1. Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga)

### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah :

1. Pendidikan anak usia dini (peserta didik yang berusia 5-6 tahun);
2. Pendidikan dasar (peserta didik yang berusia 7-15 tahun); dan
3. Pendidikan kesetaraan (peserta didik yang berusia 7-18 tahun).

**Tabel 2.51. Pencapaian dan Target Standar Pelayanan Minimal**

| No | Jenis Pelayanan Dasar    | Indikator                                                                                       | Realisasi 2020 – 2024 (%) |       |      |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      | Ket |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                          |                                                                                                 | 2020                      | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
| 1  | Pendidikan AnakUsia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD                    | 60,09                     | 79,04 | 100  | 100  | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Pendidikan Dasar         | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 80,27                     | 85    | 100  | 100  | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator                                                                                                                                       | Realisasi 2020 – 2024 (%) |       |      |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                       |                                                                                                                                                 | 2020                      | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 62,40                     | 62,40 | 100  | 100  | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Sumber data : LPPD tahun 2020-2024 dan data olahan

## 2. Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)

### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan aasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;



6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

| No | Jenis Pelayanan Dasar               | Indikator                                           | Realisasi 2020 – 2024 (%) |       |       |       |       | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                     |                                                     | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil       | Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan    | 87,80                     | 87,80 | 84,00 | 80,90 | 76,76 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin    | Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan | 83,49                     | 84,11 | 80,00 | 61,45 | 77,61 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan        | 88,50                     | 88,50 | 95,00 | 67,04 | 79,76 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |





| No | Jenis Pelayanan Dasar                          | Indikator                                                                 | Realisasi 2020 – 2024 (%) |        |       |       |       | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                |                                                                           | 2020                      | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
|    |                                                | kesehatan                                                                 |                           |        |       |       |       |                        |      |      |      |      |     |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                     | Jumlah balita baru lahir yang mendapat layanan kesehatan                  | 79,78                     | 79,78  | 82,00 | 83,32 | 86,93 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan | 100                       | 100    | 83,00 | 83,11 | 90,38 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan        | 65,87                     | 65,87  | 73,00 | 73,95 | 63,12 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut           | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan           | 50,52                     | 50,52  | 76,00 | 79,95 | 81,04 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi       | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan  | 87,83                     | 87,83  | 88,00 | 48,93 | 90,82 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes         | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapat layanan      | 112,13                    | 112,13 | 81,00 | 63,43 | 93,86 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |



| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                   | Indikator                                                                                                                         | Realisasi 2020 – 2024 (%) |       |        |       |        | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 2020                      | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
|    | melitus                                                                                                 | kesehatan                                                                                                                         |                           |       |        |       |        |                        |      |      |      |      |     |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                    | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapat layanan kesehatan                                                    | 100                       | 100   | 463,00 | 100   | 119,44 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi                                                           | Jumlah warga negara terduga tuberculosi yang mendapat layanan kesehatan                                                           | 85,10                     | 85,10 | 87,00  | 100   | 80,87  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat layanan kesehatan | 100                       | 100   | 94,00  | 85,81 | 77,77  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Sumber data : LPPD tahun 2020-2024 dan data olahan



### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)

#### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator                                                                  | Realisasi 2020 – 2024 (%) |       |       |       |       | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      | Ket |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                     |                                                                            | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
| 1  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari  | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 75                        | 48,70 | 51,85 | 95,80 | 61,03 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 0                         | 71,50 | 100   | 90,64 | 67,74 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Sumber data : LPPD tahun 2020-2024 dan data olahan



#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR)

##### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                  | Indikator                                                                                                     | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |      |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                        |                                                                                                               | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana                                       | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                           | 100                       | 100  | 100  | 0    | 0    | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas | 100                       | 100  | 100  | 100  | 0    | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |





| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator                        | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |      |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                       |                                  | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
|    | kabupaten             | penyediaan rumah yang layak huni |                           |      |      |      |      |                        |      |      |      |      |     |

Sumber data : LPPD tahun 2020-2024 dan data olahan

## 5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran)

### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan informasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran.



| No | Jenis Pelayanan Dasar                                  | Indikator                                                                                                | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |      |       |       | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                        |                                                                                                          | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
| 1  | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum             | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota | 100                       |      | 100  | 100   | 100   | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana                      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                      | 0,11                      |      | 0,14 | 100   | 100   | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 3  | Pelayanan informasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                | 0                         |      | 0,14 | 100   | 100   | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban             | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan                                                              | 0                         |      | 3,12 | 91,65 | 91,65 | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |



| No | Jenis Pelayanan Dasar                            | Indikator                                                                              | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |      |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                  |                                                                                        | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
|    | bencana                                          | penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                               |                           |      |      |      |      |                        |      |      |      |      |     |
| 5  | Pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 0                         |      | 0    | 0    | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Sumber data : LPPD tahun 2020-2024 dan data olahan

## 6. Bidang Sosial (Dinas Sosial)

### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.



| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                            | Indikator                                                                                                        | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |       |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                  |                                                                                                                  | 2020                      | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti                          | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti                                               | 3,01                      | 31   | 14,17 | 0    | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                           | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                          | 0                         | 32   | 0     | 0    | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                                    | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                      | 0                         | 2    | 0     | 0    | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 0                         | 0    | 0     | 0    | 0    | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                  |                           |      |       |      |      |                        |      |      |      |      |     |





| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                          | Realisasi 2020 – 2024 (%) |      |       |      |      | Target 2025 – 2029 (%) |      |      |      |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    | 2020                      | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ket |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 7,11                      | 7    | 87,35 | 0    | 100  | 100                    | 100  | 100  | 100  | 100  |     |



2.4.3. Kerjasama Antar Daerah

Kerja sama antar daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan isu lintas wilayah, mengoptimalkan sumber daya bersama, dan mewujudkan pembangunan yang lebih efisien dan efektif melalui kolaborasi formal dengan daerah lain. Tujuan kerja sama antar daerah antara lain :

- Mengatasi masalah lintas batas wilayah (misalnya pengelolaan sungai, kawasan pesisir, transportasi antardaerah);
- Efisiensi anggaran melalui pembiayaan bersama (*joint funding*);
- Penguatan pelayanan publik yang berbasis wilayah, bukan hanya administratif;
- Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang saling terhubung.

2.4.4. Rencana Pembangunan Infrastruktur Sumber APBN/APBD

Tabel 2.52. Eksisting Proyeksi Kebutuhan Sambungan Rumah (SR)

| HINGGA<br>TAHUN<br>2023 | 2025   | 2030   | 2035   | 2040   | 2045   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9250                    | 18.680 | 33.866 | 40.228 | 47.262 | 55.119 |

Sumber : (data diolah) Tahun 2025

Tabel 2.53. Eksisting Proyeksi Kebutuhan Sarpras dan Fasilitas Lingkungan

| JENIS SARPRAS<br>LINGKUNGAN                                                                                                             | EKSISTING<br>HINGGA<br>TAHUN<br>2023 | PROYEKSI KEBUTUHAN SARPRAS DAN<br>FASILITAS LINGKUNGAN |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                         |                                      | 2025                                                   | 2030   | 2035   | 2040   | 2045   |
| (1)                                                                                                                                     | (2)                                  | (3)                                                    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    |
| Proyeksi Kebutuhan Rumah Layak Huni (unit)                                                                                              | 18.104                               | 37.359                                                 | 48.380 | 60.342 | 68.267 | 77.166 |
| Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit                                                                                                          | 1                                    |                                                        |        | 1      |        |        |
| Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (unit)                                                                                                     | 10                                   | 1                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Kebutuhan TK (unit)                                                                                                            | 23                                   | 10                                                     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Proyeksi Kebutuhan SD (unit)                                                                                                            | 86                                   |                                                        | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Kebutuhan SMTP (unit)                                                                                                          | 34                                   | 1                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Kebutuhan SMU/SMK (unit)                                                                                                       | 10                                   | 1                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Kebutuhan Universitas (unit)                                                                                                   | -                                    | -                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Kebutuhan Hotel                                                                                                                | 2                                    | 2                                                      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Proyeksi Kebutuhan GOR (unit)                                                                                                           | -                                    | 1                                                      |        |        | 1      |        |
| Proyeksi Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat                                                                                           | -                                    | 1                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) (unit)                                            |                                      |                                                        |        |        |        |        |
| Proyeksi Pembangunan prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing- masing kawasan (unit) | -                                    | 1                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Proyeksi Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan pasar umum (unit)                                                                      | -                                    | 3                                                      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Proyeksi Pengembangan Kepariwisata dan kebudayaan (unit)                                                                                | -                                    | 2                                                      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Proyeksi Kebutuhan TPU                                                                                                                  | -                                    |                                                        | 1      |        | 1      |        |



| JENIS SARPRAS LINGKUNGAN                            | EKSISTING HINGGA TAHUN 2023 | PROYEKSI KEBUTUHAN SARPRAS DAN FASILITAS LINGKUNGAN |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                     |                             | 2025                                                | 2030  | 2035  | 2040  | 2045  |
| (1)                                                 | (2)                         | (3)                                                 | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan                    | 847                         | 2.335                                               | 2.903 | 3.017 | 4.201 | 5.512 |
| Proyeksi Kebutuhan Terminal (unit)                  | 0                           | 1                                                   |       | 1     |       | 1     |
| Proyeksi Kebutuhan Pelabuhan (unit)                 | 1                           | 1                                                   | 1     |       | 1     | 1     |
| Proyeksi Kebutuhan Pelabuhan Pendaratan Ikan (unit) | -                           | 1                                                   | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Proyeksi Kebutuhan Pengolahan Sampah/IPAL (unit)    | 1                           | 1                                                   | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Proyeksi Kebutuhan BTS (unit)                       | 16                          | 2                                                   | 2     | 2     | 2     | 2     |

Sumber : (data diolah) Tahun 2025

2.4.5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Mendukung Pemerintah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mendukung pemerintah adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang berfungsi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Fungsi BUMD dalam mendukung pemerintah antar lain :

- Pelayanan Publik
- Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penggerak Ekonomi Lokal
- Mendukung Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah

Saat ini masih terdapat 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung pemerintah yaitu PD Solapora dan Bank NTT.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah



2.5.1. Realisasi APBD Sumba Tengah 2020-2024

Tabel 2.54. Realisasi APBD Sumba Tengah 2020-2024

| I                                                                         | Tahun           |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|
|                                                                           | 2020 (Rp)       | Realisasi 2020  | %   | 2021 (Rp)       | Realisasi 2021  | %   | 2022 (Rp)       | Realisasi 2022  | %   | 2023 (Rp)       | Realisasi 2023  | %   | 2024 (Rp)       | Realisasi 2024  | %   |
| PENDAPATAN DAERAH                                                         |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 31.200.211.933  | 30.580.109.598  | 98  | 34.167.680.031  | 27.510.338.256  | 81  | 25.397.004.890  | 22.036.752.097  | 87  | 29.281.516.531  | 26.200.953.048  | 89  | 28.240.524.743  | 24.236.695.520  | 86  |
| Pajak Daerah                                                              | 3.852.460.580   | 4.902.361.432   | 127 | 4.423.612.350   | 4.684.506.349   | 106 | 6.242.489.259   | 6.145.786.962   | 98  | 6.531.112.750   | 5.893.172.206   | 90  | 8.746.702.792   | 7.603.884.893   | 87  |
| Retribusi Daerah                                                          | 794.555.000     | 787.130.409     | 99  | 3.221.830.000   | 2.351.188.850   | 73  | 4.164.422.000   | 3.074.946.750   | 74  | 4.114.422.000   | 2.146.431.750   | 52  | 3.231.100.000   | 2.314.742.567   | 72  |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 4.657.407.253   | 4.657.402.506   | 100 | 5.095.758.565   | 5.095.758.565   | 100 | 3.056.556.403   | 3.056.556.403   | 100 | 5.476.891.405   | 5.476.891.405   | 100 | 2.759.129.716   | 2.759.129.716   | 100 |
| Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 21.895.789.100  | 20.233.215.252  | 92  | 21.426.479.116  | 15.378.884.492  | 72  | 11.933.537.228  | 9.759.461.981   | 82  | 13.159.090.376  | 12.684.457.687  | 96  | 13.503.592.235  | 11.558.938.343  | 86  |
| PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 536.546.136.491 | 531.787.960.664 | 99  | 533.282.177.335 | 524.332.013.693 | 98  | 602.244.235.981 | 594.382.540.425 | 99  | 641.775.987.739 | 636.647.367.817 | 99  | 639.188.113.307 | 629.340.026.908 | 98  |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 523.009.982.256 | 520.099.219.621 | 99  | 515.681.168.667 | 514.119.971.682 | 100 | 583.760.352.769 | 580.082.674.304 | 99  | 621.249.302.480 | 618.662.370.823 | 100 | 616.883.525.291 | 610.458.438.358 | 99  |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 13.536.154.235  | 11.688.741.043  | 86  | 17.601.008.668  | 10.212.042.011  | 58  | 18.483.883.212  | 14.299.866.121  | 77  | 20.526.685.259  | 17.984.996.994  | 88  | 22.304.588.016  | 18.881.588.550  | 85  |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 8.846.800.000   | 12.581.870.000  | 142 | 11.290.803.000  | 11.299.711.000  | 100 | 11.382.022.308  | 10.808.274.800  | 95  | 5.325.709.308   | 5.269.699.795   | 99  | 5.325.709.308   | 5.474.206.298   | 103 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8.846.800.000   | 12.581.870.000  | 142 | 11.290.803.000  | 11.299.711.000  | 100 | 11.382.022.308  | 10.808.274.800  | 95  | 5.325.709.308   | 5.269.699.795   | 99  | 5.325.709.308   | 5.474.206.298   | 103 |
| Jumlah Pendapatan Daerah                                                  | 576.593.148.424 | 574.949.940.263 | 100 | 578.740.660.366 | 563.142.062.949 | 97  | 639.023.263.179 | 627.227.567.322 | 98  | 676.383.213.578 | 668.118.020.660 | 99  | 672.754.347.358 | 659.050.928.725 | 98  |
| BELANJA                                                                   |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |     |
| BELANJA OPERASI                                                           | 365.624.332.888 | 346.466.598.772 | 95  | 403.518.521.479 | 379.197.227.470 | 94  | 406.044.335.195 | 379.651.999.368 | 94  | 424.893.911.439 | 369.991.002.375 | 87  | 489.545.248.719 | 438.760.807.931 | 90  |
| Belanja Pegawai                                                           | 142.134.716.095 | 138.426.603.897 | 97  | 182.439.789.320 | 175.453.816.583 | 96  | 171.822.952.978 | 157.342.277.530 | 92  | 217.279.828.986 | 174.398.639.412 | 80  | 247.332.662.001 | 214.139.948.898 | 87  |
| Belanja Barang dan Jasa                                                   | 187.337.416.793 | 172.348.794.875 | 92  | 188.329.989.084 | 170.870.437.812 | 91  | 197.901.019.142 | 187.318.341.763 | 95  | 173.109.439.378 | 161.665.890.913 | 93  | 206.591.399.643 | 190.195.737.533 | 92  |
| Belanja Hibah                                                             | 5.019.200.000   | 4.890.200.000   | 97  | 3.099.463.075   | 2.924.563.075   | 94  | 10.837.463.075  | 9.896.480.075   | 91  | 10.634.643.075  | 10.314.472.050  | 97  | 30.122.187.075  | 30.093.121.500  | 100 |
| Belanja Bantuan Sosial                                                    | 31.133.000.000  | 30.801.000.000  | 99  | 29.649.280.000  | 29.948.410.000  | 101 | 25.482.900.000  | 25.094.900.000  | 98  | 23.870.000.000  | 23.612.000.000  | 99  | 5.499.000.000   | 4.332.000.000   | 79  |
| BELANJA MODAL                                                             | 112.669.718.644 | 105.949.991.033 | 94  | 95.956.542.768  | 95.596.351.296  | 100 | 135.674.722.452 | 135.235.791.338 | 100 | 160.558.161.777 | 160.487.511.220 | 100 | 120.727.171.304 | 120.405.680.942 | 100 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 23.811.277.336  | 28.198.874.328  |     | 19.632.244.166  | 20.588.432.941  | 105 | 30.841.194.489  | 30.716.391.266  | 100 | 13.875.051.647  | 13.807.484.038  | 100 | 13.225.897.114  | 13.284.715.614  | 100 |





| I                                                             | Tahun            |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |         |                  |                 |      |                 |                 |     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                               | 2020 (Rp)        | Realisasi 2020  | %   | 2021 (Rp)       | Realisasi 2021  | %   | 2022 (Rp)       | Realisasi 2022  | %       | 2023 (Rp)        | Realisasi 2023  | %    | 2024 (Rp)       | Realisasi 2024  | %   |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             | 38.583.722.790   | 28.251.640.875  |     | 35.529.334.896  | 33.900.195.416  | 95  | 30.040.876.474  | 29.954.159.394  | 100     | 31.162.864.827   | 31.114.310.162  | 100  | 8.974.794.490   | 8.891.385.408   | 99  |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 48.871.142.418   | 48.635.856.830  |     | 40.595.089.106  | 40.589.052.639  | 100 | 74.601.176.995  | 74.557.087.780  | 100     | 114.958.274.703  | 114.952.089.520 | 100  | 98.294.182.480  | 98.063.043.920  | 100 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 1.403.576.100    | 863.619.000     |     | 199.874.600     | 518.670.300     | 259 | 181.474.494     | 8.152.898       | 4       | 61.970.600       | 113.627.500     | 183  | 232.297.220     | 166.536.000     | 72  |
| BELANJA TIDAK TERDUGA                                         | 22.533.000.000   | 9.953.594.350   | 44  | 1.900.000.000   | 480.941.250     | 25  | 1.000.000.000   | 481.686.000     | 48      | 500.000.000      | -               | -    | 500.000.000     | -               | -   |
| Belanja Tidak Terduga                                         | 22.533.000.000   | 9.953.594.350   | 44  | 1.900.000.000   | 480.941.250     | 25  | 1.000.000.000   | 481.686.000     | 48      | 500.000.000      | -               | -    | 500.000.000     | -               | -   |
| BELANJA TRANSFER                                              | 107.760.260.428  | 107.425.977.056 | 100 | 108.519.223.435 | 108.415.693.271 | 100 | 97.611.637.675  | 97.354.413.146  | 100     | 103.238.830.475  | 102.737.007.289 | 100  | 103.848.183.475 | 103.586.686.235 | 100 |
| Belanja Bantuan Keuangan                                      | 106.743.085.891  | 106.739.347.475 | 100 | 107.754.679.200 | 107.754.679.200 | 100 | 96.576.343.410  | 96.576.343.410  | 100     | 102.174.277.000  | 101.863.919.800 | 100  | 102.760.970.000 | 102.760.970.000 | 100 |
| Tranfer Bagi Hasil Pajak                                      | 1.017.174.537    | 686.629.581     | 68  | 764.544.235     | 661.014.071     | 86  | 1.035.294.265   | 778.069.736     | 75      | 1.064.553.475    | 873.087.489     | 82   | 1.087.213.475   | 825.716.235     | 76  |
| Jumlah Belanja Daerah                                         | 608.587.311.960  | 569.796.161.211 | 94  | 609.894.287.682 | 583.690.213.287 | 96  | 640.330.695.322 | 612.723.889.852 | 96      | 689.190.903.691  | 633.215.520.884 | 92   | 714.620.603.498 | 662.753.175.108 | 93  |
| Surplus/(Defisit)                                             | - 31.994.163.535 | 5.153.779.052   | -16 | -31.153.627.316 | -20.548.150.338 | 66  | - 1.307.432.143 | 14.503.677.470  | - 1.109 | - 12.807.690.113 | 34.902.499.777  | -273 | -41.866.256.140 | - 3.702.246.383 | 9   |
| PEMBIAYAAN                                                    |                  |                 |     |                 |                 |     |                 |                 |         |                  |                 |      |                 |                 |     |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 37.994.163.535   | 37.999.848.265  | 100 | 37.154.127.316  | 37.150.582.481  | 100 | 10.607.432.143  | 10.604.012.643  | 100     | 16.057.690.113   | 15.963.756.363  | 99   | 47.916.256.140  | 47.915.256.138  | 100 |
| Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahun Sebelumnya      | 37.984.163.535   | 37.992.943.503  | 100 | 37.153.627.316  | 37.150.082.481  | 100 | 10.602.432.143  | 10.604.012.643  | 100     | 15.807.690.113   | 15.801.593.034  | 100  | 47.866.256.140  | 47.866.256.140  | 100 |
| Penerimaan kembali investasi dana bergilir                    | 10.000.000       | 6.904.762       |     | 500.000         | 500.000         |     | 5.000.000       | -               |         | 250.000.000      | 162.163.329     | 65   | 50.000.000      | 48.999.998      |     |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                  | 37.994.163.535   | 37.999.848.265  | 100 | 37.154.127.316  | 37.150.582.481  | 100 | 10.607.432.143  | 10.604.012.643  | 100     | 16.057.690.113   | 15.963.756.363  | 99   | 47.916.256.140  | 47.915.256.138  | 100 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        | 6.000.000.000    | 6.000.000.000   | 100 | 6.000.500.000   | 6.000.000.000   | 100 | 9.300.000.000   | 9.300.000.000   | 100     | 3.250.000.000    | 3.000.000.000   | 92   | 6.050.000.000   | 6.000.000.000   | 99  |
| Penyertaan Modal Daerah                                       | 6.000.000.000    | 6.000.000.000   | 100 | 6.000.500.000   | 6.000.000.000   | 100 | 9.300.000.000   | 9.300.000.000   | 100     | 3.250.000.000    | 3.000.000.000   | 92   | 6.050.000.000   | 6.000.000.000   | 99  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 6.000.000.000    | 6.000.000.000   | 100 | 6.000.500.000   | 6.000.000.000   | 100 | 9.300.000.000   | 9.300.000.000   | 100     | 3.250.000.000    | 3.000.000.000   | 92   | 6.050.000.000   | 6.000.000.000   | 99  |
| Pembiayaan Netto                                              | 31.994.163.535   | 31.999.848.265  | 100 | 31.153.627.316  | 31.150.582.481  | 100 | 1.307.432.143   | 1.304.012.643   | 100     | 12.807.690.113   | 12.963.756.363  | 101  | 41.866.256.140  | 41.915.256.138  | 100 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan | -                | 37.153.627.316  |     | -               | 10.602.432.143  |     | -               | 15.807.690.113  |         | -                | 47.866.256.140  |      | -               | 38.213.009.755  | -   |

Sumber data : Badan keuangan daerah Kab. Sumba Tengah



Tabel 2.55. Neraca Daerah

| NO        | URAIAN                   | TAHUN                |                      |                      |                      |                      |
|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                          | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| ASET      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1         | Aset Lancar              | 53.695.357.267,51    | 26.148.558.097,42    | 31.176.323.953,32    | 64.260.021.866,05    | 63.147.517.349,05    |
| 2         | Investasi Jangka Panjang | 43.224.872.873,00    | 49.027.611.047,00    | 58.262.635.515,00    | 61.149.239.767,45    | 67.244.842.392,70    |
| 3         | Aset Tetap               | 1.119.112.833.106,10 | 1.147.841.277.746,57 | 1.200.862.637.488,77 | 1.242.001.849.426,13 | 1.258.493.818.577,86 |
| 4         | Aset Lainnya             | 20.855.606.062,96    | 20.993.256.782,60    | 24.940.290.915,22    | 14.734.193.608,77    | 1.405.366.951.996,02 |
| KEWAJIBAN |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5         | Kewajiban Jangka Pendek  | 37.908,00            | 1.984.907,00         | 49.456.195,00        | 0                    | 266.151.225,00       |
| 6         | Kewajiban Jangka Panjang | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| EKUITAS   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7         | Ekuitas                  | 1.236.888.631.401,57 | 1.244.008.718.766,59 | 1.315.192.431.677,31 | 1.382.145.304.668,40 | 1.405.100.800.771,02 |



## 2.5.2. Proyeksi APBD Sumba Tengah 2025 – 2030

Gambaran Proyeksi APBD Kabupaten Sumba Tengah pada dokumen ini disajikan mengacu pada kinerja keuangan periode tahun 2020-2024 atas fostur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan bidang pendapatan perlu strategi peningkatan pendapatan asli daerah terhadap optimalisasi sumber pendapatan asli daerah terhadap pajak dan retribusi melalui perluasan obyek pajak dan retribusi yang diikuti regulasi dalam kepastian hukum.

Demikian halnya kebijakan alokasi belanja diarahkan pada peningkatan kualitas belanja utamanya yang mendukung prioritas dalam perumusan tema pada setiap tahapan yang dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah. Sedangkan arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada dukungan kolaborasi kemitraan dengan badan usaha milik daerah untuk berkontribusi sebagai lokomotif perekonomian daerah.

Proyeksi APBD tahun 2025-2030 dapat dicermati sebagai berikut :

**Tabel 2.56. Proyeksi APBD Sumba Tengah 2025 - 2030**

| URAIAN                                            | Tahun                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                   | 2025 (Rp)                 | 2026 (Rp)                 | 2027 (Rp)                 | 2028 (Rp)                 | 2029 (Rp)                 | 2030 (Rp)                 |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>595.613.069.581,00</b> | <b>614.915.855.334,13</b> | <b>632.830.240.742,39</b> | <b>651.277.533.508,18</b> | <b>670.273.630.368,14</b> | <b>689.834.903.151,32</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>29.168.965.939,00</b>  | <b>31.645.174.335,58</b>  | <b>32.228.185.066,59</b>  | <b>32.824.161.914,82</b>  | <b>33.433.403.379,69</b>  | <b>34.056.215.105,93</b>  |
| Pajak Daerah                                      | 9.497.955.179,00          | 9.687.914.282,58          | 9.881.672.568,23          | 10.079.306.019,60         | 10.280.892.139,99         | 10.486.509.982,79         |
| Retribusi Daerah                                  | 4.226.222.000,00          | 4.353.008.660,00          | 4.483.598.919,80          | 4.618.106.887,39          | 4.756.650.094,02          | 4.899.349.596,84          |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.765.269.860,00          | 4.671.142.115,00          | 4.671.142.115,00          | 4.671.142.115,00          | 4.671.142.115,00          | 4.671.142.115,00          |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 12.679.518.900,00         | 12.933.109.278,00         | 13.191.771.463,56         | 13.455.606.892,83         | 13.724.719.030,69         | 13.999.213.411,30         |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>560.885.911.885,00</b> | <b>577.712.489.241,55</b> | <b>595.043.863.918,80</b> | <b>612.895.179.836,36</b> | <b>631.282.035.231,45</b> | <b>650.220.496.288,40</b> |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 547.730.556.000,00        | 564.162.472.680,00        | 581.087.346.860,40        | 598.519.967.266,21        | 616.475.566.284,20        | 634.969.833.272,72        |



| URAIAN                                                                    | Tahun                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                           | 2025 (Rp)                 | 2026 (Rp)                 | 2027 (Rp)                 | 2028 (Rp)                 | 2029 (Rp)                 | 2030 (Rp)                 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 13.155.355.885,00         | 13.550.016.561,55         | 13.956.517.058,40         | 14.375.212.570,15         | 14.806.468.947,25         | 15.250.663.015,67         |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>5.558.191.757,00</b>   | <b>5.558.191.757,00</b>   | <b>5.558.191.757,00</b>   | <b>5.558.191.757,00</b>   | <b>5.558.191.757,00</b>   | <b>5.558.191.757,00</b>   |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.558.191.757,00          | 5.558.191.757,00          | 5.558.191.757,00          | 5.558.191.757,00          | 5.558.191.757,00          | 5.558.191.757,00          |
| Pendapatan Hibah                                                          | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah                            | -                         | -                         | -                         |                           |                           |                           |
| <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>                                           | <b>595.613.069.581,00</b> | <b>614.915.855.334,13</b> | <b>632.830.240.742,39</b> | <b>651.277.533.508,18</b> | <b>670.273.630.368,14</b> | <b>689.834.903.151,32</b> |
| <b>BELANJA</b>                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>457.874.641.420,00</b> | <b>451.692.745.671,66</b> | <b>460.314.316.260,01</b> | <b>495.933.733.260,19</b> | <b>491.620.963.380,44</b> | <b>491.656.300.736,76</b> |
| Belanja Pegawai                                                           | 275.660.022.823,00        | 278.416.623.051,23        | 284.284.955.512,26        | 293.263.504.177,62        | 305.594.044.344,73        | 321.623.746.561,96        |
| Belanja Barang dan Jasa                                                   | 151.150.402.343,00        | 137.661.906.366,43        | 140.415.144.493,76        | 144.627.598.828,57        | 150.412.702.781,71        | 157.933.337.920,80        |
| Belanja Hibah                                                             | 9.183.216.254,00          | 9.183.216.254,00          | 9.183.216.254,00          | 31.611.630.254,00         | 9.183.216.254,00          | 9.183.216.254,00          |
| Belanja Bantuan Sosial                                                    | 21.881.000.000,00         | 26.431.000.000,00         | 26.431.000.000,00         | 26.431.000.000,00         | 26.431.000.000,00         | 2.916.000.000,00          |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>50.070.487.161,00</b>  | <b>54.555.168.662,47</b>  | <b>63.847.983.482,37</b>  | <b>46.675.859.247,99</b>  | <b>69.984.725.987,70</b>  | <b>89.510.661.414,56</b>  |
| Belanja Modal Tanah                                                       |                           |                           | 500.000.000,00            | -                         | -                         | -                         |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 10.551.164.761,00         | 11.606.281.237,00         | 8.124.396.865,00          | 8.124.396.865,00          | 8.124.396.865,00          | 8.124.396.865,00          |
|                                                                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |





| URAIAN                                                   | Tahun                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                          | 2025 (Rp)                 | 2026 (Rp)                 | 2027 (Rp)                 | 2028 (Rp)                 | 2029 (Rp)                 | 2030 (Rp)                 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                        | 24.469.497.000,00         | 26.194.497.000,00         | 29.469.497.000,00         | 24.469.497.000,00         | 31.469.497.000,00         | 31.469.497.000,00         |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi               | 14.810.062.900,00         | 16.714.627.925,47         | 25.714.327.117,37         | 14.042.202.882,99         | 30.351.069.622,70         | 49.877.005.049,56         |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                         | 39.762.500,00             | 39.762.500,00             | 39.762.500,00             | 39.762.500,00             | 39.762.500,00             | 39.762.500,00             |
| Belanja Modal Aset lainnya                               | 200.000.000,00            | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                             | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   |
| Belanja Tidak Terduga                                    | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                                  | <b>100.167.941.000,00</b> | <b>100.167.941.000,00</b> | <b>100.167.941.000,00</b> | <b>100.167.941.000,00</b> | <b>100.167.941.000,00</b> | <b>100.167.941.000,00</b> |
| Belanja Bantuan Keuangan                                 | 98.838.641.000,00         | 98.838.641.000,00         | 98.838.641.000,00         | 98.838.641.000,00         | 98.838.641.000,00         | 98.838.641.000,00         |
| Tranfer Bagi Hasil Pajak                                 | 1.329.300.000,00          | 1.329.300.000,00          | 1.329.300.000,00          | 1.329.300.000,00          | 1.329.300.000,00          | 1.329.300.000,00          |
| <b>Jumlah Belanja Daerah</b>                             | <b>610.613.069.581,00</b> | <b>608.915.855.334,13</b> | <b>626.830.240.742,38</b> | <b>645.277.533.508,18</b> | <b>664.273.630.368,14</b> | <b>683.834.903.151,32</b> |
| <b>Surplus/(Defisit)</b>                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Penerimaan kembali investasi dana bergulir               | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                      | <b>15.000.000.000,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                            | <b>-</b>                  | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>6.000.000.000,00</b>   |



| URAIAN                                                                       | Tahun             |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2025 (Rp)         | 2026 (Rp)         | 2027 (Rp)         | 2028 (Rp)         | 2029 (Rp)         | 2030 (Rp)         |
| Penyertaan Modal Daerah                                                      | -                 | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                | -                 | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  |
| Pembiayaan Netto                                                             | 15.000.000.000,00 | -6.000.000.000,00 | -6.000.000.000,00 | -6.000.000.000,00 | -6.000.000.000,00 | -6.000.000.000,00 |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan<br/>Anggaran (SILPA) Daerah Tahun<br/>Berkenaan</b> | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |

Sumber data : Badan keuangan daerah Kab. Sumba Tengah

## 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data realisasi pembangunan yang ada di Sumba Tengah, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

### 2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion (FGD)* Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan dalam tabel di bawah ini. Permasalahan pembangunan daerah adalah sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini dengan yang direncanakan, serta hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah dapat terjadi karena adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan, ancaman yang tidak diantisipasi, serta kelemahan yang tidak diatasi. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional / Target Tahunan di dalam Rancangan Teknokratik RPJMD/capaian pada tahun sebelumnya, atau tren.

Tujuan adanya perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Tabel 2.57. Identifikasi Masalah Berdasarkan SDGs Urusan Pembangunan Daerah

| No. | Sustainable Development Goal's                                                                                       | Urusan Pembangunan Daerah | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil, dan Inklusif, serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua | Pendidikan                | a. Pendidikan berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing belum terwujud dengan baik<br><br>b. Belum tercapainya tingkat pemerataan guru.<br><br>c. Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran Sekolah Dasar dan pendidikan menengah.<br><br>d. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan dasar<br><br>e. Rendahnya partisipasi masyarakat usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pendidikan Kesetaraan. |
|     |                                                                                                                      |                           | f. Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran SMP (Kimia, Fisika, Biologi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                      |                           | g. Belum optimalnya Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                      | Perpustakaan              | a. Rendahnya Tingkat Kegemaran membaca<br>b. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Menjamin Kehidupan yang Sehat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia                                |                           | a. Sistem layanan kesehatan belum mantap dan responsif, mengakibatkan layanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata bagi semua penduduk belum terwujud dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029





| No. | Sustainable Development Goal's                                                         | Urusan Pembangunan Daerah         | Permasalahan                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | Kesehatan                         | b. Rendahnya pelayanan terhadap bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                               |
|     |                                                                                        |                                   | c. Masih rendahnya persentase pelayanan kesehatan terhadap anak usia dini.                                                         |
|     |                                                                                        |                                   | d. Rendahnya jumlah pelayanan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.                                                  |
| 3   | Menjamin ketersediaan, dan manajemen air, dan sanitasi secara berkelanjutan            | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | a. Minimnya ketersediaan infrastruktur layanan dasar                                                                               |
|     |                                                                                        |                                   | b. Rendahnya layanan infrastruktur dasar dalam mendukung Pembangunan sosial budaya dan ekonomi                                     |
|     |                                                                                        |                                   | c. Rendahnya ketersediaan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur publik dan pendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya |
|     |                                                                                        |                                   | d. Rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang                                                                                        |
|     |                                                                                        |                                   | e. Belum optimalnya luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.                                                         |
|     |                                                                                        |                                   | f. Masih ada rumah tangga belum terlayani oleh akses air minum.                                                                    |
|     |                                                                                        |                                   | g. Belum optimalnya capaian tingkat kemantapan jalan kabupaten.                                                                    |
| 4   | Membuat kota, dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan | Perumahan dan Permukiman          | a. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.                                                                                            |
|     |                                                                                        |                                   | b. Rendahnya Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan capaian 0%                                         |

Sumaber Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



| No. | Suistainable Development Goal's                                                                                                                                                                                                                         | Urusan Pembangunan Daerah        | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         | Pertanahan                       | a. . Rendahnya Persentase Penetapan Tanah Ulayat karena belum ditetapkan Peraturan Daerah berkaitan dengan penetapan tanah ulayat.                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | b. Belum tersedianya c.Dokumen P e r e n c a n a a n PenggunaanTanah.                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | a. Rendahnya Persentase Pengentasan Desa Tertinggal<br>b. Rendahnya persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa.<br>c. Belum adanya fasilitas peningkatan status desa mandiri<br>d. Rendahnya pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/BUMDes dan Lembaga Adat                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         | Perhubungan                      | a. Rendahnya Kinerja Lalu Lintas<br>b. Belum tersedianya sarana prasarana angkutan perkotaan di Sumba Tengah<br>c. Belum adanya prasarana transportasi konektifitas wilayah seperti halte dan terminal                                                                                              |
| 5   | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi, dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi, dan inovasi untuk negara kurang berkembang, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi | Komunikasi dan Informatika       | a. Belum optimalnya pemanfaatan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo terhadap Perangkat Daerah<br>b. Masih rendahnya nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Pemenuhan instrumen pendukung SPBE)<br>c. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik oleh Perangkat Daerah |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



| No. | Sustainable Development Goal's                                                                                                                                                                                     | Urusan Pembangunan Daerah                                     | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah<br>d. Belum optimalnya persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.<br>e. masih rendahnya perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar untuk mendukung keterbukaan informasi publik) |
| 6   | Meningkatkan masyarakat yang inklusif, dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Rendahnya capaian Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                   | a. Rendahnya persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan (Integrasi data antar OPD terkait data kependudukan)<br>b. Belum tersedianya Profil Kependudukan (Penyajian data kependudukan)                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                    | Sosial                                                        | a. Ketahanan sosial masyarakat Sumba Tengah belum terbentuk dengan baik. Dalam menghadapi situasi krisis seketika, kegotongroyongan masyarakat cukup kuat untuk mengatasinya, tetapi berbagai perubahan dan kemajuan dalam jangka menengah dan panjang, masyarakat masih menghadapi kegamangan.              |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



| No. | Suistainable Development Goal's | Urusan Pembangunan Daerah                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                              | <p>b. Rendahnya peningkatan kualitas pemberdayaan sosial.</p> <p>c. Perlindungan sosial yang belum adaptif ditujukan untuk penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang adil dan inklusif belum terwujud dengan baik.</p> <p>d. Rendahnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</p> |
|     |                                 | Kepemudaan dan Olahraga                      | <p>a. Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>b. Belum maksimalnya peningkatan prestasi olah raga.</p> <p>C. Belum meratanya Sarana Prasarana Olahraga</p>                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <p>a. Belum optimalnya capaian Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kampung KB.</p> <p>b. Rendahnya persentase pemakaian Kontrasepsi Modern.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                 | Kebudayaan                                   | <p>a. Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                 |                                              | <p>b. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembinaan sejarah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029





| No. | Suistainable Development Goal's                                                                    | Urusan Pembangunan Daerah                  | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    | Kearsipan                                  | <p>a. Rendahnya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban karena belum tersedianya regulasi daerah berkaitan dengan NSPK.</p> <p>b. Belum tersedianya regulasi (Perda/Perkada) yang memuat norma, standar, prosedur, kegiatan pemusnahan arsip.</p> <p>c. Belum tersedianya system pengarsipan berbasis elektronik</p>                              |
| 7   | Memperkuat sarana pelaksanaan, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | <p>a. Kurangnya ketersediaan pegawai Fungsional</p> <p>b. Rendahnya Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                    | Statistik                                  | <p>a. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik oleh organisasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>b. Selaras dengan pengukuran indikator pemanfaatan data statistik untuk perencanaan, dalam hal melakukan evaluasi, masih banyak organisasi perangkat daerah yang belum menggunakan data statistik Untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah</p> |
|     |                                                                                                    |                                            | <p>c. Belum optimalnya Kolaborasi data statistik daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                    | Keuangan                                   | <p>a. Belum maksimalnya Tingkat Ketersediaan Aset Gedung/Bangunan Milik Daeah dalam Kondisi Baik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



| No. | Suistainable Development Goal's                                                                                                                                                                                                        | Urusan Pembangunan Daerah                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | b. Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan, dan anak                                                                                                                                                                      |                                              | a. Rendahnya peangarusutamaan GEDSI dalam pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                        | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | b. Belum terlaksananya pemanfaatan Sistem Data Gender oleh Perangkat Daerah<br>c. Belum Terlaksananya pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) oleh Pemeritah Desa/Kelurahan<br>d. Belum mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak                                                                                                                       |
| 9   | Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan                                                                                                                        | Pangan                                       | a. Belum adanya perencanaan ketahanan pangan yang berketahanan iklim<br>b. Rendahnya tingkat kemandirian pangan daerah.<br>c. (Diversifikasi pangan) (Belum terselenggaranya cadangan pangan daerah)                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | d. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.<br>e. Rendahnya Tingkat kepedulian pelestarian ekologi, air dan pangan                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan, dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati | Lingkungan Hidup                             | a. 61 % wilayah Kabupaten Sumba Tengah berada pada status rentan perubahan iklim sangat tinggi dan tinggi.<br>b. Belum tersedianya dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim<br>c. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup<br>Rendahnya optimalisasi pengelolaan sampah.                                                                       |
| 11  | Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, dan dampaknya                                                                                                                                                               | Penanggulangan Bencana Daerah                | a. Masih rendahnya pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana<br>b. Belum optimalnya perencanaan pencegahan dan mitigasi kebencanaan<br>Rendahnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.<br>c. Rendahnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.<br>d. Seluruh wilayah Kabupaten Sumba Tengah telah mengalami kenaikan suhu |



| No. | Suistainable Development Goal's                                                                                                               | Urusan Pembangunan Daerah           | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                     | <p>udara dan akan terus mengalami peningkatan pada masa yang akan datang.</p> <p>e. Wilayah Kabupaten Sumba Tengah akan mengalami peningkatan curah hujan maupun peningkatan panjang hari hujan atau peningkatan panjang musim hujan.</p> <p>f. Tingginya intensitas serta beragamnya kejadian bencana di Kabupaten Sumba Tengah yang menyebabkan korban jiwa, korban terdampak maupun kerugian ekonomi serta lingkungan.</p> <p>g. Wilayah Kabupaten Sumba Tengah berada pada kelas risiko bencana kategori sedang.</p> <p>Kabupaten Sumba Tengah memiliki Indeks Ketahanan Daerah pada kategori rendah.</p> |
| 12  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkelanjutan kesempatan kerja penuh, dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | <p>a. Minimnya ketersediaan koperasi yang berkualitas</p> <p>b. Belum optimalnya pengelolaan koperasi</p> <p>c. Rendahnya Rasio BPR /LKM aktif per satuan penduduk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                               |                                     | <p>d. Minimnya peningkatan status Usaha Mikro menjadi Wirausaha</p> <p>e. Rendahnya Rasio pertumbuhan Wirausaha baru berskala mikro masih berkaitan dengan pengukuran Indikator Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| No. | Suistainable Development Goal's                                                                            | Urusan Pembangunan Daerah | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            | Pariwisata                | a. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB<br>b. Rendahnya pemanfaatan destinasi wisata yang potensial untuk pengembangan<br>c. Rendahnya cakupan layanan pembinaan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                            |                           | d. d. Rendahnya promosi destinasi wisata daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | Menjamin pola produksi, dan konsumsi pangan masyarakat yang berkelanjutan                                  | Pertanian                 | a. Rendahnya tingkat penyediaan sarana dan prasarana pertanian<br>b. Rendahnya produktivitas pertanian di daerah<br>c. Rendahnya produktivitas populasi ternak<br>d. Kabupaten Sumba Tengah memiliki indeks ketahanan pangan dengan kategori tahan.<br>e. Kabupaten Sumba Tengah memiliki prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang berada diatas capaian Provinsi akan tetapi masih berada dibawah capaian nasional |
| 14  | Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan | Perikanan                 | a. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap<br>b. Rendahnya upaya RTP dalam melakukan diversifikasi usaha perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





| No. | Suistainable Development Goal's     | Urusan Pembangunan Daerah | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                           | c. Rendahnya pemanfaatan usaha ekonomi biru untuk mendukung diversifikasi usaha perikanan                                                                                                                                                                                             |
| 15  | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan | Tenaga Kerja              | a. Rendahnya ketersediaan tenaga kerja bersertifikat.<br>b. Belum optimalnya Balai Latihan Kerja<br>c. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja<br>d. Masih lemahnya kapasitas tenaga kerja lokal yang dapat bersaing di dunia kerja<br>e. Tingginya tingkat pengangguran terbuka |

Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Tengah dapat dipetakan sebagai berikut:



Tabel 2.58. Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

| Masalah Pokok                         | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat Kemiskinan yang tinggi        | <div>a. Ketimpangan Pendapatan yang tinggi</div> <div>b. Akses Pelayanan Pendidikan yang belum optimal</div> <div>c. Rendahnya akses lapangan kerja</div> <div>d. Krisis ekonomi, termasuk resesi atau krisis finansial, menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, yang kemudian dapat meningkatkan tingkat kemiskinan karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan</div> | <div>a. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi</div> <div>b. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan menciptakan ketidaksetaraan dalam keterampilan dan peluang pekerjaan.</div> <div>c. Kurangnya lapangan kerja formal dan kesempatan usaha membuat sulit bagi</div>                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan</div> <div>d. Kesehatan yang buruk dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang terjangkau menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi, membebani keluarga dengan beban finansial tambahan dan menyebabkan kemiskinan</div> <div>e. Masih lemahnya kapasitas tenaga kerja lokal yang dapat bersaing di dunia kerja</div>                                                                                                                                            |
| Stunting di Sumba Tengah masih tinggi | <div>a. Sistem layanan kesehatan belum mantap dan responsif, mengakibatkan layanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata bagi semua penduduk belum terwujud dengan baik.</div> <div>b. Rendahnya pelayanan terhadap bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan</div> <div>c. Masih rendahnya persentase pelayanan kesehatan terhadap anak usia dini.</div>                                    | <div>a. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai gizi buruk dan dampaknya</div> <div>b. kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai gizi buruk</div> <div>c. terbatasnya kontrol kesehatan pada ibu hamil, balita, dan baduta di fasilitas kesehatan yang ada; terbatasnya fasilitas kesehatan di setiap wilayah</div> <div>d. adanya perbedaan cara dan praktik pola asuh pada balita dan baduta</div> <div>e. Rendahnya jumlah pelayanan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.</div> |



| Masalah Pokok                                          | Masalah                                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum Optimalnya<br>Pembangunan Sumber<br>Daya Manusia | a. Usia Harapan Hidup yang masih jauh di bawah batas Usia Harapan Hidup maksimal<br>b. Rendahnya lama Pendidikan siswa<br>c. Rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat | a. Kinerja pembangunan dibidang kesehatan belum menunjukkan performa yang optimal<br>b. Rata-rata lama sekolah baru sampai pada kelas 1 SMP dari usia wajib pendidikan dasar 9 tahun<br>c. Pendidikan berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing belum terwujud dengan baik<br>d. Belum tercapainya tingkat pemerataan guru.<br>e. Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran Sekolah Dasar dan pendidkan menengah.<br>f. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan dasar<br>g. Rendahnya partisipasi masyarakat usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pendidikan Kesetaraan.<br>h. Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran SMP (Kimia, Fisika, Biologi).<br>i. Belum optimalnya Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan |



| Masalah Pokok                           | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya<br>Pertumbuhan Ekonomi | a. Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah Kecamatan yang ada<br>b. Belum optimalnya produktivitas sektor unggulan<br>c. Tingkat inflasi juga berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita | a. Minimnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Tengah yang mengakibatkan rendahnya pengeluaran per kapita di Sumba Tengah<br>b. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB<br>c. Rendahnya pemanfaatan destinasi wisata yang potensial untuk pengembangan pariwisata daerah<br>d. Rendahnya cakupan layanan pembinaan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif<br>e. Belum maksimalnya ketersediaan alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku.<br>f. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan<br>g. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap<br>h. Rendahnya upaya RTP dalam melakukan diversifikasi usaha perikanan<br>i. Rendahnya pemanfaatan usaha ekonomi biru untuk mendukung diversifikasi usaha perikanan |
| Tingginya<br>Pengangguran Terbuka       | a. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal<br>b. Rendahnya ketersediaan sumber dayamanusia yang berkualitas                                                                                                                                                   | a. Keterbatasan lapangan usaha formal sehingga menimbulkan ketergatungan kerja di kabupaten- kabupaten sekitarnya khususnya di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya<br>b. Rendahnya ketersediaan tenaga kerja bersertifikat.<br>c. Belum optimalnya Balai Latihan Kerja<br>d. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja<br>e. Masih lemahnya kapasitas tenaga kerja lokal yang dapat bersaing di dunia kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| Masalah Pokok                                                         | Masalah                                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup                                 | a. Ketahanan pangan                                                                                             | <div><div>b. Belum adanya perencanaan ketahanan pangan yang berketahanan iklim</div><div>c. Rendahnya tingkat kemandirian pangan daerah. (Diversifikasi pangan)</div><div>d. Belum optimalnya cadangan pangan daerah</div><div>e. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.</div><div>f. Rendahnya Tingkat kepedulian pelestarian ekologi, air dan pangan</div><div>g. 61 % wilayah Kabupaten Sumba Tengah berada pada status rentan perubahan iklim</div><div>h. Kabupaten Sumba Tengah memiliki indeks ketahanan pangan dengan kategori tahan.</div><div>i. Kabupaten Sumba Tengah memiliki prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang berada diatas capaian Provinsi akan tetapi masih berada dibawah capaian nasional</div></div> |
|                                                                       | c. Kualitas lingkungan                                                                                          | <div><div>a. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup</div><div>b. Rendahnya optimalisasi pengelolaan sampah</div><div>c. Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan</div><div>d. Minimnya upaya perlindungan mata air dna pengelolaan Daerah Aliran Sungai</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kemampuan fiskal daerah dan tata kelola pemerintah yang belum optimal | <div><div>a. Rendahnya kemampuan fiskal daerah</div><div>b. Belum optimalnya tata Kelola pemerintah</div></div> | <div><div>a. Rendahnya Hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan</div><div>b. Kurangnya Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi daerah.</div><div>c. Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</div><div>d. Belum optimalnya Persentase Anak Uia 0-17 Tahun yang memiliki</div><div>e. Rendahnya persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan</div><div>f. Belum tersedianya Profil Kependudukan</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Masalah Pokok                                                       | Masalah                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                               | <div><div>g. Rendahnya persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan (Integrasi data antar OPD terkait data kependudukan)</div><div>h. Belum tersedianya Profil Kependudukan (Penyajian data kependudukan)</div><div>i. Rendahnya Hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belum meratanya pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang daerah | <div><div>a. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pelayanan dasar</div><div>b. Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang perlu dioptimalkan</div></div> | <div><div>a. Minimnya ketersediaan infrastruktur layanan dasar</div><div>b. Rendahnya layanan infrastruktur dasar dalam mendukung Pembangunan sosial budaya dan ekonomi</div><div>c. Rendahnya ketersediaan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur publik dan pendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya</div><div>d. Rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang</div><div>e. Belum optimalnya luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.</div><div>f. Masih ada rumah tangga belum terlayani oleh akses air minum.</div><div>g. Belum optimalnya capaian tingkat kemantapan jalan kabupaten.</div><div>h. Belum optimalnya pemanfaatan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo terhadap Perangkat Daerah</div><div>i. Rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang</div><div>j. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni</div><div>k. Rendahnya Kinerja Lalu Lintas</div><div>l. Belum tersedianya sarana prasarana</div></div> |



| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | angkutan perkotaan di Sumba Tengah<br>m. Belum adanya prasarana transportasi konektifitas wilayah seperti halte dan terminal<br>n. Belum maksimalnya Tingkat Ketersediaan Aset Gedung /Bangunan Milik Daeah dalam Kondisi Baik |

Sumber Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

2.6.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

2.6.2.1. Isu Strategis Wilayah Bali Nusa Tenggara dalam RPJPN 2025-2045

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan pengembangan sentra komoditas unggulan di Wilayah NTT belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan ekonomi wilayah. Nilai IPEI Provinsi NTT menduduki peringkat terendah ke- 3 secara nasional disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan belum terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan akibat terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat tersebut.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), serta kawasan pengembangan komoditas unggulan seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), di Wilayah Nusa Tenggara belum mampu memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya karena belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kawasan-kawasan yang dikembangkan. Faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut, yaitu kualitas SDM khususnya dalam keterampilan teknologi pengolahan.

Pengembangan koridor pariwisata khususnya di Wilayah NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang telah dikembangkan sejak 2017 dan menjadi prioritas nasional di Wilayah DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun demikian, keterhubungan pembangunan pariwisata

dalam koridor pariwisata Wilayah Bali- Nusa Tenggara belum optimal dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Wilayah Nusa Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah wisatawan Wilayah Bali yang lebih tinggi (8.1 juta wisatawan Nusantara dan 2.2 juta wisatawan mancanegara) apabila dibandingkan dengan Wilayah Nusa Tenggara (1.0 juta wisatawan Nusantara dan 61 ribu wisatawan mancanegara di Provinsi NTB, 744 ribu wisatawan Nusantara dan 58 ribu wisatawan mancanegara di Provinsi NTT). Hal ini dapat disebabkan antara lain karena konektivitas wilayah yang menghubungkan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik di Wilayah Nusa Tenggara sehingga wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali, sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di Wilayah Nusa Tenggara juga terkendala terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata. Potensi pariwisata juga belum didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah khususnya di Provinsi NTB dan Provinsi NTT.

#### **2.6.2.2. Telaah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah**

Perda Nomor 11 Tahun 2020 merupakan acuan regulasi dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk memberikan gambaran umum kondisi ruang wilayah, pola ruang dan struktur ruang dalam pemanfaatan wilayah untuk kegiatan pembangunan.

Dengan acuan RTRW dimaksud telah digambarkan pada bagian awal kondisi ruang wilayah Sumba Tengah yang dalam peruntukannya mengacu pada pola dan struktur ruang yang dalam kebijakan pemanfaatan ruang akan didukung dengan dokumen rencana detail tata ruang sebagai lokus pembangunan sesuai peruntukannya.

#### **2.6.2.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumba Tengah**

KLHS Penyusunan RPJMD merupakan amanah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berbasis spasial dalam kaitan dengan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah dalam implementasi kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan dimaksud untuk memastikan keberlangsungan sumber daya, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu generasi masa kini serta generasi masa depan, sehingga pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kajian dimaksud maka dilakukan pembobotan dan skoring skala prioritas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana pada uraian sub bab ini.

#### **2.6.2.4. Telaah Dokumen Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Isu-isu strategis yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meliputi:

- Pembangunan Infrastruktur: Upaya untuk meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada pendidikan dan pelatihan



- untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja;
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pengembangan sektor- sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- Perlindungan Lingkungan dan Mitigasi Bencana: Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi terhadap bencana alam.

Beberapa isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meliputi:

- Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas di berbagai wilayah NTT;
- Pengembangan Sektor Pariwisata: NTT memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Pengembangan destinasi wisata unggulan dan peningkatan promosi pariwisata menjadi isu strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal;
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Isu ini mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, dimana dan kesehatan, termasuk upaya pengurangan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih baik;
- Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan: Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di NTT melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja juga menjadi fokus utama;
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mengingat kekayaan alam NTT, pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kreatif: Mendorong peningkatan investasi dari sektor swasta dan mengembangkan ekonomi kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendiversifikasi perekonomian lokal.

#### **2.6.2.5. Telaah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba**

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur. Luas Pulau Sumba mencapai 10.710 km<sup>2</sup> dengan wilayah tertinggi Gunung Wanggameti. Kepadatan penduduk di Pulau Sumba masih sangat rendah yaitu 61 jiwa/km<sup>2</sup>. Pulau Sumba memiliki sumber daya alam dengan potensi wisata yang sangat besar yang sebagian besar berupa pantai serta padang rumput. Selain itu, luasnya wilayah Sumba membuat sebagian besar masyarakat Sumba memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pulau Sumba sudah memiliki sarana dan prasarana transportasi berupa pelabuhan dan bandara untuk



dapat terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Pulau Sumba termasuk ke dalam salah satu wilayah tertinggal di Indonesia. Apabila dilihat dari aspek sosial masyarakat di Pulau Sumba, keempat kabupaten memiliki nilai rata- rata indikator penilaian aspek sosial yang cukup rendah. Dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.21. Indikator Penilaian Aspek Sosial



Meskipun menghadapi tantangan ketertinggalan pembangunan yang cukup besar, tetapi Pulau Sumba memiliki potensi sektor primer yang tinggi, antara lain:

- a. Pertanian padi dan jagung khususnya di Kabupaten Sumba Tengah yang menjadi calon lokasi Food Estate, perkebunan kopi dan kelapa terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Peternakan terutama kuda Sandlewood, sapi, dan babi khususnya di Kabupaten Sumba Timur; dan
- c. Perikanan yang tersebar di seluruh wilayah, terutama di SKPT Sumba Timur
- d. Peta sektor pengembangan pulau Sumba sebagai berikut.

Gambar 2.22. Peta sektor pengembangan pulau Sumba



Berdasarkan Gambar tersebut dapat terlihat bahwa seluruh kabupaten di Pulau Sumba memiliki potensi sektor primer berupa pertanian, perkebunan dan peternakan. Sektor pertanian dan perkebunan di Pulau Sumba rata-rata menghasilkan beberapa komoditas diantaranya padi, jagung, kopi, jambu mete, pinang dan tembakau. Sedangkan untuk sektor peternakan dan perikanan, komoditas yang dihasilkan adalah sapi, kuda, babi dan jenis perikanan tangkap.

**Gambar 2.23. Isu Strategis Aspek Sosial, Ekonomi, Sarpras dan Kelembagaan**



Isu strategis yang diperoleh dari aspek sosial adalah rendahnya kualitas SDM lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Pulau Sumba. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam indikator penilaian terkait aspek sosial dimana hampir setiap indikator tersebut memiliki nilai yang rendah dan berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Diantara indikator yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas SDM adalah IPM, HLS dan RLS. Untuk meningkatkan kualitas SDM, maka pendidikan merupakan sektor paling utama yang harus diperbaiki.

Untuk aspek ekonomi, isu strategis yang didapatkan adalah belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah sebagai penggerak perekonomian di Pulau Sumba. Dengan tingginya potensi sektor primer yang dimiliki Pulau Sumba, perlu adanya upaya pengoptimalan potensi tersebut sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Aspek sarana dan prasarana memiliki dua isu strategis yang perlu dipertimbangkan, yaitu rendahnya ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan permukiman dalam pemenuhan pelayanan dasar di Pulau Sumba, serta rendahnya konektivitas dan telekomunikasi dalam mendukung perekonomian di Pulau Sumba. Sarana pelayanan dasar merupakan sarana yang harus dipenuhi kebutuhannya di setiap wilayah untuk membantu keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan adanya peningkatan sarana pelayanan dasar, maka diharapkan taraf hidup masyarakat di Pulau Sumba akan meningkat.

Adapun konektivitas dan telekomunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mendukung perekonomian di suatu wilayah terutama untuk Pulau Sumba yang memiliki sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian pokok masyarakatnya. Peningkatan konektivitas ini akan membantu dalam berbagai bidang terutama bidang logistik. Sedangkan sarana prasarana telekomunikasi yang baik adalah hal yang wajib





dimiliki setiap daerah di zaman modern untuk dapat memberikan dan menerima informasi secara aktual dan mudah.

Aspek terakhir yang dijadikan pertimbangan dalam pengembangan Pulau Sumba adalah aspek kelembagaan. Isu strategis yang didapatkan pada aspek ini adalah rendahnya kapasitas fiskal masing-masing wilayah di Pulau Sumba. Kapasitas fiskal yang tinggi sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas di Pulau Sumba sebagai salah satu rencana pengembangan Pulau Sumba.

Gambar 2.24. Sektor Unggulan, Potensial, Berkembang dan Tertinggal



Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 38,81% sebagai penggerak ekonomi utama di Kabupaten Sumba Tengah dengan komoditas unggulan sub sektor tanaman pangan seperti Jagung dan Kedelai. Sementara itu sub-sektor perkebunan memiliki potensi yaitu Jambu Mete (produksi sebesar 379,40 ton), Kopi (produksi sebesar 341,92 ton) dan Kelapa (produksi sebesar 623,68 ton). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu didorong pengembangannya agar dapat meningkatkan produktifitas dan memperhatikan keterkaitan secara hulu-hilir, didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi agar dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah memiliki total daya tarik wisata (DTW) sebanyak 45 lokasi serta TN Manupeu Tanah Daru yang merupakan taman nasional terluas di Pulau Sumba namun kontribusi sektor akomodasi dan makan minum masih rendah hanya sebesar 0,09% sehingga perlu optimalisasi pengembangan pariwisata lokal dalam mendukung perekonomian.

Kabupaten Sumba Tengah. Sektor pertanian dan sektor pertambangan sebagai penggerak utama perekonomian di Provinsi NTT dengan kontribusi sebesar 28,51% merupakan sektor yang telah dikembangkan secara optimal. Sedangkan sektor pariwisata yang hanya berkontribusi 0,50% merupakan sektor yang belum dikembangkan secara optimal pada seluruh kabupaten di Pulau Sumba.



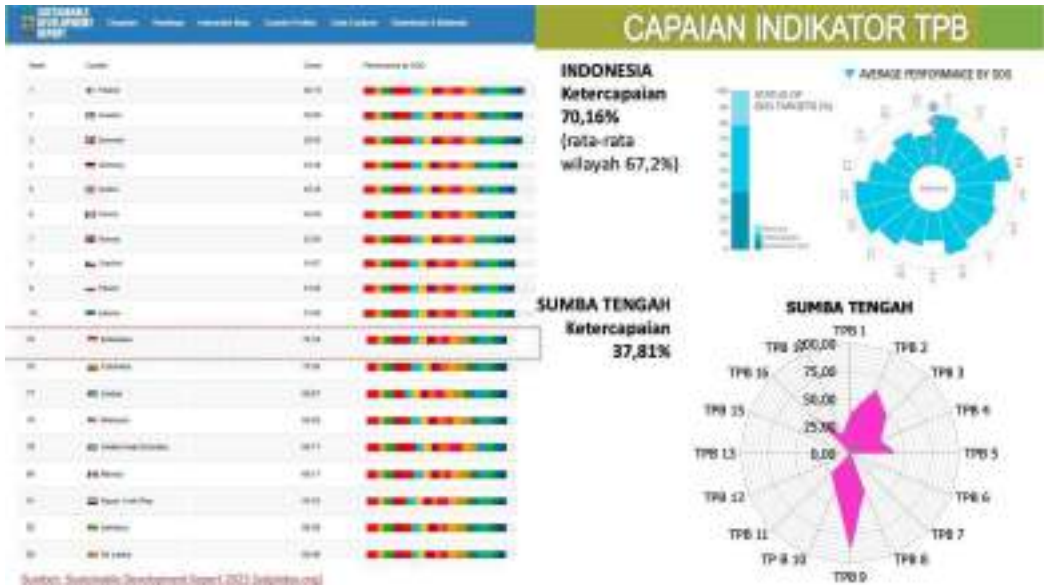


Berdasarkan pentahapan dan hasil analisis, tema konsep pengembangan Pulau Sumba dibagi menjadi 4 tema yang berbeda berdasarkan potensi unggulan dari masing-masing kabupaten. Adapun tema pengembangan Kabupaten Sumba Tengah : “Sustainable Integrated Farming Area and Agro- Edutourism” masing- masing kabupaten adalah sebagai berikut.

- a. Supporting kebutuhan pangan untuk supply lokasi pariwisata di Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya;
- b. Daya tarik wisata berbasis agro-tourism serta pengembangan industri produk komoditas lokal berbasis agro;
- c. Supporting pasokan EBT yang dapat dioptimalkan sebagai pasokan energi di Pulau Sumba untuk menunjang kegiatan ekonomi.
- d. Konsep pengembangan Kabupaten Sumba Tengah dalam periode 2021-2041 diarahkan untuk Sustainable Integrated Farming Area and Agro-Edu tourism melalui berbagai strategi percepatan pembangunan terintegrasi yang dibagi kedalam empat tahapan pembangunan. Tahapan pertama merupakan tahapan improvement yang dimulai dari tahun 2021-2025. Tahapan ke dua merupakan tahapan development yang dimulai pada tahun 2026- 2030. Tahapan ke tiga merupakan tahapan integration yang dimulai pada tahun 2031-2035. Sedangkan tahapan ke empat merupakan tahapan expansion yang dimulai pada tahun 2035- 2041. Adapun penjelasan untuk strategi percepatan pembangunan terintegrasi Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut:
  1. Strategi Pengembangan dan Hilirisasi Pertanian Kawasan Sentra Produksi Pangan. Strategi ini berfokus pada pengembangan dan hilirisasi pertanian dalam mendukung sektor pertanian sebagai prime- mover kab Sumba Tengah, sehingga dapat mengadaptasi konsep integrated agro- tourism and integrated agro-industry;
  2. Strategi Pengembangan Pariwisata berbasis Agro-Edu tourism Strategi ini berfokus pada pengembangan agro-edu tourism dengan memadukan kawasan pertanian/ food estate di Sumba Tengah untuk dikembangkan menjadi salah satu atraksi wisata di kawasan pertanian (sawah/ ladang/ ranch) yang sekaligus memberikan edukasi kepada para wisatawan.

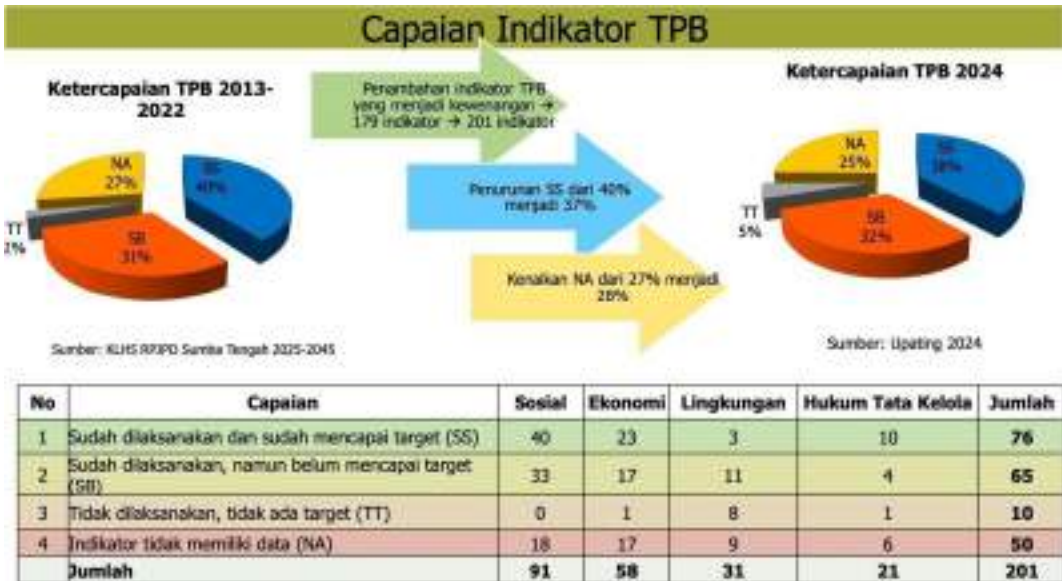


Gambar 2.25. Capaian Indikator TPB



Gambaran perbandingan capaian TPB antara Indonesia secara keseluruhan dan Kabupaten Sumba Tengah dalam data terkait capaian TPB di Sumba Tengah sebagai berikut. Capaian TPB Indonesia dan Sumba Tengah. Capaian TPB Indonesia secara keseluruhan berada di angka 70,16%, yang artinya Indonesia telah mencapai lebih dari 70% dari target SDGs. Ini menunjukkan bahwa Indonesia secara umum telah melakukan upaya signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Capaian TPB Kabupaten Sumba Tengah jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu hanya 37,81%. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi di Kabupaten Sumba Tengah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.26. Perbandingan Capaian Indikator TPB Indonesia dan Sumba Tengah





Tabel 2.59. Daftar Panjang Isu Strategis

| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                                                                               | Kriteria |    |     |    |    | Total Skor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|----|------------|
|     |                                                                                                                                                            | I        | II | III | IV | V  |            |
| 1   | Optimalisasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Aksesibilitas Pendidikan secara Berkelanjutan                                                    | 10       | 9  | 9   | 10 | 10 | 48         |
| 2   | Optimalisasi pemerataan distribusi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan                                                                                 | 10       | 8  | 7   | 10 | 7  | 42         |
| 3   | Pemerataan aksesibilitas pendidikan secara berkelanjutan                                                                                                   | 10       | 9  | 10  | 8  | 8  | 45         |
| 4   | Optimalisasi pengembangan pelayanan daerah dan perpustakaan digital                                                                                        | 3        | 6  | 4   | 4  | 3  | 20         |
| 5   | Pemerataan Sarana dan Prasarana penunjang Perpustakaan                                                                                                     | 3        | 5  | 4   | 4  | 3  | 19         |
| 6   | Peningkatan akses dan standar pelayanan dasar kesehatan                                                                                                    | 7        | 8  | 8   | 7  | 6  | 36         |
| 7   | Penguatan kesadaran masyarakat dalam hidup pola bersih dan sehat                                                                                           | 6        | 5  | 7   | 8  | 6  | 32         |
| 8   | Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                               | 7        | 6  | 7   | 8  | 4  | 30         |
| 9   | Optimalisasi pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah | 10       | 9  | 10  | 9  | 9  | 38         |

Sumber Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                                    | Kriteria |    |     |    |   | Total Skor |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|---|------------|
|     |                                                                                                                 | I        | II | III | IV | V |            |
| 10  | Pengendalian dan penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah | 8        | 7  | 8   | 5  | 7 | 35         |
| 11  | Akselerasi penyediaan air baku, air tanah, dan peningkatan jaringan irigasi                                     | 8        | 7  | 6   | 5  | 7 | 33         |
| 12  | Optimalisasi peningkatan akses Air Minum                                                                        | 6        | 7  | 5   | 4  | 7 | 29         |
| 13  | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung Pembangunan sosial budaya dan ekonomi                  | 7        | 6  | 5   | 8  | 7 | 33         |
| 14  | Peningkatan area kawasan perumahan dan pemukiman yang layak huni                                                | 7        | 5  | 6   | 8  | 9 | 35         |
| 15  | Percepatan penanganan kawasan kumuh                                                                             | 6        | 7  | 5   | 8  | 7 | 33         |
| 16  | Percepatan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                     | 5        | 4  | 6   | 5  | 4 | 24         |
| 17  | Optimalisasi penetapan Tanah Ulayat Daerah                                                                      | 5        | 4  | 3   | 5  | 3 | 20         |
| 18  | Percepatan optimalisasi sinkronisasi perencanaan penggunaan Tanah                                               | 5        | 6  | 3   | 7  | 4 | 25         |
| 19  | Optimalisasi Pengentasan Desa Tertinggal                                                                        | 8        | 7  | 6   | 7  | 4 | 32         |
| 20  | Peningkatan akses kerjasama antar Desa                                                                          | 7        | 5  | 3   | 5  | 7 | 27         |
| 21  | Optimalisasi Penguatan Status Desa Mandiri                                                                      | 6        | 5  | 7   | 8  | 6 | 32         |
| 22  | Penguatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa                                                                     | 6        | 7  | 6   | 6  | 7 | 32         |
| 23  | Optimalisasi percepatan kinerja lalu lintas                                                                     | 5        | 4  | 3   | 5  | 6 | 27         |
| 24  | Pengembangan Jaringan Transportasi Umum yang optimal dan pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah     | 10       | 9  | 7   | 8  | 6 | 40         |
| 25  | Optimalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi                                                                  | 6        | 7  | 8   | 7  | 8 | 36         |





| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                                                                                     | Kriteria |    |     |    |   | Total Skor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|---|------------|
|     |                                                                                                                                                                  | I        | II | III | IV | V |            |
|     | konektivitas wilayah                                                                                                                                             |          |    |     |    |   |            |
| 26  | Optimalisasi pemanfaatan akses internet tingkat Perangkat Daerah dan Peningkatan Kapasitas SDM perihal teknologi informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat | 7        | 6  | 6   | 5  | 7 | 31         |
| 27  | Akselerasi Percepatan peningkatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik                                                                                          | 6        | 5  | 7   | 6  | 7 | 31         |
| 28  | Optimalisasi pemanfaatan Data Statistik dalam menunjang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                              | 7        | 5  | 6   | 8  | 7 | 33         |
| 29  | Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas                                                                                                                | 10       | 9  | 8   | 10 | 8 | 45         |
| 30  | Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengembangan Teknologi Informasi                                                                                | 6        | 7  | 8   | 6  | 7 | 34         |
| 31  | Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 8        | 8  | 7   | 9  | 7 | 39         |
| 32  | Peningkatan database dan tata kelola layanan dasar administrasi kependudukan                                                                                     | 6        | 7  | 8   | 6  | 7 | 34         |
| 33  | Optimalisasi upaya penguatan fondasi ketahanan sosial dan budaya                                                                                                 | 10       | 9  | 9   | 8  | 7 | 43         |
| 34  | Optimalisasi penanganan dan perlindungan PMKS yang terpadu                                                                                                       | 8        | 7  | 6   | 9  | 8 | 38         |
| 35  | Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri                                                                                                    | 8        | 7  | 9   | 8  | 7 | 39         |
| 36  | Optimalisasi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan                                                                                     | 7        | 8  | 6   | 7  | 8 | 36         |
| 37  | Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan                                                                                             | 6        | 4  | 5   | 6  | 7 | 28         |
|     | Optimalisasi Peningkatan Kualitas penetapan                                                                                                                      |          |    |     |    |   |            |



| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                    | Kriteria |    |     |    |   | Total Skor |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|---|------------|
|     |                                                                                                 | I        | II | III | IV | V |            |
| 38  | Kampung KB dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk                     | 5        | 6  | 8   | 7  | 5 | 31         |
| 39  | Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelestarian Cagar Budaya                                 | 6        | 7  | 6   | 7  | 6 | 32         |
| 40  | Peningkatan peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah            | 8        | 7  | 5   | 6  | 8 | 34         |
| 41  | Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan                        | 4        | 3  | 4   | 3  | 4 | 19         |
| 42  | Peningkatan sarana prasarana kearsipan                                                          | 4        | 4  | 3   | 5  | 6 | 22         |
| 43  | Peningkatan pengelolaan kearsipan dengan memanfaatkan teknologi                                 | 5        | 4  | 4   | 4  | 5 | 22         |
| 44  | Peningkatan manajemen dan sistem kepegawaian secara profesional                                 | 6        | 7  | 8   | 6  | 8 | 35         |
| 45  | Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional                                                       | 7        | 6  | 8   | 7  | 6 | 34         |
| 46  | Optimalisasi Pemanfaatan Data Statistik dalam perencanaan pembangunan daerah                    | 6        | 7  | 7   | 6  | 7 | 33         |
| 47  | Optimalisasi integrasi statistik data sektoral                                                  | 7        | 6  | 8   | 6  | 7 | 34         |
| 48  | Peningkatan pengelolaan data Aset Gedung/Bangunan Milik dengan melakukan inventarisasi bertahap | 6        | 5  | 6   | 7  | 6 | 30         |
| 49  | Optimalisasi peningkatan pendapatan Asli Daerah                                                 | 6        | 7  | 5   | 4  | 3 | 25         |
| 50  | Percepatan pemahaman masyarakat perihal isu kesetaraan gender                                   | 4        | 5  | 7   | 6  | 3 | 25         |
| 51  | Optimalisasi pemanfaatan data gender oleh Perangkat Daerah                                      | 6        | 5  | 4   | 7  | 5 | 27         |
| 52  | Optimalisasi hak perempuan dan anak                                                             | 7        | 6  | 8   | 6  | 7 | 34         |
| 53  | Pengembangan Potensi Kabupaten Layak Anak                                                       | 7        | 8  | 6   | 7  | 8 | 36         |
| 54  | Akselerasi Percepatan ketahanan pangan yang mendukung ketahanan iklim dan pelestarian ekologi   | 9        | 10 | 9   | 9  | 7 | 44         |



| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                                | Kriteria |    |     |    |    | Total Skor |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|----|------------|
|     |                                                                                                             | I        | II | III | IV | V  |            |
| 55  | Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang bergizi                                                   | 7        | 6  | 7   | 8  | 6  | 34         |
| 56  | Percepatan penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                   | 7        | 8  | 8   | 7  | 7  | 38         |
| 57  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang adaptif terhadap Perubahan Iklim                                 | 10       | 9  | 10  | 8  | 10 | 57         |
| 58  | Percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan                                                 | 9        | 8  | 8   | 7  | 8  | 40         |
| 59  | Optimalisasi Manajemen Pengelolaan limbah dan sampah oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha | 7        | 8  | 6   | 7  | 8  | 36         |
| 60  | Percepatan pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana                                                       | 7        | 6  | 8   | 7  | 7  | 35         |
| 61  | Optimalisasi sistem peringatan dini bencana pada wilayah rawan bencana                                      | 7        | 7  | 8   | 7  | 8  | 37         |
| 62  | Penguatan sistem pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                       | 4        | 3  | 5   | 4  | 4  | 20         |
| 63  | Penguatan Ketersediaan Koperasi Berkualitas                                                                 | 6        | 7  | 8   | 6  | 7  | 34         |
| 64  | Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro                                                             | 7        | 6  | 8   | 6  | 7  | 34         |
| 65  | Peningkatan kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro                                        | 6        | 7  | 6   | 8  | 7  | 34         |
| 66  | Optimalisasi Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif                                                         | 8        | 5  | 6   | 8  | 6  | 34         |
| 67  | Peningkatan Kompetensi Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata                                                      | 8        | 7  | 7   | 6  | 8  | 36         |
| 68  | Penguatan pengelolaan kawasan wisata dan promosi wisata daerah                                              | 9        | 9  | 9   | 7  | 8  | 42         |
| 69  | Optimalisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian                                                      | 6        | 4  | 5   | 6  | 7  | 28         |
| 70  | Penanganan Produktivitas Pertanian Pasca Panen                                                              | 6        | 7  | 8   | 7  | 8  | 36         |
| 71  | Percepatan peningkatan produktivitas populasi                                                               | 6        | 4  | 5   | 6  | 7  | 28         |



| NO. | Daftar Panjang Isu Strategis                                                                                                | Kriteria |    |     |    |   | Total Skor |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----|---|------------|
|     |                                                                                                                             | I        | II | III | IV | V |            |
|     | ternak                                                                                                                      |          |    |     |    |   |            |
| 72  | Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat sektor perikanan                                                                       | 8        | 7  | 8   | 7  | 7 | 37         |
| 73  | Pengembangan usaha ekonomi biru untuk diversifikasi usaha pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan                   | 8        | 8  | 7   | 8  | 9 | 40         |
| 74  | Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan dengan berdasarkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja | 6        | 7  | 8   | 9  | 8 | 38         |
| 75  | Pengembangan Balai Latihan Kerja                                                                                            | 7        | 6  | 7   | 6  | 8 | 34         |
| 76  | Optimalisasi perluasan lapangan pekerjaan                                                                                   | 9        | 7  | 7   | 7  | 8 | 38         |
| 77  | Optimalisasi peningkatan Industri melalui Percepatan Pembangunan Industri Kabupaten Sumba Tengah                            | 10       | 9  | 8   | 7  | 6 | 40         |
| 78  | Optimalisasi daya saing industri melalui peningkatan penguasaan kemampuan SDM                                               | 6        | 8  | 7   | 6  | 9 | 36         |
| 79  | Akselerasi pengembangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan                                                           | 7        | 7  | 8   | 7  | 6 | 35         |

Sumber Data KLHS RPJMD Tahun 2025-2029





## BAB III

### VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### 3.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Rumusan visi dapat dimaknai juga sebagai arah pembangunan atau suatu kondisi masa depan yang ingin dicapai baik jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan itu perumusan visi perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah harus mempunyai keterkaitan dan muatan substansi yang selaras karena merupakan satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan implementasi periode pertama RPJPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2045 yang mengusung visi : “Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala Yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan mempedomani visi RPJPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045 sebagaimana di atas, serta memperhatikan rumusan visi dan misi RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTT 2025-2029.

Rumusan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah akan diperlakukan sebagai arahan bagi pelaksanaan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 – 2029. Sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan, maka rumusan Rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Tengah sehingga terarah pada upaya-upaya nyata yang sistematis, terstruktur dan terukur guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

***“Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”***

Dalam rangka membangun konsistensi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka rumusan visi dan misi RPJMD Sumba Tengah juga harus pula merefleksikan pula visi dan misi yang telah tertuang dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2045 baik pada tingkat Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, maupun Nasional. Proses sinkronisasi visi dan misi yang lintas jenjang pemerintahan dan lintas periode perencanaan ini bersifat teknokratik; partisipatif; politis; atas-bawah dan bawah-atas; holistik-tematik; integratif; dan spasial.



| RPJP Nasional<br>(2025 – 2045) | RPJP Provinsi<br>(2025 – 2045)      | RPJP Sumba Tengah<br>(2025 – 2045)                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indonesia Emas 2045            | NTT Mandiri, Maju dan Berkelanjutan | Terwujudnya Sumba Tengah yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 |

Pemahaman yang dapat dibangun dari rumusan Visi jangka menengah Kabupaten Sumba Tengah sebagai terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera sebagai berikut :

Tana Waikanena, Loku Waikalala adalah moto yang tertulis dalam lambang daerah Kabupaten Sumba Tengah, melambangkan kesuburan, kekayaan, dan kemakmuran sumber daya alam Kabupaten Sumba Tengah yang melingkupi tanah dan air. Sumba Tengah sebagai Tana Waikanena, Loku Waikalala bermakna Sumba Tengah sebagai tanah penuh harapan dan atau negeri yang menjanjikan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan bagi masyarakat.

Mendasari dan menyemangati ikhtiar masyarakat dan daerah demikian seterusnya apa yang disebut pembangunan sebagai rangkaian aktivitas untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan masyarakat dan daerah. Tana Waikanena, Loku Waikalala adalah keseluruhan kekayaan yang akan dimanfaatkan melalui proses pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah Sumba Tengah.



**Mandiri** menekankan pada kesiapan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Masyarakat Sumba Tengah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sederhana dan sejajar dengan daerah lain. Dengan kata lain, mandiri adalah kemampuan kolektif pemerintah dan masyarakat Sumba Tengah untuk melaksanakan pembangunan, memanfaatkan Tana Waikanena, Loku Waikalala sebagai warisan dan kekayaan abadi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah.

**Maju** adalah kata kerja (verba) yang mengandung arti bergerak ke depan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam ukuran kualitas dan kuantitas. Kekuatan utama masyarakat yang maju adalah pendidikan, kesehatan serta pranata sosial dan hukum yang efektif. Dalam tataran fungsional, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif, sehat, adaptif dan adil. Cita-cita mewujudkan Masyarakat Sumba Tengah yang maju harus dibangun melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas yang inklusif serta pranata sosial dan hukum yang efektif untuk menciptakan keadilan. Semua lapisan atau golongan masyarakat Sumba Tengah harus mengalami transformasi secara kolektif melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas dan inklusif serta pranata sosial dan hukum yang efektif, sehingga semua cerdas, kreatif, inovatif, sehat dan merasakan keadilan sebagai wujud dari Tana Waikanena, Loku Waikalala.

**Berkelanjutan** adalah bagian dari konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam perkembangannya, konsepsi pembangunan berkelanjutan tidak saja mencakup aspek lingkungan fisik dan lingkungan non fisik, tetapi prinsip utamanya adalah pemanfaatan sumber daya fisik dan non fisik harus memperhitungkan keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. Landasan utamanya adalah membangun kesadaran dan tanggung jawab etik secara kolektif untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Tersirat didalamnya adalah tanggungjawab untuk memelihara kelestarian dan merehabilitasi kerusakan lingkungan fisik dan non fisik, sehingga pemanfaatannya berkelanjutan.

Mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sumba Tengah harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*), baik keterkaitan ke depan maupun kebelakang. Kemajuan wilayah yang merata yang disertai ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kabupaten Sumba Tengah, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah yang merata dan berkeadilan. Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukkan pada kinerja ekonomi hijau



dan ekonomi biru (green and blue economic performance) yang terus terjaga pada level yang meningkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kabupaten Sumba Tengah sebagai lumbung pangan khususnya sebagai lokasi food estate dan sektor peternakan. Demikian juga kedudukan Sumba Tengah sebagai bagian dari Pulau Sumba yang telah ditetapkan sebagai “Sumba Iconic Island”. Berkelanjutan di bidang sumber daya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Sumba Tengah yang semakin maju dan berdaya saing tinggi. Pada saat yang sama, konsep berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good and clean governance) pada setiap periode kepemimpinan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya pembangunan daerah Sumba Tengah menuju sejahtera.

**Sejahtera** adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sebagai pelaku dan penerima manfaat dari seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik itu sendiri.

Tujuan pembangunan adalah mengupayakan kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial seperti rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan, kebutuhan mendapatkan penghargaan dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Dengan kesejahteraan lahir dan batin akan berdampak pada kualitas masyarakat Sumba Tengah sehingga dapat berkompetisi baik pada tingkat regional, nasional dan bahkan global. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2025-2029 sebagaimana telah dijabarkan di atas selanjutnya dicapai melalui 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan.

### 3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang diimplementasikan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan dukungan internal dan eksternal. Misi pembangunan tahun 2025-2029 dirumuskan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pembinaan keluarga;
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas demokrasi;
4. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;
5. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif-preventif;





6. Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

### **Penjelasan Misi :**

Secara filosofis, misi dipahami sebagai tahapan langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan rumusan visi yang telah ditetapkan. Sedangkan Visi RPJMD sendiri dirumuskan sebagai suatu tujuan bersama yang ingin dicapai pada suatu periode waktu tertentu dan selalu bersifat dinamis untuk pencapaian bersama visi yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Rumusan Misi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten Sumba Tengah ditetapkan guna memberikan kerangka dalam menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemebrintah Kabupaten Sumba Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan, guna mewujudkan visi bersama.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, kelemahan, peluang dan tantangan bahkan ancaman yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah.

Guna mewujudkan visi ***Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri Maju dan Berkelanjutan***, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sumba Tengah dengan penjelasan masing-masing misi sebagai berikut :

### **Misi I : Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani;**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sistem tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) secara berkelanjutan, penerapan prinsip good governance, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik.

Pemerintahan diarahkan untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengedepankan etika pelayanan, sikap profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Reformasi birokrasi dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.



**Misi II : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang cerdas terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pembinaan keluarga;**

Misi ini diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing guna mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang mampu menghadapi tantangan baik pada tingkat regional, nasional maupun tingkat global. Sekalipun secara geografis, Sumba tengah terletak jauh dari pusat pelayanan publik maupun pusat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, tapi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komitmen pelayanan publik baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, ditunjang oleh arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat, niscaya masyarakat Sumba Tengah siap menghadapi tantangan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, guna mewujudkan visi Sumba Tengah yang mandiri, maju dan berkelanjutan.

**Misi III : Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kualitas demokrasi;**

Definisi operasional:

Yang dimaksudkan oleh misi ini adalah upaya sistematis dan terus menerus untuk :

- Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terbebas dari gangguan sosial seperti konflik, kekerasan, atau keresahan warga;
- Meningkatkan upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas dan gangguan ketertiban umum melalui kehadiran aparat, sistem pengawasan, serta kesiapsiagaan darurat;
- Memperkuat proses partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak-hak politik;
- Meningkatkan cakupan dan akses kelompok rentan terhadap program-program jaminan sosial, bantuan sosial, dan layanan dasar guna mencegah dan mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial.

**Misi IV : Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;**

Misi ini menekankan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas fisik, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan rawan bencana, guna mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan risiko kebencanaan, melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan infrastruktur, dan pengelolaan risiko secara terpadu. Selain itu, misi ini mencakup komitmen terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup,



melalui konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan penguatan kesadaran ekologis masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi pendorong utama pembangunan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi di masa kini dan masa depan

**Misi V : Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif-preventif;**

Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan **layanan promotif** (peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas hidup sehat) dan **preventif** (pencegahan penyakit), yang diselenggarakan secara **terintegrasi antar sektor**, lintas program, serta berorientasi pada pendekatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan keluarga.

**Misi VI : Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif;**

Misi ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat jati diri masyarakat daerah melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan nilai-nilai sosial dan budaya lokal sebagai kekayaan dan kekuatan pembangunan. Identitas sosial budaya yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga kohesi sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat karakter dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Selain itu, misi ini menekankan pentingnya penyelenggaraan perlindungan sosial yang inklusif—yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Sistem perlindungan sosial juga harus adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan eksternal, seperti bencana, krisis ekonomi, dan perubahan iklim.

**Misi VII : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Sumba Tengah dikenal sebagai daerah lumbung pangan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, melalui kebijakan pemerintah pusat menetapkan Sumba Tengah sebagai daerah pengembangan *food estate* dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan nasional Indonesia. Disamping itu Sumba Tengah sebagai bagian dari Pulau Sumba Secara keseluruhan dikenal juga sebagai daerah dengan potensi sumberdaya energi baru terbarukan khususnya potensi energi matahari yang telah ditetapkan ke depan sebagai pemasok energi baru terbarukan untuk kebutuhan energi baik untuk tingkat regional maupun nasional melalui Keputusan Menteri ESDM No. 3051.K/30/MEM/2015 yang menetapkan Sumba secara keseluruhan sebagai “Sumba Iconic Island”.

Demikian pula Sumba Tengah dikenal sejak lama sebagai daerah gudang ternak bagi NTT, khususnya ternak sapi dengan potensi padang penggembalaannya yang sangat luas. Seluruh potensi padang penggembalaan dan ternak yang ada saat ini masih belum dioptimalkan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sumba tengah



secara keseluruhan melalui kebijakan pembangunan daerah yang tepat.

Sumba Tengah juga dikenal dengan pemandangan alamnya yang eksotis dan dapat dijadikan sebagai daya atraksi bagi wisatawan nasional maupun nnegara sebagai salah satu daerah destinasi wisata alam terbaik di Indonesia. Pengembangan potensi wisata ini diharapkan nantinya dapat diandalkan sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi baru tidak saja bagi Sumba Tengah tetapi juga bagi Sumba, termasuk NTT secara keseluruhan.

Seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh Sumba Tengah sebagai suatu anugerah Tuhan, saat ini harus dapat dimanfaatkan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat Sumba Tengah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyatakatnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumba Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan berkelanjutan, dalam suatu kesinambungan perwujudan Indonesia Emas 2045.

### **3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Perumusan 7 (tujuh) misi sebagai perwujudan dari langkah-langkah yang akan ditempuh guna pencapaian visi Sumba Tengah 2025-2030, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, agar terarah dan terfokus, efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran dalam setiap misi akan memberikan panduan bagi pelaksanaan segala urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah, didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Demikian pula sasaran merupakan rumusan dari kondisi yang direncanakan agar tujuan dapat tercapai, yaitu berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang didapat dari pencapaian output dan outcome program perangkat daerah tersebut.

Pencapaian output dan outcome pembangunan akan terpotret melalui indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dari upaya mencapai indikator makro pembangunan daerah. Penetapan indikator makro Kabupaten Sumba Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan dukungan untuk mencapai target indikator dimaksud di tengah tantangan kompetisi baik tingkat regional, nasional maupun tantangan tingkat global.





**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029**

| VISI : TERWUJUDNYA TANA WAIKANENA LOKU WAIKALALA YANG MANDIRI MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU SUMBA TENGAH SEJAHTERA                                      |                            |                                                                                                             |                                                       |                |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tujuan                                                                                                                                                  | Indikator Tujuan           | Sasaran                                                                                                     | Indikator Sasaran                                     | TARGET (Tahun) |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                             |                                                       | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Misi 1 : Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani                        |                            |                                                                                                             |                                                       |                |       |       |       |       |       |
| Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, berintegrasi dan adaptif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                                                                             |                                                       | 45             | 45,5  | 45,7  | 46    | 47    | 47    |
|                                                                                                                                                         |                            | Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur melalui pelaksanaan manajemen aparatur                   | Indeks Sistem Merit                                   |                |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                         |                            | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja                           | 60,25          | 60,30 | 60,55 | 60,40 | 60,45 | 60,50 |
|                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | 75             | 80    | 85    | 85,20 | 80,30 | 90    |
|                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                             | Opini BPK                                             | WTP            | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
|                                                                                                                                                         |                            | Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi                                                                       | Skor Survey Penilaian Integritas                      | 75             | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    |
|                                                                                                                                                         |                            | Terwujudnya Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,20           | 2,25  | 2,30  | 2,45  | 3,00  | 3,10  |



| VISI : TERWUJUDNYA TANA WAIKANENA LOKU WAIKALALA YANG MANDIRI MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU SUMBA TENGAH SEJAHTERA                              |                                                                                                                    |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tujuan                                                                                                                                          | Indikator Tujuan                                                                                                   | Sasaran                                                   | Indikator Sasaran                         | TARGET (Tahun)     |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                           |                                           | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pembinaan keluarga; |                                                                                                                    |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
| Misi 5 : Meningkatkan Kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif preventif;                                                 |                                                                                                                    |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing                                                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                         |                                                           |                                           | 64,48              | 65,07 | 65,66 | 66,25 | 66,84 | 67,43 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan | Harapan Lama Sekolah                      | 13,30              | 13,40 | 13,50 | 13,60 | 13,70 | 13,80 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                           | Rata – Rata Lama Sekolah                  | 7,76               | 8,09  | 8,42  | 8,75  | 9,08  | 9,41  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                           | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | 69,50 | 69,57 | 69,80 | 70,03 | 70,26 |
|                                                                                                                                                 | VISI : TERWUJUDNYA TANA WAIKANENA LOKU WAIKALALA YANG MANDIRI MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU SUMBA TENGAH SEJAHTERA |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
| Tujuan                                                                                                                                          | Indikator Tujuan                                                                                                   | Sasaran                                                   | Indikator Sasaran                         | TARGET (Tahun)     |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                           |                                           | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Misi 3 : Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kualitas demokrasi                                                                              |                                                                                                                    |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
| Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah                                                                                                | Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)                                                                                    |                                                           |                                           |                    |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | Meningkatnya rasa aman masyarakat                         | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas    | 74                 | 74,50 | 74,80 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                           | Indeks Rasa Aman                          | 100                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | Meningkatnya kualitas demokrasi                           | Indeks Demokrasi                          | 79,47              | 81,06 | 84,24 | 85,83 | 87,42 | 89,01 |



| VISI : TERWUJUDNYA TANA WAIKANENA LOKU WAIKALALA YANG MANDIRI MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU SUMBA TENGAH SEJAHTERA                                                                         |                                         |                                                              |                                                                    |                |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tujuan                                                                                                                                                                                     | Indikator Tujuan                        | Sasaran                                                      | Indikator Sasaran                                                  | TARGET (Tahun) |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                              |                                                                    | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;</b> |                                         |                                                              |                                                                    |                |        |        |        |        |        |
| Mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur yang berkualitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan                                                                     | Indeks Infrastruktur Daerah             |                                                              |                                                                    |                |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                         | Tersedianya akses jalan dalam kondisi baik                   | Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap                      | 41             | 44     | 46     | 49     | 52     | 55     |
|                                                                                                                                                                                            |                                         | Meningkatnya areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi | Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi | 67,64          | 68,77  | 69,89  | 71,02  | 72,15  | 73,28  |
|                                                                                                                                                                                            |                                         | Tersedianya rumah layak huni                                 | Laju pertumbuhan Rumah Layak Huni                                  | 100            | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                                                                                                                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |                                                              |                                                                    | 71,57          | 71,74  | 71,91  | 72,08  | 72,25  | 72,42  |
|                                                                                                                                                                                            |                                         | Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim  | Indeks Risiko Bencana                                              | 113,55         | 118,35 | 118,45 | 118,55 | 118,65 | 118,75 |



| VISI : TERWUJUDNYA TANA WAIKANENA LOKU WAIKALALA YANG MANDIRI MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU SUMBA TENGAH SEJAHTERA |                     |                                                                              |                                                            |                |        |         |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Tujuan                                                                                                             | Indikator Tujuan    | Sasaran                                                                      | Indikator Sasaran                                          | TARGET (Tahun) |        |         |        |        |        |
|                                                                                                                    |                     |                                                                              |                                                            | 2025           | 2026   | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   |
| <b>Misi 6 : Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif;</b>              |                     |                                                                              |                                                            |                |        |         |        |        |        |
| <b>Misi 7 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah;</b>                         |                     |                                                                              |                                                            |                |        |         |        |        |        |
| 1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan                                         | Pertumbuhan Ekonomi |                                                                              |                                                            | 5,25           | 5,5    | 5,8     | 6,2    | 6,6    | 7,0    |
|                                                                                                                    |                     | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produktif                     | Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | 645,77         | 671,52 | 675,824 | 723,02 | 748,77 | 774,52 |
|                                                                                                                    |                     |                                                                              | Kontribusi PDRB sektor Pariwisata                          | 2,5            | 2,7    | 2,72    | 2,75   | 3      | 3,5    |
|                                                                                                                    |                     | Meningkatnya kualitas iklim investasi                                        | Realisasi Investasi                                        | 2,5            | 2,6    | 2,9     | 3      | 4,5    | 5      |
| 2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat & daya saing daerah                                                       | Angka Kemiskinan    |                                                                              |                                                            | 29,90          | 28,96  | 28,02   | 27,08  | 26,14  | 25,20  |
|                                                                                                                    |                     | Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan                                 | Skor pola pangan harapan                                   | 75             | 80     | 85      | 90     | 95     | 95,5   |
|                                                                                                                    |                     |                                                                              | Indeks ketahanan pangan                                    | 70             | 75     | 80      | 85     | 90     | 95     |
|                                                                                                                    | Indeks Gini         |                                                                              |                                                            | 0,375          | 0,369  | 0,363   | 0,357  | 0,351  | 0,345  |
|                                                                                                                    |                     | Menurunnya masyarakat kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang Tertangani                            | 10             | 12     | 16      | 20     | 25     | 25     |
|                                                                                                                    |                     | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                           | Nilai Tukar Petani                                         | 101,45         | 101,94 | 102,43  | 102,92 | 103,41 | 103,91 |
|                                                                                                                    |                     |                                                                              | Nilai Tukar Nelayan                                        | 99,12          | 100,72 | 104,22  | 107,72 | 111,22 | 114,72 |





### **3.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

#### **3.2.1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029**

Strategi dan arah kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah yang diikuti oleh fokus dan sasaran kebijakan yang konkret untuk mencapai tujuan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah, sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan penahapan pembangunan daerah, konsep dan arah kebijakan RPJMD yang tergambar sebagai berikut :



**TABEL 3.2.**  
**PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN SUMBA TENGAH 2025- 2029**

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAHAP III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAHAP V (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAHAP V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Konsolidasi fondasi pembangunan daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan Pengembangan Sektor-Sektor Prioritas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Perluasan Pembangunan Ekonomi berbasis Hilirisasi Potensi Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Akselerasi pembangunan daerah secara terintegrasi dan Sinergi Antar Sektor Pembangunan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pemantapan fondasi transformasi melalui Inovasi dan Kolaborasi dalam mewujudkan <i>Tana Waikanena Loku Waikalala yang Sejahtera dan Berkelanjutan</i></b>                                                                                                                                                                    |
| <b>FOKUS DAN SASARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan,</li><li>• Penyusunan regulasi</li><li>• Penguatan layanan dasar yang berkualitas</li><li>• Penguatan infrastruktur kewilayahan yang berketahanan iklim</li><li>• Penguatan modal sosial, budaya yang inklusif</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata</li><li>• Peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses melalui peningkatan penguatan fondasi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas</li><li>• Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor prioritas daerah secara berkelanjutan</li><li>• Pengembangan potensi ekonomi daerah (pertanian, Peternakan, pariwisata dan UMKM serta energi baru terbarukan yang berkeadilan)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan klaster-klaster ekonomi pertanian, agroindustri dan pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, agroindustri, pariwisata dengan penekanan pada hilirisasi SDA, pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat,</li><li>• Percepatan kemandirian pangan, air dan energi dengan memanfaatkan potensi lokal, serta penguatan inovasi teknologi</li><li>• Percepatan penguatan modal sosial, budaya melalui pemajuan kebudayaan, peningkatan kualitas kelembagaan sosial ekonomi yang inklusif,</li><li>• Hilirisasi industri rumah tangga dan atau hilirisasi industri berskala besar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantapan layanan public dan layanan dasar yang berkualitas dan merata bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan teknologi digital dan integrasi sistem</li><li>• Pemantapan fondasi pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan, berkualitas, mudah diakses dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah</li><li>• Pemantapan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekologi, dan meningkatkan kualitas penataan ruang</li><li>• Pemantapan modal sosial, budaya melalui pemajuan kebudayaan, peningkatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inovasi Pembangunan daerah dengan teknologi digital dan system tata Kelola yang terintegrasi</li><li>• Penguatan kemitraan dan jejaring dalam Pembangunan daerah melalui pemberdayaan Masyarakat yang inklusif</li><li>• Hilirisasi potensi ekonomi daerah yang berkelanjutan</li></ul> |



|  |  |  |                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | kualitas kelembagaan sosial ekonomi yang berkeadilan. |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|



**Tabel 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

| MISI                                                                                                                                                      | STRATEGI                                                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1 :<br/>Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani</b>               | Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas pelayanan SDM aparatur</li><li>- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur</li><li>- Meningkatkan profesionalitas sistem birokrasi manajemen karir berbasis sinkronisasi regulasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           | 1. Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan Inovatif<br>2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang professional dan berjiwa melayani | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pelaporan kinerja berbasis elektronik</li><li>- Meningkatkan pelayanan publik hingga tingkat desa</li><li>- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik                                                                                                  | Penguatan integritas partai politik dan kapasitas masyarakat sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Penguatan lembaga, manajemen dan SDM pelayanan publik serta pengembangan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui manajemen pengembangan karir berbasis merit sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Misi 2 :<br/>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pembinaan keluarga</b> | Peningkatan kualitas pendidikan melalui metode dan proses belajar/mengajar yang responsif terhadap tuntutan peningkatan daya saing                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan mutu pembelajaran disekolah dengan penekanan penguatan ahlak, budi pekerti dan karakter</li><li>2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan</li><li>3. Percepatan pencapaian akses layanan pendidikan yang berkarakter,berkualitas dan merata</li><li>4. Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu</li><li>5. Penguatan budaya literasi untuk kreatifitas dan inovasi</li><li>6. Optimalisasi dan revitalisasi peran perpustakaan</li></ol> |
|                                                                                                                                                           | Peningkatan perluasan, pemerataan dan kualitas layanan Kesehatan Masyarakat                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan</li><li>2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan</li><li>3. Pemberian bantuan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan</li><li>4. Peningkatan akses pangan dan gizi bagi masyarakat</li></ol>                                                                                                                                                                                                                     |





| MISI                                                                                                                                                                                          | STRATEGI                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat melalui program perencanaan Pembangunan keluarga. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif</li><li>2. Peningkatan jumlah kelompok pusat informasi dan konseling remaja.</li><li>3. Penguatan peran keluarga melalui kelompok bina keluarga</li><li>4. Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan</li><li>5. Penurunan kekerasan berbasis gender serta peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak</li></ol> |
| <b>Misi 3 :<br/>Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kualitas demokrasi</b>                                                                                                                 | Penguatan sinergi aparat keamanan dengan masyarakat melalui sistem deteksi dini dan pelaporan berbasis komunitas         | Pembangunan sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa, pelibatan FKDM, Linmas, tokoh adat/agama, dan penguatan kapasitas Satpol PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               | Peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial melalui pendidikan masyarakat                                      | Revitalisasi kegiatan Siskamling, forum warga siaga, dan pelatihan ketahanan sosial berbasis komunitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                               | Penguatan kapasitas warga dan lembaga lokal dalam musyawarah publik dan proses pemilu                                    | Pengembangan forum musrenbang partisipatif, pendidikan politik warga, dan fasilitasi pemilu yang inklusif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               | Penguatan dialog lintas agama dan budaya serta lembaga keagamaan lokal                                                   | Penguatan FKUB, fasilitasi kegiatan lintas agama/budaya, dan festival sosial berbasis nilai lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | Perluasan cakupan program perlindungan sosial inklusif dan responsif gender                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Integrasi program perlindungan sosial berbasis data dan inklusif gender</li><li>2. Penguatan kolaborasi multipihak dan inovasi pembiayaan untuk memperkuat layanan jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                               | Optimalisasi pemanfaatan data tunggal dalam seluruh siklus kebijakan                                                     | Penguatan tata kelola data sosial dan pemanfaatan data Tunggal sebagai acuan tunggal dalam perlindungan sosial daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Misi 4 :<br/>Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan</b> | Peningkatan pembangunan infrastruktur                                                                                    | Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan layanan simpul utama untuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan identifikasi dan data potensi unggulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                               | Peningkatan penyediaan akses jalan yang terhubung dan terkoneksi antar daerah                                            | Penyediaan akses jalan yang terhubung dan terkoneksi antar daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | Peningkatan sarana dan prasarana transportasi                                                                            | Peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk mobilisasi penumpang dan logistik di daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                               | Meningkatkan pelaksanaan reforma agraria dan perencanaan detail tata ruang di Sumba Tengah                               | Peningkatan pelaksanaan reformaasi agraria dan penuntasan Perencanaan Detail Tata Ruang Kabupaten Sumba Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| MISI | STRATEGI                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Meningkatkan penguatan pemberdayaan masyarakat                                                    | Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah                                                                                                                                                                       |
|      | Meningkatkan kualitas rumah layak huni sesuai karakteristik wilayah                               | Peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah                                                                                                                                     |
|      | Peningkatan akses listrik berbasis EBT                                                            | Optimalisasi akses listrik berbasis EBT;                                                                                                                                                                                          |
|      | Peningkatan pasokan energi                                                                        | Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan                                                                                                                |
|      | Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi                                                      | Optimalisasi jaringan telekomunikasi melalui peningkatan kualitas jaringan yang terintegrasi                                                                                                                                      |
|      | Peningkatan ketahanan air dan akses layanan air bersih                                            | Peningkatan ketahanan air melalui konservasi sumber air berbasis kearifan lokal dan peningkatan akses layanan air bersih dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari                                                      |
|      | Peningkatan layanan jaringan pengelolaan air limbah dan sanitasi layak                            | Peningkatan layanan jaringan pengelolaan limbah dan sanitasi layak yang ramah lingkungan                                                                                                                                          |
|      | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS)             | Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui peningkatan kesadaran perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman |
|      | Peningkatan kualitas air, udara dan ketutuoan lahan                                               | Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan menjaga kualitas dan pelestarian lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi lahan dan pengendalian perluasan lahan kritis.                           |
|      | Peningkatan pengelolaan lahan untuk kualitas lingkungan hidup                                     | Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan lahan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup                                                                                                |
|      | Peningkatan pembangunan sarana prasarana untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim              | Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan ketahanan bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim dan melalui penerapan teknologi yang handal untuk sistem peringatan dini                                                   |
|      | Peningkatan penguatan kelembagaan dan manajemen mitigasi bencana                                  | Penguatan kelembagaan dan manajemen mitigasi bencana                                                                                                                                                                              |
|      | Peningkatan perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ketangguhan bencana | Perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ketangguhan bencana                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |



| MISI                                                                                                            | STRATEGI                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 5 :</b><br><b>Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif-preventif</b> | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar melalui pemenuhan tenaga medis, sarana prasarana, dan akses yang merata | Pemerataan layanan kesehatan dasar berbasis wilayah prioritas, peningkatan SDM dan fasilitas kesehatan, serta integrasi intervensi gizi dan kesehatan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                 | Penguatan layanan promotif dan preventif berbasis masyarakat, serta sistem skrining kesehatan rutin                              | Penerapan deteksi dini penyakit melalui Posyandu, Puskesmas, dan layanan keliling serta penguatan edukasi kesehatan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Misi 6 :</b><br><b>Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif</b>  | Peningkatan sistem perlindungan sosial melalui bantuan sosial secara inklusif                                                    | Pengembangan integrasi sistem perlindungan sosial melalui bantuan sosial yang inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, melalui upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim |
|                                                                                                                 | Peningkatan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi lansia miskin dan disabilitas                                            | Peningkatan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | Peningkatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi                                                                 | Komitmen daerah untuk berpihak pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | Peningkatan pendidikan berbasis kerukunan antar etnis dan agama                                                                  | Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana                                                                                    | Meningkatkan pelayanan bantuan terhadap korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | Peningkatan pelayanan pangan masyarakat                                                                                          | Optimalisasi pelayanan pangan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | Peningkatan pemberdayaan perempuan dan peran perempuan diberbagai sektor                                                         | Optimalisasi upaya pemberdayaan perempuan melalui implementasi kebijakan responsif gender dan peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 | Peningkatan kelembagaan adat dan hak ulayat masyarakat                                                                           | Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 | Peningkatan ketahanan keluarga dan keterampilan keluarga                                                                         | Penguatan ketahanan keluarga dan kesiapan membangun keluarga serta peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| MISI                                                                                          | STRATEGI                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Peningkatan layanan penyediaan dokumen kependudukan                                                       | Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi penyediaan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran bagi masyarakat yang masih belum memiliki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Misi 7 :<br/>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah</b> | Percepatan peningkatan investasi daerah                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan iklim usaha dan kemudahan ijin investasi</li><li>2. Optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan perijinan secara elektronik untuk meningkatkan investasi</li></ol>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa berasal dari sektor unggulan daerah | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif</li><li>3. pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat</li><li>4. Meningkatkan layanan ekonomi kreatif</li></ol>                                                                                                                 |
|                                                                                               | Peningkatan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata</li><li>2. Perbaikan manajemen pemasaran objek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunikasi dan media sosial.</li><li>3. Pengembangan sarana dan prasarana dan aksesibilitas, atraksi wisata, amenities dan kesadaran sebagai daya tarik wisatawan secara berkelanjutan</li></ol> |
|                                                                                               | Penguatan kapasitas fiskal daerah                                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.</li><li>2. Optimalisasi perusahaan daerah untuk peningkatan penerimaan daerah.</li><li>3. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui kebijakan pajak opsen.</li><li>4. Pengintegrasian pungutan parkir kendaraan bermotor</li></ol>                                                                                                    |





| MISI | STRATEGI                                                                                                                   | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            | kedalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan jangkauan pemasaran produk usaha koperasi dan UMKM berbasis digital</li><li>2. Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM Promosi dan perluasa pasar produk UMKM</li></ol>                                                                                                                                                                         |
|      | Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai tambah produk sektor unggulan pangan, peternakan, pariwisata dan energi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dan peternakan</li><li>2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan</li><li>3. Percepatan realisasi kerjasama pemanfaatan potensi energi baru terbarukan</li><li>4. Penguatan industri daerah khususnya industri pengolahan produk sektor unggulan berskala rumah tangga dan industri kreatif lainnya</li></ol> |



### **3.2.2. Program – program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029**

Program prioritas daerah dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah program prioritas dan utama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tergambar sebagai berikut :



TABEL 3.4.

PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUMBA TENGAH 2025-2029

| VISI/MISI                                                                                                                         | TUJUAN |                                                                                                                                                         |        | SASARAN                                                                                                     | OUTCOME                                                                                                                                                        | INDIKATOR                        | PROGRAM PRIORITAS                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                               | (2)    |                                                                                                                                                         |        | (3)                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                            | (5)                              | (6)                                                     |
| <b>1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani</b> | 1.1.   | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, berintegrasi dan adaptif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) |        |                                                                                                             | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                 | Indeks Reformasi Birokrasi       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           |
|                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                         | 1.1.2. | Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur melalui pelaksanaan manajemen aparatur                   | Meningkatnya kompetensi, kinerja dan kesejahteraan aparatur melalui pelaksanaan manajemen aparatur                                                             | Indeks Sistem Merit              | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                              |
|                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                         | 1.1.2. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel responsif terhadap kebutuhan masyarakat | Nilai Akuntabilitas Kinerja      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           |
|                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT           |
|                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Opini BPK                        | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     |
|                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                         | 1.1.3. | Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi                                                                       | Meningkatnya integritas dan kepatuhan penyelenggara negara terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem pencegahan korupsi   | Skor Survey Penilaian Integritas | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |



| VISI/MISI                                                                                                                                                                                                                                                         | TUJUAN |                                                                         |        | SASARAN                                                                                                            | OUTCOME                                                                                                                                 | INDIKATOR                                             | PROGRAM PRIORITAS                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                               | (2)    |                                                                         |        | (3)                                                                                                                | (4)                                                                                                                                     | (5)                                                   | (6)                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 1.1.4  | Terwujudnya Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                                  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 1.1.5  | Terwujudnya perencanaan daerah yang terintegrasi, konsisten dan sinkron sebagai satu kesatuan perencanaan nasional | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                                                                    | Indeks Kualitas Perencanaan                           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH           |
| <b>Misi 2 :<br/>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pembinaan keluarga;<br/>Misi 5 :<br/>Meningkatkan Kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif preventif</b> | 2.1    | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing |        |                                                                                                                    | Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat                                                                            | Indeks Pembangunan Manusia                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 2.1.1  | Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam pendidikan                                                          | Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas                                                              | Harapan Lama Sekolah                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         |        |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Rata – Rata Lama Sekolah                              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 2.1.2. | Meningkatnya derajat kesehatan                                                                                     | Meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan status kesehatan masyarakat                                                            | Usia Harapan Hidup                                    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |





| VISI/MISI                                                                                                                                                                           | TUJUAN |                                                                                                                        |       | SASARAN                                                      | OUTCOME                                                                                                              | INDIKATOR                                                              | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                 | (2)    |                                                                                                                        |       | (3)                                                          | (4)                                                                                                                  | (5)                                                                    | (6)                                                                                                                                             |
| <b>3. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kualitas demokrasi</b>                                                                                                                 | 3.1    | Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah                                                                       |       |                                                              | Meningkatnya rasa aman dan ketertiban masyarakat                                                                     | Indeks Harmoni Indonesia                                               | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        | 3.1.1 | Meningkatnya rasa aman masyarakat                            | Meningkatnya kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat serta persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan       | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas<br>Indeks Rasa Aman             | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        | 3.1.2 | Meningkatnya kualitas demokrasi                              | Meningkatnya kualitas tata kelola demokratis                                                                         | Indeks Demokrasi Indonesia                                             | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK          |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |       |                                                              |                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <b>4. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan</b> | 4.1    | Mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur yang berkualitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan |       |                                                              | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas                                          | Indeks Infrastruktur Daerah<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH<br>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        | 4.1.1 | Tersedianya akses jalan dalam kondisi baik                   | Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi mantap untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik | Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        | 4.1.2 | Meningkatnya areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi | Meningkatnya cakupan layanan irigasi terhadap lahan pertanian produktif                                              | Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi     | PROGRAM PEMANFAATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |       |                                                              |                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                 |



| VISI/MISI                                                                                                                                                                                         | TUJUAN |                                                                         |        | SASARAN                                                     | OUTCOME                                                                                                        | INDIKATOR                                                                               | PROGRAM PRIORITAS                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                               | (2)    |                                                                         |        | (3)                                                         | (4)                                                                                                            | (5)                                                                                     | (6)                                                                |
| <b>Misi 6 : Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif</b><br><b>Misi 7 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah</b> |        |                                                                         | 4.1.3. | Tersedianya rumah layak huni                                | Meningkatnya rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat miskin                                            | Persentase Rumah Layak Huni/Rumah Mandiri terbangun / Laju Pertumbuhan Rumah Layak Huni | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                     |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 4.1.4  | Meningkatnya ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim | Meningkatnya ketahanan masyarakat dan lingkungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim                   | Indeks Resiko Bencana                                                                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                     |
|                                                                                                                                                                                                   | 7.1    | Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan |        |                                                             | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan                                              | Pertumbuhan Ekonomi                                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                         |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 7.1.1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produktif    | Meningkatnya kontribusi sektor produktif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat                | Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan                              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         |        |                                                             |                                                                                                                | Kontribusi PDRB sektor Pariwisata                                                       | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                       |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 7.1.2  | Meningkatnya kualitas iklim investasi                       | Meningkatnya nilai dan realisasi investasi serta kemudahan perizinan di daerah                                 | Realisasi Investasi                                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                         |
|                                                                                                                                                                                                   | 7.2.   | Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat & daya saing daerah               |        |                                                             | Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat                                                                  | Angka Kemiskinan                                                                        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                            |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         |        |                                                             | Meningkatnya daya saing daerah disektor ekonomi                                                                | Indeks Gini                                                                             | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         | 7.2.1  | Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan                | Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman bagi masyarakat | Skor pola pangan harapan                                                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         |        |                                                             |                                                                                                                | Indeks ketahanan pangan                                                                 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |



| VISI/MISI | TUJUAN |  |       | SASARAN                                                                             | OUTCOME                                                               | INDIKATOR           | PROGRAM PRIORITAS                                                  |
|-----------|--------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)       | (2)    |  |       | (3)                                                                                 | (4)                                                                   | (5)                 | (6)                                                                |
|           |        |  | 7.2.2 | Menurunnya jumlah masyarakat kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Menurunnya jumlah individu/keluarga yang termasuk dalam kategori PPKS | Persentase PPKS     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                            |
|           |        |  | 7.2.3 | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                                  | Meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat               | Nilai Tukar Petani  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |
|           |        |  |       |                                                                                     |                                                                       | Nilai Tukar Nelayan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                   |



## **BAB IV**

### **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1. Program Perangkat Daerah**

Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah. Dengan memperhatikan urusan bidang dan kewenangan pemerintah daerah maka program perangkat daerah, target kinerja dan pagu indikatif sebagai berikut :





Tabel 4.1. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025 – 2030

| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUN AN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                 | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |                 | TAHUN 2026 |                 | TAHUN 2027 |                    | TAHUN 2028 |                    | TAHUN 2029 |                    | TAHUN 2030 |                    | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
|      |   |   |                                                                 |                                                                                     |        |                            | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.                | TARGET     | RP.                | TARGET     | RP.                | TARGET     | RP.                |                    |
| 1    |   |   | 2                                                               | 3                                                                                   | 4      | 5                          | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                 | 12         | 13                 | 14         | 15                 | 16         | 17                 | 18                 |
|      |   |   | Non Urusan                                                      | Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja secara tepat waktu | %      | 80                         | 100        | 303.203.844.805 | 100        | 303.203.844.805 | 100        | 312.299.960.149,15 | 100        | 321.797.006.631,63 | 100        | 331.278.004.824,64 | 100        | 340.424.886.200,93 | Semua PD           |
|      |   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH                   | Skor Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Skor   | 50                         | >80        |                 | >90        |                 | >90        |                    | >90        |                    | >90        |                    | >90        |                    |                    |
|      |   |   |                                                                 | Capaian PMPRB Perangkat Daerah                                                      | Skor   | <70                        | >80        |                 | >90        |                 | >90        |                    | >90        |                    | >90        |                    | >90        |                    |                    |
|      |   |   |                                                                 | Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah             | %      | 70                         | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |                    |
|      |   |   |                                                                 | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur                                               | %      | 70                         | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |                    |
|      |   |   |                                                                 |                                                                                     |        |                            |            |                 |            |                 |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                    |
| 1    |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                     |        |                            |            |                 |            |                 |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                    |
| 1    | 1 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                     |        |                            |            |                 |            |                 |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                    |
| 1    | 1 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar                                           | %      | 60                         | 100        | 34.743.779.640  | 100        | 35.264.936.335  | 100        | 35.793.910.379,62  | 100        | 36.330.819.035,31  | 100        | 36.875.781.321     | 100        | 37.428.918.040,66  | Dinas PPO          |
|      |   |   |                                                                 | Angka partisip asi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                 | %      | 100                        | 100        | -               | 100        |                 | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |                    |
|      |   |   |                                                                 | Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A                                         | %      | 90                         | 100        | -               | 100        | -               | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |                    |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUN AN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |             | TAHUN 2030 |                | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------------|
|      |   |   |                                                               |                                                                                                          |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            |                    |
| 1    |   |   | 2                                                             | 3                                                                                                        | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         | 17             | 18                 |
|      |   |   |                                                               | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B                                                            | %      | 80                         | 100        | -           | 100        | -           | 100        |                | 100        |             | 100        |             | 100        |                |                    |
|      |   |   |                                                               | Rata-rata lama sekolah                                                                                   | Tahun  | 7,76                       | 7,76       | -           | 8,09       | -           | 8,42       |                | 8,75       |             | 9,08       |             | 9,41       |                |                    |
|      |   |   |                                                               | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                                             | %      | 80                         | 100        | -           | 100        | -           | 100        |                | 100        |             | 100        |             | 100        |                |                    |
|      |   |   |                                                               | Persentase anak usia 16-18 yang berpartisipasi dalam pendidik an menengah (APS)                          | %      | 75                         | 100        |             | 100        |             | 100        |                | 100        |             | 100        |             | 100        |                |                    |
|      |   |   |                                                               |                                                                                                          | Unit   | 1                          |            |             |            |             | 1          |                |            |             | 1          |             |            |                |                    |
|      |   |   |                                                               | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | %      | NA                         | 1          |             | 1          |             | 1          |                | 1          |             | 1          |             | 1          |                |                    |
|      |   |   |                                                               | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B                            | %      | NA                         | 61,53      |             | 65         |             | 68         |                | 71         |             | 74         |             | 77         |                |                    |
| 1    | 1 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                | Cakupan Pemenuhan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                | %      | NA                         | 80         | 347.116.000 | 100        | 352.322.740 | 100        | 357.607.581,10 | 100        | 362.971.695 | 100        | 368.416.270 | 100        | 373.942.514,29 | Dinas PPO          |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |     | TAHUN 2026 |     | TAHUN 2027 |     | TAHUN 2028 |     | TAHUN 2029 |     | TAHUN 2030 |     | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------------|
|      |   |   |                                                              |                                                                                                |        |                            | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARG ET    | RP. | TARGE T    | RP. | TARGET     | RP. |                    |
| 1    |   |   | 2                                                            | 3                                                                                              | 4      | 5                          | 6          | 7   | 8          | 9   | 10         | 11  | 12         | 13  | 14         | 15  | 16         | 17  | 18                 |
|      |   |   |                                                              |                                                                                                |        |                            |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |                    |
|      |   |   |                                                              | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum MULOK                                | %      | NA                         | 3,30       |     | 100        |     | 100        |     | 100        |     | 100        |     | 100        |     |                    |
| 1    | 1 | 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                     | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                                         | %      | 60                         | 72,72      | 0   | 76,36      |     | 80,18      |     | 85,18      |     | 90,18      |     | 95,18      |     | Dinas PPO          |
|      |   |   |                                                              | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik                                              | %      | 70                         | 75         | -   | 80         | -   | 85         | -   | 90         | -   | 95         | -   | 100        |     | Dinas PPO          |
|      |   |   |                                                              | Indeks pemerataan guru                                                                         |        |                            |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     | Dinas PPO          |
|      |   |   |                                                              | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV                             | %      | NA                         | 71         |     | 75         |     | 80         |     | 85         |     | 90         |     | 95         |     |                    |
| 1    | 1 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                    | Cakupan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki izin | %      | 0                          | 33,33      | 0   | 33,33      |     | 33,33      |     | 33,33      |     | 33,33      |     | 33,33      |     | Dinas PPO          |
|      |   |   |                                                              | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui                           | %      |                            |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |                    |
| 1    | 1 | 6 | PROGRAM PENGEMBANGA N BAHASA DAN SASTRA                      | Cakupan Penerapan Bahasa dan Sastra Daerah dalam pembelajaran                                  | %      | 0                          | 20         | 0   | 30         |     | 35         |     | 37         |     | 40         |     | 45         |     | Dinas PPO          |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                        | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |                | TAHUN 2026 |                | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                                                                             |                                                                                            |        |                            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |   |   | 2                                                                           | 3                                                                                          | 4      | 5                          | 6          | 7              | 8          | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
|      |   |   |                                                                             | Persentase pengembangan bahasa dan sastra                                                  | %      |                            | 10         |                | 15         |                | 20         |                | 25         |                | 30         |                | 45         |                |                  |
| 1    | 2 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                                            |        |                            |            | -              |            | -              |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 1    | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi                               | %      | 90                         | 90         | 73.917.479.081 | 100        | 70.748.174.541 | 100        | 71.101.915.414 | 100        | 71.457.424.991 | 100        | 72.529.286.366 | 100        | 72.891.932.797 | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                               | %      | 100                        | 100        | -              | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Cakupan penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat          | %      | 100                        | 100        | -              | 100        | -              | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                               | %      | 100                        | 100        | -              | 100        | -              | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita                         | %      | 16,5                       | 24,7       |                | 24,2       |                | 23,6       |                | 23,1       |                | 22,6       |                | 22,0       |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Prevalensi Balita <i>stunting</i>                                                          | %      | 39,5                       | 35,0       |                | 33,7       |                | 32,5       |                | 31,1       |                | 30,0       |                | 29,00      |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun | %      | 12,2                       | 8          |                | 7,5        |                | 7          |                | 6,5        |                | 5          |                |            |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                             | %      | 52,8                       | 88         |                | 89         |                | 91         |                | 93         |                | 95         |                | 100        |                | Dinas Kesehatan  |
|      |   |   |                                                                             | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                   | %      | 60,1                       | 88         |                | 89         |                | 90         |                | 91         |                | 92         |                | 100        |                | Dinas Kesehatan  |





| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                          | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
|      |   |   |                                                              |                                                                                                              |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARG ET    | RP.           | TARGE T    | RP.           | TARGET     | RP.           |                    |
| 1    |   |   | 2                                                            | 3                                                                                                            | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18                 |
|      |   |   |                                                              | Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan                                                      | %      | 95,2                       | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar                                                            | %      | 84,1                       | 85         |               | 86         |               | 87         |               | 88         |               | 90         |               | 90         |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | %      | 90,0                       | 90,0       |               | 92,5       |               | 92,5       |               | 95,0       |               | 95,0       |               | 97,5       |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                              | %      | 83,1                       | 90         |               | 90         |               | 90         |               | 90         |               | 90         |               | 90         |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard sesuai standard | %      | 95,6                       | 96         |               | 96         |               | 98         |               | 98         |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                         | %      | 81,6                       | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                 | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase ODGj berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                   | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai                                                | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                              | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan                                                    | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | Dinas Kesehatan    |
| 1    | 2 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN                  | Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek                                           | %      | 75                         | 80         | 8.698.142.884 | 90         | 7.676.142.884 | 100        | 7.683.819.027 | 100        | 7.722.238.122 | 100        | 7.760.849.313 | 100        | 7.799.653.559 | Dinas Kesehatan    |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                         | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |             | TAHUN 2030 |             | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|      |   |   |                                                               |                                                                                             |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARG ET    | RP.         | TARGE T    | RP.         | TARGET     | RP.         |                    |
| 1    |   |   | 2                                                             | 3                                                                                           | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         | 17          | 18                 |
|      |   |   |                                                               | Rasio Dokter (Tenaga Medis) per 100.000 penduduk                                            | rasio  | 28,75                      | 29,50      |             | 32,27      |             | 34,73      |             | 37,09      |             | 39,36      |             | 44,28      |             | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                               | Rasio Bidan per 100.000 penduduk                                                            | rasio  | 167,15                     | 172,53     |             | 198,87     |             | 225,76     |             | 251,62     |             | 276,54     |             | 306,07     |             | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                               | Rasio Perawat per 100.000 penduduk                                                          | rasio  | 332,89                     | 346,33     |             | 456,05     |             | 467,87     |             | 479,19     |             | 492,07     |             | 541,28     |             | Dinas Kesehatan    |
| 1    | 2 | 4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM       | Persentase Sarana farmasi yang memenuhi standar                                             | %      | 100                        | 100        | 265.774.000 | 100        | 265.774.000 | 100        | 267.102.870 | 100        | 268.438.384 | 100        | 272.464.960 | 100        | 273.827.285 | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                               | Persentase cakupan sediaan alat kesehatan                                                   | %      | 80                         | 80         |             | 85         |             | 90         |             | 95         |             | 100        |             | 100        |             | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                               | Cakupan Pemeriksaan Sarana IRTP Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Memenuhi Ketentuan | %      | 70                         | 80         |             | 80         |             | 80         |             | 80         |             | 90         |             | 100        |             | Dinas Kesehatan    |
| 1    | 2 | 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN              | Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat                                  | %      | 50                         | 50         | 100.380.000 | 55         | 100.380.000 | 60         | 100.881.900 | 65         | 101.386.310 | 70         | 102.907.104 | 75         | 103.421.640 | Dinas Kesehatan    |
|      |   |   |                                                               | Persentase masyarakat yang diberdayakan di bidang kesehatan                                 | %      | 20                         | 20         |             | 25         |             | 30         |             | 35         |             | 40         |             | 45         |             | Dinas Kesehatan    |
| 1    | 3 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                    |
| 1    | 3 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                     | Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                         | %      | 66,51                      | 67,64      | 74.006.496  | 68,77      | 74.006.496  | 69,89      | 77.706.821  | 71,02      | 81.592.162  | 72,15      | 89.751.378  | 73,28      | 94.238.947  | DINAS PU PR        |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                  | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |                | TAHUN 2026 |                | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                                                                         |                                                                                                                      |        |                            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |   |   | 2                                                                       | 3                                                                                                                    | 4      | 5                          | 6          | 7              | 8          | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
|      |   |   |                                                                         | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir                                                  | %      | 35                         | 40         |                | 43         |                | 45         |                | 50         |                | 55         |                | 60         |                | DINAS PU PR      |
|      |   |   |                                                                         | Persentase luas layanan irigasi multikomoditi                                                                        | %      | NA                         | 10         |                | 20         |                | 30         |                | 40         |                | 50         |                | 60         |                | DINAS PU PR      |
| 1    | 3 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) | Cakupan penduduk berakses air minum                                                                                  | %      | 64,66                      | 66,69      | 13.576.547.632 | 69,14      | 12.576.547.632 | 71,78      | 12.702.313.108 | 74,65      | 12.829.336.239 | 77,76      | 13.414.215.537 | 80,83      | 13.427.629.753 | DINAS PU PR      |
| 1    | 3 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL        | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional                                                     | %      | 50                         | 60         | 0              | 70         | -              | 80         | -              | 85         | -              | 90         | -              | 100        | -              | DINAS PU PR      |
|      |   |   |                                                                         | Terbangunnya TPA/TPST                                                                                                | Unit   | 0                          | 0          |                | 0          |                | 1          |                |            |                |            |                |            |                |                  |
|      |   |   |                                                                         | Persentase terpenuhinya dokumen teknis TPST                                                                          |        |                            |            |                | 60         |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 1    | 3 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                  | Persentase Air Limbah Domestik tertangani                                                                            | %      | 60                         | 100        | 5.098.329.328  | 100        | 4.773.669.581  | 100        | 4.778.443.251  | 100        | 4.783.221.694  | 100        | 5.022.382.779  | 100        | 5.047.494.693  | DINAS PU PR      |
|      |   |   |                                                                         | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) | %      | 45                         | 50         |                | 55         |                | 58         |                | 60         |                | 75         |                | 85         |                | DINAS PU PR      |



| KODE |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                       | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGK AT DAERA H |
|------|---|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
|      |   |    |                                                              |                                                                                                                                           |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARG ET    | RP.            | TARGE T    | RP.            | TARGET     | RP.            |                    |
| 1    |   |    | 2                                                            | 3                                                                                                                                         | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18                 |
| 1    | 3 | 6  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE         | Cakupan drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat                                                                | %      | 60                         | 100        | -           | 100        | -           | 100        | -              | 100        | -              | 100        | -              | 100        | -              | DINAS PU PR        |
| 1    | 3 | 7  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                              | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik                                                                                             | %      | 1,3                        | 10,8       |             | 20,3       |             | 29,8       |                | 39,3       |                | 48,8       |                | 58,3       |                | DINAS PU PR        |
| 1    | 3 | 8  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                             | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                                                               | %      | 1,3                        | 10,8       | 118.000.000 | 20,3       | 118.000.000 | 29,8       | 121.540.000,00 | 39,3       | 125.186.200,00 | 48,8       | 128.941.786,00 | 58,3       | 132.810.039,58 | DINAS PU PR        |
| 1    | 3 | 9  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                | Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik                                                                                                | %      | 38,93                      | 41         | 49.337.664  | 44         | 49.337.664  | 46         | 50.077.728,96  | 49         | 50.828.894,89  | 52         | 55.911.784,38  | 55         | 56.750.461,15  | DINAS PU PR        |
|      |   |    |                                                              | Cakupan jembatan dalam kondisi baik                                                                                                       | %      | 27,66                      | 29,89      |             | 32,06      |             | 34,26      |                | 36,46      |                | 38,66      |                | 40,86      |                | DINAS PU PR        |
| 1    | 3 | 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                         | Cakupan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat                                                                                          | Orang  | 47                         | 77         | 200.000.000 | 107        | 200.000.000 | 137        | 202.000.000    | 167        | 204.020.000    | 197        | 224.422.000    | 227        | 226.666.220    | DINAS PUPR         |
|      |   |    |                                                              | Persentase Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten                                                                        | %      | NA                         | 0          |             | 100        |             | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                |                    |
|      |   |    |                                                              | Persentase Jasa Konstruksi Kabupaten yang mendapatkan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan | %      | NA                         | 0          |             | 60         |             | 70         |                | 80         |                | 90         |                | 100        |                |                    |





| KODE |   |    |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                    | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |                | TAHUN 2026 |                | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |             | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|
|      |   |    |  |                                                                                                                            |                                                                                                                        |        |                            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.         |                  |
| 1    |   |    |  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                      | 4      | 5                          | 6          | 7              | 8          | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17          | 18               |
|      |   |    |  |                                                                                                                            |                                                                                                                        |        |                            |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |             | DINAS PUPR       |
| 1    | 3 | 11 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                     | Penetapan Perda RDTK                                                                                                   | %      | 70                         | 95         | 100.000.000    | 100        | 100.000.000    | 100        | 101.000.000    | 100        | 102.010.000    | 100        | 102.000.000    | 100        | 103.020.000 | DINAS PUPR       |
|      |   |    |  |                                                                                                                            | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang daerah                                                     | %      | NA                         | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |             | DINAS PUPR       |
| 1    | 4 |    |  | URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                             |                                                                                                                        |        |                            |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |             |                  |
| 1    | 4 | 2  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                             | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program                                      | %      | 0                          | 0          | -              |            | -              |            | -              |            | -              |            | -              |            | -           | DINAS PUPR       |
| 1    | 4 | 3  |  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH                                                                          | Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Mandiri yang dibangun                                                                    | Unit   | 2487                       | 325        | 23.063.000.000 | 325        | 23.063.000.000 | 325        | 23.063.000.000 | 325        | 23.063.000.000 | 325        | 23.063.000.000 |            |             | DINAS PUPR       |
| 1    | 4 | 4  |  | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                              | Persentase pemukiman yang dilengkapi PSU                                                                               | %      | 30                         |            |                | 35         |                | 40         |                | 45         |                | 50         |                | 55         |             | DINAS PUPR       |
| 1    | 4 | 5  |  | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan PSU | %      | NA                         | 20         |                | 40         |                | 50         |                | 60         |                | 75         |                | 100        |             | DINAS PUPR       |
|      |   |    |  |                                                                                                                            | Jumlah Tenaga ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkwalifikasi                                                | Orang  | NA                         | NA         |                | 2          |                | 2          |                | 2          |                | 2          |                | 2          |             |                  |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                        | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |                  | TAHUN 2028 |                  | TAHUN 2029 |                  | TAHUN 2030 |                  | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                                                                                           |                                                                                                                            |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              |                  |
| 1    |   |   | 2                                                                                         | 3                                                                                                                          | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11               | 12         | 13               | 14         | 15               | 16         | 17               | 18               |
| 1    | 5 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                            |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
| 1    | 5 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Persentase Cakupan Penegakan PERDA                                                                                         | %      | 60                         | 80         | 1.518.356.800 | 90         | 1.518.356.800 | 100        | 1.563.907.504,00 | 100        | 1.610.824.729,12 | 100        | 1.759.149.470,99 | 100        | 1.899.881.428,67 | Sat Pol PP       |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase penyelenggaraan tbumtranmas                                                                                     | %      |                            | 75         |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase cakupan perlindungan masyarakat                                                                                 | %      | 80                         | 80         |               |            |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase PPNS yang bersertifikat kompetensi                                                                              | %      | NA                         | 0,5        |               |            |               | 1          |                  | 1,5        |                  | 1,5        |                  | 1,5        |                  |                  |
| 1    | 5 | 3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | Cakupan penanggulangan bencana                                                                                             | %      | 60                         | 85         | 608.828.300   |            | 608.828.300   | 100        | 627.093.149,00   | 100        | 645.905.943,47   | 100        | 665.283.121,77   | 100        | 685.241.615,43   |                  |
| 1    | 5 | 4 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN                                                          | Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran                                                                             | %      | 60                         | 85         | 6.100.000     |            | 6.100.000     | 100        | 6.283.000,00     | 100        | 6.471.490,00     | 100        | 6.665.634,70     | 100        | 6.865.603,74     |                  |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana                                                          | %      | 60                         | 100        |               |            |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                                                                              | %      | 60                         | 100        |               |            |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
| 1    | 6 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                                                                                                                            |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
| 1    | 6 | 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                               | Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan                                                                   | %      | 30                         | 60         | 173.654.500   | 70         | 173.654.500   | 70         | 178.864.135,00   | 75         | 184.230.059,05   | 80         | 489.756.960,82   | 95         | 492.205.745,63   | Dinas Sosial     |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase pekerja sosial tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
|      |   |   |                                                                                           | Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat                                                                         | %      | 100                        | 100        |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |



| KODE |   |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |   |   |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |   |   |  | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
|      |   |   |  |                                                                | kompetensinya dalam YANSOS                                                                                                                                                                                                                               |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
|      |   |   |  |                                                                | Persentase lembaga dibidang sosial yang meningkat kualitas dalam YANSOS                                                                                                                                                                                  | %      | 100                        | 100        |             | 100        |             | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                |                  |
|      |   |   |  |                                                                | Persentase penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai Standar                                                                                                                                                          | %      | 100                        | 100        |             | 100        |             | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                |                  |
| 1    | 6 | 3 |  | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase fasilitasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran                                                                                                                                                                                         | %      | 100                        | 100        | -           | 100        | -           | 100        | -              | 100        | -              | 100        | -              | 100        | -              |                  |
| 1    | 6 | 4 |  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | 60     | 60                         | 100        | 270.883.400 |            | 270.883.400 | 100        | 279.009.902,00 | 100        | 287.380.199,06 | 100        | 396.001.605,03 | 100        | 415.801.685,28 |                  |
| 1    | 6 | 5 |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        | Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS                                                                                                                                                                                                             | %      | 80                         | 100        | 81.910.000  |            | 81.910.000  | 100        | 84.367.300,00  | 100        | 86.898.319,00  | 100        | 89.505.268,57  | 100        | 92.190.426,63  |                  |
| 1    | 6 | 6 |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial                                                                                                                                                                                                   | %      | 80                         | 100        | 85.375.000  |            | 85.375.000  | 100        | 87.936.250,00  | 100        | 90.574.337,50  | 100        | 93.291.567,63  | 100        | 96.090.314,65  |                  |
| 1    | 6 | 7 |  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       | cakupan pemeliharaan TMP                                                                                                                                                                                                                                 | %      | NA                         |            | -           |            | -           |            | -              |            | -              |            | -              |            | -              |                  |
| 2    |   |   |  | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 7 |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJA                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                          | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                  | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|
|      |   |   |                                                                         |                                                                              |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.              |                  |
| 1    |   |   | 2                                                                       | 3                                                                            | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17               | 18               |
| 2    | 7 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                        | Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja                                 | %      | NA                         |            | 24.446.500  |            | 24.446.500  | 100        | 25.179.895,00  | -          | 25.935.291,85  | -          | 26.713.350,61  |            | 27.514.751,12    |                  |
| 2    | 7 | 3 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  | Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                  | %      | NA                         | 21,48      | 113.255.000 | 26,86      | 113.255.000 | 33,57      | 116.652.650,00 | 38,57      | 120.152.229,50 | 43,57      | 123.756.796,39 | 48,57      | 127.469.500,28   |                  |
| 2    | 7 | 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                         | Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                | %      | 25                         | 27,34      | 75.375.000  | 34,18      | 75.375.000  | 42,72      | 77.636.250     | 47,72      | 79.965.337,50  | 52,72      | 82.364.297,63  | 57,72      | 84.835.226,55    |                  |
| 2    | 7 | 5 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                             | Persentase Kepesertaan Jamsostek                                             | %      | 40                         | 55         | 687.140.000 | 60         | 687.140.000 | 65         | 687.827.140    | 70         | 688.514.967    | 90         | 689.203.482    | 100        | 723.663.656      |                  |
| 2    | 8 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                              |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                  |                  |
| 2    | 8 | 2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN               | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                                  | %      | 55,16                      | 55,66      | 50.000.000  | 56,16      | 50.000.000  | 61,16      | 50.050.000     | 66,16      | 50.100.050     | 71,16      | 50.150.150     | 75,16      | 56.275.440,50    |                  |
| 2    | 8 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                          | Cakupan penyelesaian secara hukum atas tindakan KDRT                         | %      | 100                        | 100        | 134.876.500 | 100        | 134.876.500 | 100        | 138.922.795    | 100        | 143.090.479    | 100        | 247.383.193    | 100        | 284.490.672,20   |                  |
| 2    | 8 | 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                   | persentase sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga                  | %      | 50                         | 65         | -           | 70         | -           | 75         | 24.000.000     | 75         | 24.024.000     | 75         | 24.048.024     | 75         | 25.250.425       |                  |
| 2    | 8 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                         | Cakupan dokumen Data Gender dan Anak                                         | %      | 90                         | 90,27      | -           | 94,47      | -           | 94,47      | 43.634.407     | 94,47      | 44.288.923     | 94,47      | 44.953.257     | 94,47      | 45.627.556       |                  |
| 2    | 8 | 6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                        | Persentase Desa layak anak                                                   | %      | N/A                        | 30         | 72.042.500  | 40         | 72.042.500  | 50         | 74.203.775,00  | 65         | 76.429.888,25  | 70         | 98.722.784,90  | 80         | 108.595.063,39   |                  |
| 2    | 8 | 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                        | Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani        | %      | 70                         | 100        | 363.070.000 | 100        | 363.070.000 | 100        | 373.962.100,00 | 100        | 385.180.963,00 | 100        | 396.736.391,89 | 100        | 436.410.031,08   |                  |
| 2    | 9 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                       |                                                                              |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                  |                  |
| 2    | 9 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN            | Persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | %      | N/A                        | 30         | 810.650.000 | 40         | 810.650.000 | 50         | 834.969.500,00 | 70         | 860.018.585,00 | 80         | 895.819.142,55 | 90         | 1.030.192.013,93 |                  |





| KODE |    |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                         | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                     | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |                  | TAHUN 2028 |                  | TAHUN 2029 |                  | TAHUN 2030 |                  | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|      |    |   |  |                                                                                                      |                                                                         |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              |                  |
| 1    |    |   |  | 2                                                                                                    | 3                                                                       | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11               | 12         | 13               | 14         | 15               | 16         | 17               | 18               |
|      |    |   |  | KEMANDIRIAN PANGAN                                                                                   |                                                                         |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
| 2    | 9  | 3 |  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                    | Presentase Ketersediaan pangan utama                                    | %      | N/A                        | 70         | 3.768.541.500 | 75         | 3.768.541.500 | 80         | 3.881.597.745,00 | 87         | 3.998.045.677,35 | 90         | 4.217.987.047,67 | 100        | 4.850.685.104,82 |                  |
| 2    | 9  | 4 |  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                  | Persentase pengadaan & penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan | %      | N/A                        | 70         | 42.699.100    | 75         | 42.699.100    | 80         | 43.980.073,00    | 87         | 45.299.475,19    | 95         | 46.658.459,45    | 100        | 48.058.213,23    |                  |
| 2    | 9  | 5 |  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                   | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                     | %      | N/A                        | 70         | -             | 80         | -             | 85         | -                | 90         | -                | 100        | 42.000.000       | 100        | 42.630.000       |                  |
| 2    | 10 |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                |                                                                         |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
| 2    | 10 | 2 |  | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI                                                                      | Persentase Penyelesaian izin lokasi                                     | %      | N/A                        | 80         |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
| 2    | 10 | 4 |  | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                          | Cakupan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                     | %      | N/A                        | 80         | -             | 85         | -             | 90         | 8.205.167        | 95         | 8.205.167        | 100        | 8.205.167        | 100        | 8.205.167        |                  |
| 2    | 10 | 5 |  | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                             | Cakupan Tertib administrasi pertanahan                                  | %      | N/A                        | 100        |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  |                  |
| 2    | 10 | 6 |  | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Cakupan redistribusi tanah                                              | %      | NA                         |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
|      |    |   |  |                                                                                                      | Cakupan ganti rugi tanah                                                | %      | NA                         |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                  |
| 2    | 10 | 7 |  | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                       | Cakupan Tanah Ulayat Lintas Daerah yang ditetapkan statusnya            | %      | N/A                        | 20         | 0             | 25         | 9.414.579     | 30         | 27.011.776       | 35         | 27.822.129       | 37         | 28.656.793       | 40         | 29.516.497       |                  |



| KODE |    |    |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                       | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |    |    |  |                                                                                                                         |                                                                                           |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |    |    |  | 2                                                                                                                       | 3                                                                                         | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
| 2    | 10 | 8  |  | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                        | Tanah Kosong dimanfaatkan                                                                 | %      | N/A                        | 25         | 0           | 25         | 7.966.182   | 30         | 22.856.118     | 50         | 23.541.802     | 60         | 24.248.056     | 75         | 24.975.497     |                  |
| 2    | 10 | 9  |  | PROGRAM PENGELOLAAN IJIN MEMBUKA TANAH                                                                                  |                                                                                           |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 10 | 10 |  | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                              |                                                                                           |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 02   | 11 |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             |                                                                                           |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 11 | 2  |  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (IKLH, IKPLHD, DDDTLH, KLHS) | %      | N/A                        | 50         | 773.645.000 | 60         | 773.645.000 | 70         | 796.854.350    | 80         | 820.759.981    | 100        | 845.382.780    | 100        | 870.744.263    |                  |
| 2    | 11 | 3  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Persentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup            | %      | N/A                        | 80         | 148.357.500 | 90         | 148.357.500 | 90         | 152.808.225    | 100        | 157.392.472    | 100        | 162.114.246    | 100        | 166.977.673    |                  |
| 2    | 11 | 4  |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota                       | %      | N/A                        | 65         | 465.425.000 | 65         | 465.525.000 | 70         | 479.387.750,00 | 70         | 493.769.382,50 | 70         | 508.582.463,98 | 70         | 523.839.937,89 |                  |
| 2    | 11 | 5  |  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                 | persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3                                                | %      | N/A                        | 90         | 6.574.400   | 90         | 6.574.400   | 95         | 6.771.632      | 95         | 6.974.780,96   | 95         | 7.184.024,39   | 95         | 7.399.545,12   |                  |
| 2    | 11 | 6  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase pengendalian persetujuan lingkungan                                            | %      | N/A                        | 90         | 23.670.000  | 90         | 23.670.000  | 95         | 24.380.100,00  | 95         | 25.111.503,00  | 95         | 25.864.848,09  | 95         | 26.640.793,53  |                  |



| KODE |    |    |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                 | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |            | TAHUN 2026 |            | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|
|      |    |    |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |        |                            | TARGET     | RP.        | TARGET     | RP.        | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           |                  |
| 1    |    |    |  | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18               |
| 2    | 11 | 7  |  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Sinkronisasi MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH | %      | N/A                        | 90         | 5.384.400  | 90         | 5.384.400  | 95         | 5.545.932     | 95         | 5.712.310     | 95         | 5.883.679     | 95         | 6.060.190     |                  |
| 2    | 11 | 8  |  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                    | Prosentase Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan                                       | %      | N/A                        | 90         | 37.267.000 | 90         | 37.267.000 | 95         | 38.385.010,00 | 95         | 39.536.560,30 | 95         | 40.722.657,11 | 95         | 41.944.336,82 |                  |
| 2    | 11 | 9  |  | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                         | Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup                                                                                     | %      | N/A                        | 90         | 38.880.000 | 90         | 38.880.000 | 95         | 40.046.400,00 | 95         | 41.247.792,00 | 95         | 42.485.225,76 | 95         | 43.759.782,53 |                  |
| 2    | 11 | 10 |  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                 | Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani                                                                                               | %      | N/A                        | 90         | 6.195.000  | 90         | 6.195.000  | 95         | 6.380.850     | 95         | 6.572.276     | 95         | 6.769.444     | 95         | 6.972.527     |                  |
| 2    | 11 | 11 |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                               | Persentase Penanganan Sampah.                                                                                                                       | %      | N/A                        | 90         | 86.134.000 | 90         | 86.134.000 | 95         | 88.718.020,00 | 95         | 91.379.560,60 | 95         | 94.120.947,42 | 95         | 96.944.575,84 |                  |
| 2    | 12 |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                     |                                                                                                                                                     |        |                            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 2    | 12 | 2  |  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                  | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran                                                                                 | %      | 70                         | 85         | 65.995.000 | 90         | 65.995.000 | 100        | 67.974.850,00 |            | 70.014.095,50 |            | 72.114.518,37 |            | 74.277.953,92 |                  |
|      |    |    |  |                                                                                                               | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik                                                                     | %      | 70                         | 90         |            | 100        |            | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               |                  |
|      |    |    |  |                                                                                                               | Persentase cakupan kepemilikan NIK                                                                                                                  | %      | 70                         | 85         |            | 100        |            | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               |                  |



| KODE |    |   |                                                                                     | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025  |             | TAHUN 2026  |             | TAHUN 2027     |                | TAHUN 2028     |                | TAHUN 2029     |                | TAHUN 2030     |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      |    |   |                                                                                     |                                                                    |                                                                                          |        |                            | TARGET      | RP.         | TARGET      | RP.         | TARGET         | RP.            | TARGET         | RP.            | TARGET         | RP.            | TARGET         | RP.            |                  |
| 1    |    |   |                                                                                     | 2                                                                  | 3                                                                                        | 4      | 5                          | 6           | 7           | 8           | 9           | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18               |
| 2    | 12 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                             | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                           | Rasio penduduk berakte                                                                   | %      | 70                         | 85          | 34.000.000  |             | 34.000.000  | 100            | 35.020.000,00  | 100            | 36.070.600,00  | 100            | 37.152.718,00  | 100            | 38.267.299,54  |                  |
| 2    | 12 | 4 |                                                                                     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN            | Pemanfaatan Data Kependudukan                                                            | %      | 70                         | 85          | 187.630.000 | 100         | 187.630.000 | 100            | 193.258.900,00 | 100            | 199.056.667,00 | 100            | 205.028.367,01 | 100            | 211.179.218,02 |                  |
| 2    | 12 | 5 |                                                                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                            | Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | %      | 70                         | 85          | 20.300.000  |             | 20.300.000  | 100            | 20.909.000     | 100            | 21.536.270     | 100            | 22.182.358,10  | 100            | 22.847.828,84  |                  |
| 2    | 13 |   |                                                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA        |                                                                                          |        |                            |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2    | 13 | 2 | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Persentase Fasilitas Penataan Desa                                 | %                                                                                        | NA     | 100                        | -           | 100         | -           | 100         | -              | 100            | -              | 100            | -              | 100            | -              | 100            | -                |
| 2    | 13 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                  | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa                              | %                                                                                        | NA     |                            | -           | 100         | -           | 100         | -              | 100            | -              | 100            | -              | 100            | -              | 100            | -                |
| 2    | 13 | 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa            | %                                                                                        | NA     | 100                        | 478.348.770 | 100         | 478.348.770 | 100         | 492.699.233,10 | 100            | 507.480.210,09 | 100            | 522.704.616,40 | 100            | 538.385.754,89 |                |                  |
|      |    |   |                                                                                     |                                                                    | Persentase BumDes dengan kategori berkembang dan maju                                    | %      | 3                          | 10          |             | 20          |             | 30             |                | 40             |                | 50             |                | 60             |                |                  |
| 2    | 13 | 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif | %                                                                                        | 100    | 100                        | 285.000.000 | 100         | 285.000.000 | 100         | 293.550.000,0  | 100            | 302.356.500    | 100            | 311.427.195    | 100            | 320.770.010,85 |                |                  |
|      |    |   |                                                                                     |                                                                    | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif                                               | %      | NA                         | 100         |             | 100         |             | 100            |                | 100            |                | 100            |                | 100            |                |                  |
| 2    | 14 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK                                    |                                                                    |                                                                                          |        |                            |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |





| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                  | TAHUN 2030 |                  | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|      |    |   |                                                              |                                                                                          |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              |                  |
| 1    |    |   | 2                                                            | 3                                                                                        | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15               | 16         | 17               | 18               |
| 2    | 14 | 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                | Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | %      | 100                        | 100        | 20.454.500  | 100        | 100.000.000 | 100        | 101.500.000    | 100        | 103.022.500    | 100        | 104.567.837,50   | 100        | 106.136.355,06   |                  |
|      |    |   |                                                              | Persentase Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga              | %      | 60                         | 100        |             | 100        |             | 100        |                | 100        |                | 100        |                  | 100        |                  |                  |
| 2    | 14 | 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Cakupan Peserta Akseptor KB                                                              | %      | 50                         | 50         | 999.400.000 | 55         | 999.400.000 | 60         | 1.029.382.000  | 65         | 1.060.138.597  | 70         | 1.113.145.527,17 | 70         | 1.168.802.803,52 |                  |
|      |    |   |                                                              | Angka prevalensi kontrasepsi modern/Mode rn Contraceptive Prevalence Rate(mCPR)          | %      | 50                         | 50         | -           | 55         | -           | 60         |                | 65         |                | 70         |                  | 70         |                  |                  |
|      |    |   |                                                              | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                            | %      |                            | 6          | -           | 5          | -           | 4          |                | 4          |                | 4          |                  | 4          |                  |                  |
| 2    | 14 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB                                       | %      | 60                         | 70         | 500.600.000 | 72         | 500.600.000 | 75         | 515.618.000    | 78         | 722.086.540    | 80         | 758.190.867,00   | 80         | 780.936.593,01   |                  |
|      |    |   |                                                              | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                        | %      | 50                         | 55         |             | 57         |             | 61         |                | 64         |                | 67         |                  | 67         |                  |                  |
|      |    |   |                                                              | Persentase Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                           | %      | NA                         | 10         |             | 12         |             | 16         |                | 20         |                | 25         |                  | 25         |                  |                  |
|      |    |   |                                                              | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA)                                                    | %      | NA                         | 35         |             | 41         |             | 50         |                | 53         |                | 57         |                  | 60         |                  |                  |
| 2    | 15 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                       |                                                                                          |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                  |            |                  |                  |
| 2    | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  | cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan                              | %      | 30                         | 50         | 119.635.000 | 50         | 119.635.000 | 70         | 123.224.050,00 | 70         | 131.920.771,50 | 70         | 138.516.810,08   | 70         | 141.287.146,28   |                  |



| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                 | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |    |   |                                                                |                                                                                                                                                     |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |    |   | 2                                                              | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
|      |    |   |                                                                | cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan                                                                                          | %      | 30                         | 50         |             | 60         |             | 70         |                | 70         |                | 70         |                | 70         |                |                  |
| 2    | 15 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                  | Intensitas pelayanan pelabuhan feri                                                                                                                 | kali   | N/A                        | 15         | 54.185.000  | 15         | 54.185.000  | 20         | 55.810.550,00  | 202        | 57.484.866,50  | 20         | 59.209.412,50  | 30         | 45.409.995     |                  |
| 2    | 16 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          |                                                                                                                                                     |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 16 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK            | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | %      | 40                         | 80         | 56.151.000  | 80         | 56.151.000  | 90         | 57.835.530,00  | 90         | 59.570.595,90  | 90         | 61.357.713,78  | 90         | 63.198.445,19  |                  |
|      |    |   |                                                                | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                       | %      | 40                         | 80         |             | 80         |             | 90         |                | 90         |                | 90         |                | 90         |                |                  |
| 2    | 16 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                       | Persentase Fasilitas Umum yang terhubung dengan Akses Internet yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika                              | %      | 3                          | 35         | 174.011.000 | 45         | 174.011.000 | 55         | 179.231.330,00 | 65         | 184.608.269,90 | 75         | 190.146.518,00 | 85         | 195.850.913,54 |                  |
| 2    | 17 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                                                                     |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 17 | 2 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                     | Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin                                                                                                | %      | 50,62                      | 94,67      | -           | 96         | -           | 97,33      | -              | 98,67      | -              | 100        | -              | 100        | -              | %                |
| 2    | 17 | 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                    | Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT                                                                                                       | %      | 30                         | 30         | 19.894.000  | 57,33      | 19.894.000  | 65,33      | 20.490.820     | 66,67      | 21.105.545     | 70,67      | 21.738.711     | 80         | 22.390.872     |                  |
| 2    | 17 | 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                   | Cakupan Koperasi yang Berkualitas                                                                                                                   | %      | 30                         | 30         | 24.115.000  | 57,33      | 24.115.000  | 65,33      | 24.838.450     | 66,67      | 25.583.604     | 70,67      | 26.351.112     | 80         | 27.141.645     |                  |
| 2    | 17 | 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                   | Cakupan koperasi aktif                                                                                                                              | %      | 50,62                      | 92         | 51.194.000  | 93         | 51.194.000  | 96         | 52.729.820,00  | 97         | 54.311.714,60  | 98         | 55.941.066,04  | 100        | 57.619.298,02  |                  |
| 2    | 17 | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN                                       | Pengawas Koperasi yang Bersertifikat                                                                                                                | %      | NA                         |            | -           | 41         | 20.000.000  | 58         | 20.240.000,00  | 83         | 20.482.880,00  | 100        | 20.728.674,56  | 100        | 20.977.418,65  |                  |



| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                         | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |    |   |                                                                          |                                                                                                             |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |    |   | 2                                                                        | 3                                                                                                           | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
|      |    |   | PERLINDUNGAN KOPERASI                                                    |                                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 17 | 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha   | %      | NA                         | 12,11      | 50.773.500  | 20,44      | 50.773.500  | 30,32      | 52.296.705,00  | 41,83      | 53.865.606,15  | 54,89      | 55.481.574,33  | 69,50      | 57.146.021,56  |                  |
| 2    | 17 | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | Cakupan Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha                                                                 | %      | 6,44                       | 20         | 143.603.000 | 40         | 143.603.000 | 60         | 147.911.090,00 | 80         | 352.348.422,70 | 100        | 357.633.649,04 | 100        | 366.574.490,27 |                  |
| 2    | 18 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 18 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten                                                         | %      | NA                         | 11,5       | 26.254.500  | 13         | 26.254.500  | 14,5       | 27.042.135,00  | 16         | 37.853.399,05  | 17,5       | 38.421.200     | 19         | 38.997.518     |                  |
| 2    | 18 | 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          | Jumlah Promosi Penanaman Modal                                                                              | Keg    | N/A                        | 1          | 0           | 1          |             | 1          |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                |                  |
| 2    | 18 | 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        | Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP                                        | %      | 80                         | 100        | 40.235.000  | 100        | 40.235.000  | 100        | 41.442.050,00  | 100        | 42.685.311,50  | 100        | 43.965.870,85  | 100        | 45.284.846,97  |                  |
| 2    | 18 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         | Persentase Peningkatan Ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku | %      | N/A                        | 100        | 68.594.466  | 100        | 68.594.466  | 100        | 70.652.299,98  | 100        | 72.771.868,98  | 100        | 73.863.447     | 100        | 74.971.399     |                  |
| 2    | 18 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            | Persentase Peningkatan ketersediaan Data/Informasi Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Elektronik        | %      | 80                         | 100        | -           | 100        | -           | 100        | -              | 100        | 50.000.000     | 100        | 50.750.000     | 100        | 51.511.250     |                  |
| 2    | 19 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                      |                                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 19 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                   | %      | NA                         | 31         | 310.600.000 | 31         | 310.600.000 | 31         | 319.918.000,00 | 31         | 329.515.540,00 | 31         | 339.401.006,20 | 31         | 349.583.036,39 |                  |



| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                           | SATUAN  | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |    |   |                                                               |                                                                                               |         |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |    |   | 2                                                             | 3                                                                                             | 4       | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
| 2    | 19 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN        | Peningkatan prestasi olahraga                                                                 | %       | NA                         | 30         | 38.701.500  | 40         | 38.701.500  | 50         | 39.862.545,00  | 50         | 41.058.421,35  | 50         | 42.290.173,99  | 50         | 43.558.879,21  |                  |
|      |    |   |                                                               | Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan             | %       | NA                         | 25         |             | 30         |             | 35         |                | 35         |                | 35         |                | 35         |                |                  |
| 2    | 19 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PRAMUKA                        | Cakupan sekolah yang membentuk organisasi kepramukaan                                         | %       | NA                         | 90         |             | 100        |             | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                |                  |
| 2    | 20 |   | URUSAN STATISTIK                                              |                                                                                               |         |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 20 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %       | 70                         | 75         | 83.614.500  | 80         | 83.614.500  | 85         | 86.122.935,00  | 90         | 88.706.623,05  | 100        | 91.367.821,74  | 100        | 94.108.856,39  |                  |
|      |    |   |                                                               | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah     | %       | 70                         | 75         |             | 80         |             | 85         |                | 90         |                | 100        |                | 100        |                |                  |
| 2    | 21 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                         |                                                                                               |         |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 21 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                         | %       | 30                         | 50         | 11.734.000  | 100        | 11.734.000  | 100        | 12.086.020,00  | 100        | 12.448.600,60  | 100        | 12.822.058,62  | 100        | 13.206.720,38  |                  |
| 2    | 22 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                         |                                                                                               |         |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 22 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                               | Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                    | %       | 100                        | 100        | 85.099.496  | 100        | 85.099.496  | 100        | 87.652.480,88  | 100        | 90.282.055,31  | 100        | 92.990.516,97  | 100        | 95.780.232,47  |                  |
|      |    |   |                                                               | Dokumen Rencana Aksi Karya Budaya                                                             | Dokumen |                            |            |             |            |             | 1          |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 2    | 22 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                     | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                      | kali    | 30                         | 50         | 134.509.000 | 50         | 134.509.000 | 100        | 138.544.270,00 | 100        | 152.700.598,10 | 100        | 154.991.107,07 | 100        | 157.315.973,68 |                  |





| KODE |    |   | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)                                                                     | SATUAN | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH             |
|------|----|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------|
|      |    |   |                                                                          |                                                                                                            |        |                                     | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                              |
| 1    |    |   | 2                                                                        | 3                                                                                                          | 4      | 5                                   | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18                           |
|      |    |   |                                                                          | Persentase sanggar seni yang dibina                                                                        | %      | 100                                 | 100        | -           | 100        | -           | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                |                              |
| 2    | 22 | 4 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                         | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                                    | Unit   | 189                                 | 194        | 122.595.000 | 199        | 122.595.000 | 204        | 126.272.850,00 | 209        | 150.061.035,50 | 214        | 152.311.951,03 | 219        | 154.596.630,30 |                              |
| 2    | 23 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                  |                                                                                                            |        |                                     |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                              |
| 2    | 23 | 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                           | Cakupan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan              | %      | 10                                  | 17,54      | 619.944.300 | 21,93      | 619.944.300 | 26,32      | 638.542.629,00 | 35,09      | 667.698.907,87 | 52,63      | 734.468.798,66 | 70,18      | 738.141.142,65 |                              |
|      |    |   |                                                                          | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Judul)                                                  | Jumlah | 3000                                | 3000       | 0           | 4000       |             | 5000       |                | 6000       |                | 7000       |                | 8000       |                |                              |
| 2    | 23 | 3 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                     | Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan dilestarikan                             | %      | NA                                  |            | -           | 15         | -           | 20         | -              | 20         | -              | 20         | -              | 20         |                |                              |
| 2    | 24 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                     |                                                                                                            |        |                                     |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                              |
| 2    | 24 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban | %      | NA                                  | 50         | 173.763.500 | 60         | 173.763.500 | 70         | 178.976.405,00 | 70         | 184.345.697,15 | 70         | 189.876.068,06 | 70         | 195.572.350,11 |                              |
| 2    | 24 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                              | Cakupan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip                  | %      | NA                                  | 30         | -           | 40         | -           | 50         | -              | 50         | -              | 50         | -              | 50         | -              |                              |
| 3    | 25 |   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                              |                                                                                                            |        |                                     |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                              |
| 3    | 25 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                        |                                                                                                            |        |                                     |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                              |
| 3    | 25 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                    | Produksi perikanan tangkap                                                                                 | Ton    | 7299                                | 7299       |             | 7663       |             | 8249       | 623.348.668    | 8850       | 623.348.668    | 9292       | 623.348.668    | 9756       | 623.348.668    | Dinas Perikanan dan Kelautan |



| KODE |    |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                     | SATUAN          | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH                |
|------|----|---|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------|
|      |    |   |  |                                                           |                                                                         |                 |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                                 |
| 1    |    |   |  | 2                                                         | 3                                                                       | 4               | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18                              |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah bina kelompok nelayan                                            | Kelompok        | 72                         | 72         |             | 75         |             | 80         |             | 84         |                | 88         |                | 92         |                |                                 |
| 3    | 25 | 3 |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                    | Produksi perikanan budidaya                                             | Ton             | 88                         | 88         | 476.685.000 | 93         | 476.685.000 | 98         | 490.985.550 | 103        | 505.715.116,50 | 108        | 520.886.570,00 | 112        | 536.513.167,09 | Dinas Perikanan dan Kelautan    |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah bina kelompok budidaya                                           | Kelompok        | 79                         | 84         |             | 89         |             | 94         |             | 99         |                | 104        |                | 109        |                |                                 |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah ketersediaan bibit ikan air tawar                                | Ekor            | 65.000                     | 65.000     |             | 68.250     |             | 71.500     |             | 74.750     |                | 78.000     |                | 81.050     |                |                                 |
|      |    |   |  |                                                           | Luasan lahan potensi budidaya                                           | Ha              | 5,5                        | 5,5        |             | 5,8        |             | 6,1        |             | 6,4        |                | 6,7        |                | 7,0        |                |                                 |
| 3    | 25 | 4 |  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN     | Jumlah pengawasan/pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap              | Kelompok        | NA                         | 0          |             | 5          |             | 5          |             | 5          |                | 5          |                | 5          |                |                                 |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya                       | Kelompok        | NA                         | 0          |             | 5          |             | 5          |             | 5          |                | 5          |                | 5          |                |                                 |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah pengawasan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Kelompok        | NA                         | 0          |             | 5          |             | 5          |             | 5          |                | 5          |                | 5          |                |                                 |
| 3    | 25 | 5 |  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN          | Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran                                | Kelompok        | NA                         | 0          |             | 5          |             | 5          |             | 5          |                | 5          |                | 5          |                | Dinas Perikanan dan Kelautan    |
|      |    |   |  |                                                           | Angka Konsumsi Ikan                                                     | Kg/Kapita/Tahun | 34,32                      | 34,32      |             | 34,34      |             | 34,36      |             | 34,38      |                | 34,40      |                | 34,42      |                |                                 |
|      |    |   |  |                                                           | Jumlah Pemasar                                                          | Orang           | NA                         | 40         |             | 40         |             | 40         |             | 40         |                | 40         |                | 40         |                |                                 |
| 3    | 26 |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                     |                                                                         |                 |                            |            |             |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |                                 |
| 3    | 26 | 2 |  | PROGRAM PENGINGKATAN DAYA TARIK                           | Persentase Pengembangan Lokasi Pariwisata                               | %               | 23,26                      | 23,26      | 131.517.500 | 32,56      | 283.550.000 | 34,88      | 292.056.500 | 37,21      | 300.818.195    | 39,53      | 309.842.741    | 41,86      | 340.827.015    | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |



| KODE |    |   |                                                                                                    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |                  | TAHUN 2028 |                  | TAHUN 2029 |                  | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH                |
|------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------------------------|
|      |    |   |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                     |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.           |                                 |
| 1    |    |   |                                                                                                    | 2                                                                                                                        | 3                                   | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11               | 12         | 13               | 14         | 15               | 16         | 17            | 18                              |
|      |    |   |                                                                                                    | DESTINASI PARIWISATA                                                                                                     |                                     |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |               |                                 |
| 3    | 26 | 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Jumlah kunjungan wisatawan                                                                                               | Orang                               | 31.927 |                            | 38.927     | 159.776.000   | 39.927     | 250.000.000   | 40.927     | 257.500.000,00   | 41.927     | 265.225.000,00   | 42.927     | 273.181.750,00   | 43.927     | 300.499.925   | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|      |    |   |                                                                                                    | Persentase Pengetahuan wisatawan                                                                                         | %                                   | 100    |                            | 100        |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |               |                                 |
| 3    | 26 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk yang Mendapatkan Perlindunginya Hak Kekayaan Intelektual | %                                   | 20     |                            | 40         | 0             | 60         |               | 60         | 62.334.867       | 60         | 62.334.867       | 60         | 62.334.867       | 60         | 68.568.354    | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|      |    |   |                                                                                                    | Produk benda dan tak benda yang Mendapatkan Perlindunginya Hak Kekayaan Intelektual                                      |                                     | NA     |                            | 1          |               |            |               | 1          |                  | 1          |                  | 1          |                  | 2          |               |                                 |
|      |    |   |                                                                                                    | Cakupan UMKM Ekraf yang Dibina                                                                                           |                                     |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |               |                                 |
| 3    | 26 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                               | %                                   | 100    |                            | 100        | 283.550.000   | 100        | 1.200.000.000 | 100        | 2.236.000.000,00 | 100        | 2.459.600.000,00 | 100        | 2.705.560.000,00 | 100        | 2.759.671.200 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3    | 27 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                                                                                          |                                     |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |               |                                 |
| 3    | 27 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                               | Persentase Kelompok Tani mendapat Bantuan Benih                                                                          | %                                   | 87,56  |                            | 94,29      | 2.644.985.500 | 96,65      | 2.644.985.500 | 100        | 3.724.335.065    | 100        | 4.096.768.572    | 100        | 4.506.445.429    | 100        | 4.957.089.972 | DINAS PERTANIAN                 |
|      |    |   |                                                                                                    | Produktivitas padi                                                                                                       | Ton/Ha                              | 4      |                            | 5,46       |               | 5,74       |               | 6,02       |                  | 6,02       |                  | 6,02       |                  | 6,02       |               |                                 |
|      |    |   |                                                                                                    | Produksi jagung                                                                                                          | Ton/Ha                              | 4      |                            | 4,6        |               | 4,8        |               | 4,5        |                  | 5          |                  | 5          |                  | 5          |               |                                 |
|      |    |   |                                                                                                    | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                                                                | Ton                                 |        |                            |            |               |            |               |            |                  |            |                  |            |                  |            |               |                                 |



| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                   | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |                  | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH            |
|------|----|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------------------------|
|      |    |   |                                                                         |                                                                                                       |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.              | TARGET     | RP.           |                             |
| 1    |    |   | 2                                                                       | 3                                                                                                     | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15               | 16         | 17            | 18                          |
| 3    | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Luas lahan pertanian fungsional produktif                                                             | Ha     | 6510,3                     | 6550       | 8.414.000     | 6570       | 8.414.000     | 6590       | 8.666.420,00  | 6600       | 1.000.000.000 | 6650       | 1.100.000.000,00 | 6670       | 1.254.000.000 | DINAS PERTANIAN             |
|      |    |   |                                                                         | Perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan unggulan                                                | Ha     | 15.591                     | 21.827     |               | 22.918     |               | 24.064     |               | 25.267     |               | 26.267     |                  | 26.267     |               | DINAS PERTANIAN             |
| 3    | 27 | 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan                                                | %      | 80                         | 88,2       | 1.126.330.500 | 92,61      | 1.126.330.500 | 92,61      | 1.637.120.415 | 95         | 1.800.832.457 | 100        | 1.980.915.702    | 100        | 2.278.053.057 | DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN |
| 3    | 27 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | %      | 100                        | 100        | 249.598.000   | 100        | 249.598.000   | 100        | 257.085.940   | 100        | 264.798.518   | 100        | 272.742.474      | 100        | 319.108.694   | DINAS PERTANIAN DAN KP      |
| 3    | 27 | 6 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah                        | %      | 70                         | 77,18      |               | 81,03      |               | 81,03      |               | 100        |               | 100        |                  | 100        |               | DINAS PERTANIAN DAN KP      |
| 3    | 27 | 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | Cakupan Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan Pertanian                                              | %      | 80                         | 88,2       | 3.792.021.000 | 92,61      | 3.792.021.000 | 92,61      | 3.906.781.630 | 100        | 4.062.955.079 | 100        | 4.266.102.833    | 100        | 4.650.052.088 | DINAS PERTANIAN DAN KP      |
| 3    | 28 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                    |                                                                                                       |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |               |                             |
| 3    | 28 | 4 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA             | Indeks keanekaragaman hayati                                                                          | %      |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |               | DINAS LH                    |
| 3    | 29 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM                                         |                                                                                                       |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |               |                             |
| 3    | 29 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN EBT                                                 | Cakupan Kawasan akses bauran EBT                                                                      | %      |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |               |                             |
| 3    | 30 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                  |                                                                                                       |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |               |                             |





| KODE |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN        | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                           | SATUAN  | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH        |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
|      |    |   |                                                                     |                                                                               |         |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           |                         |
| 1    |    |   | 2                                                                   | 3                                                                             | 4       | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15            | 16         | 17            | 18                      |
| 3    | 30 | 2 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Cakupan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beroleh ijin | %       | 43,29                      | 44,1       |             | 46,31      |             | 46,31      | 24.933.947  | 50         | 24.933.947  | 85         | 24.933.947    | 90         | 24.933.947    | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
| 3    | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Fasilitasi bimbingan dan pemantauan pengelolaan distribusi perdagangan        | %       | 14,29                      | 28,57      | 272.400.000 | 42,86      | 272.400.000 | 57,14      | 280.572.000 | 71,43      | 288.989.160 | 85,71      | 297.658.835   | 100        | 306.588.600   | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
| 3    | 30 | 4 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | %       | NA                         | 100        | 20.000.000  | 100        | 333.131.244 | 100        | 955.801.291 | 100        | 984.475.330 | 100        | 1.014.009.590 | 100        | 1.044.429.877 | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
| 3    | 30 | 6 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten     | %       | 1,33                       | 17,66      | 15.000.000  | 35,66      | 15.000.000  | 52,33      | 15.450.000  | 69         | 55.913.500  | 85,66      | 58.709.175    | 100        | 61.644.634    | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
|      |    |   |                                                                     | Cakupan Pengawasan Kemetrolagian                                              | %       | 1,33                       | 17,66      |             | 35,66      |             | 52,33      |             | 69         |             | 85,66      |               | 100        |               |                         |
|      |    |   |                                                                     | Pemantauan terhadap barang-barang yang kadaluwarsa (BDKT)                     | %       | 1,33                       | 17,67      |             | 35,66      |             | 52,33      |             | 69         |             | 85,66      |               | 100        |               |                         |
| 3    | 30 | 7 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan                         | %       | NA                         | 16,66      | 0           | 33,3       | 8.690.380   | 50         | 24.933.947  | 66,66      | 25.681.965  | 83,3       | 26.452.424    | 100        | 27.245.997    | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
|      |    |   |                                                                     |                                                                               |         |                            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               |                         |
| 3    | 31 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                            |                                                                               |         |                            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               |                         |
| 3    | 31 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri                                   | Dokumen | NA                         | 1          | 181.587.000 | 1          | 181.587.000 | 1          | 187.034.610 | 1          | 292.645.648 | 1          | 198.425.018   | 1          | 204.377.768   | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
| 3    | 31 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA             | Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten    | %       | NA                         |            | 0           | 20         |             | 25         | 31.167.433  | 25         | 31.167.433  | 25         | 31.167.433    | 25         | 31.167.433    | DINKOP UKM DAN PERINDAG |



| KODE |    |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                | SATUAN   | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH        |
|------|----|---|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
|      |    |   |  |                                                              |                                                                                    |          |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           |                         |
| 1    |    |   |  | 2                                                            | 3                                                                                  | 4        | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18                      |
| 3    | 31 | 4 |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL       | Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten                                | Kawasan  | 1                          | 1          | 15.000.000    | 2          | 15.000.000    | 2          | 15.450.000    | 2          | 15.913.500    | 2          | 16.390.905    | 2          | 16.882.632    | DINKOP UKM DAN PERINDAG |
| 3    | 32 |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                      |                                                                                    |          |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                         |
| 3    | 32 | 2 |  | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                     | Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis | Kawasan  | 0                          | 1          | 26.677.000    | 2          | 26.677.000    | 2          | 27.477.310    | 2          | 28.301.629    | 2          | 29.150.678    | 2          | 30.025.199    | DINAS NAKERT RAS PTSP   |
| 3    | 32 | 3 |  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                     | Persentase Pembangunan di Kawasan Transmigrasi                                     | %        | 0                          | NA         |               | 100        |               | 100        | 22.648.335    | 100        | 32.648.335    | 100        | 34.280.752    | 100        | 35.994.789    | DINAS NAKERT RAS PTSP   |
| 3    | 32 | 4 |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                    | Kawasan Trans binaan yang berkembang                                               | Kimtrans | 0                          | 1          |               | 2          |               | 2          | 21.609.420    | 2          | 51.609.420    | 2          | 54.189.891    | 2          | 56.899.386    | DINAS NAKERT RAS PTSP   |
| 4    |    |   |  | PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                |                                                                                    |          |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                         |
| 4    | 1  |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                    |          |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                         |
| 4    | 1  | 2 |  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                | Skor Hasil EKPPD                                                                   | %        | 2,7                        | 3,1        | 5.619.651.500 | 3,2        | 5.619.651.500 | 3,5        | 5.788.241.045 | 4,3        | 5.961.888.276 | 5          | 6.140.744.925 | 5          | 6.387.754.079 | SETDA                   |
|      |    |   |  |                                                              | Cakupan produk hukum yang ditetapkan                                               | %        | 60                         | 65         |               | 67         |               | 70         |               | 73         |               | 75         |               | 87         |               |                         |
|      |    |   |  |                                                              | Indeks SAKIP                                                                       | Angka    | 60                         | 60,15      |               | 65         |               | 67         |               | 70         |               | 75         |               | 80         |               |                         |
|      |    |   |  |                                                              | Jumlah kerja sama daerah                                                           | Angka    | 2                          | 3          |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |                         |
|      |    |   |  |                                                              | Indeks Kebijakan Kesra                                                             | Angka    | 50                         | 55         |               | 60         |               | 62,5       |               | 65         |               | 67,5       |               | 70         |               |                         |
|      |    |   |  |                                                              | Cakupan layanan bantuan hibah/bansos lembaga                                       | %        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                         |



| KODE |   |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|
|      |   |   |  |                                                                    |                                                                                                |        |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           |                  |
| 1    |   |   |  | 2                                                                  | 3                                                                                              | 4      | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18               |
|      |   |   |  |                                                                    | Cakupan layanan bantuan hibah/bansos mahasiswa                                                 | orang  | 4258                       | 1000       |               | 1000       |               | 1000       |               | 1000       |               | 1000       |               | 1000       |               | SETDA            |
| 4    | 1 | 3 |  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                               | Jumlah kebijakan perekonomian dan pembangunan                                                  | Angka  | NA                         |            | 1.431.425.200 |            | 1.431.425.200 |            | 831.131.557   |            | 831.131.557   |            | 831.131.557   |            | 831.131.557   |                  |
|      |   |   |  |                                                                    | Cakupamn Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | %      |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
|      |   |   |  |                                                                    | Proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE                                                      |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 4    | 1 | 4 |  | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM                                          | Cakupan fasilitas layanan protokoler                                                           | %      |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 4    | 2 |   |  | SEKRETARIAT DPRD                                                   |                                                                                                |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
|      |   | 2 |  | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN                          |                                                                                                |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | SETWAN DPRD      |
| 4    | 2 | 3 |  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Persentase Perda yang dibahas dan ditetapkan                                                   | %      | 80                         | 100        | 6.848.089.940 | 100        | 6.848.089.940 | 100        | 7.053.532.638 | 100        | 7.265.138.617 | 100        | 7.483.092.776 | 100        | 7.707.585.559 | SETWAN DPRD      |
| 5    | 1 |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN                             |                                                                                                |        |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 5    | 1 | 2 |  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Cakupan keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                          | %      | 100                        | 100        | 882.141.000   | 100        | 612.000.000   | 100        | 621.180.000   | 100        | 630.497.700   | 100        | 639.955.166   | 100        | 649.554.493   | BAPELITBANGDA    |
|      |   |   |  |                                                                    | Cakupan keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD                                                    | %      |                            | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               |                  |
| 5    | 1 | 3 |  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cakupan keselarasan RKPD dengan RENSTRA                                                        | %      |                            | 100        | 760.374.500   | 100        | 800.000.000   | 100        | 812.000.000   | 100        | 824.180.000   | 100        | 836.542.700   | 100        | 849.090.841   | BAPELITBANGDA    |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                       | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |                 | TAHUN 2026 |                 | TAHUN 2027 |                 | TAHUN 2028 |                 | TAHUN 2029 |                 | TAHUN 2030 |                 | PERANGKAT DAERAH        |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------|
|      |   |   |                                                              |                                                                           |        |                            | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             | TARGET     | RP.             |                         |
| 1    |   |   | 2                                                            | 3                                                                         | 4      | 5                          | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13              | 14         | 15              | 16         | 17              | 18                      |
| 5    | 2 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN                          |                                                                           |        |                            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | Persentase SILPA terhadap APBD                                            | %      |                            | 0          | 105.793.903.500 | 0          | 105.793.903.500 | 0          | 108.967.720.605 | 0          | 112.236.752.223 | 0          | 115.603.854.790 | 0          | 119.071.970.434 | BADAN KEUANGAN DAN ASET |
| 5    | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                      | Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB                               | %      | 85                         | 95         | 945.041.000     | 100        | 945.041.000     | 100        | 973.392.230     | 100        | 1.002.593.997   | 100        | 1.032.671.817   | 100        | 1.063.651.971   | BADAN KEUANGAN DAN ASET |
|      |   |   |                                                              | Jumlah Bidang Tanah milik Pemda yang bersertifikat                        | %      | 30                         | 80         |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 |                         |
| 5    | 2 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                        | Persentase piutang pajak yang tertagih                                    | %      | 80                         | 90         | 353.268.000     | 100        | 363.866.040     | 100        | 374.782.021     | 100        | 386.025.482     | 100        | 397.606.246     | 100        | 409.534.434     | BADAN KEUANGAN DAN ASET |
|      |   |   |                                                              | Persentase cakupan obyek pajak dan retribusi daerah                       | %      | 80                         |            |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 |                         |
| 5    | 3 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN                       |                                                                           |        |                            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                         |
| 5    | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN                                          | Cakupan peningkatan disiplin aparatur                                     | %      | 100                        | 100        | 1.089.068.000   | 100        | 1.089.068.000   | 100        | 1.110.849.360   | 100        | 1.133.066.347   | 100        | 1.155.727.674   | 100        | 1.178.842.228   |                         |
|      |   |   |                                                              | Persentase ASN yang lulus sertifikasi kompetensi                          | %      |                            | 79         |                 | 80         |                 | 85         |                 | 87         |                 | 90         |                 | 93         |                 |                         |
|      |   |   |                                                              | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kinerja | %      |                            | 70         |                 | 75         |                 | 80         |                 | 85         |                 | 87         |                 | 90         |                 |                         |
| 5    | 4 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN          |                                                                           |        |                            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                         |
| 5    | 4 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     | Persentase PNS yang mengikuti Pelatihan                                   | %      | 3                          | 7          | 848.752.500     | 10         | 848.752.500     | 10         | 874.215.075     |            | 900.441.527     |            | 927.454.773     |            | 955.278.416     | BKPSDM                  |
| 5    | 5 |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN       |                                                                           |        |                            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                         |
| 5    | 5 | 2 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                   | Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam    | %      |                            | 58,59      | 304.438.200     | 73,24      | 534.438.200     | 91,55      | 548.171.346     | 91,55      | 562.270.486     | 92         | 576.745.681     | 95         | 591.607.273     | BAPELITBANGDA           |





| KODE |   |   |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                              | SATUAN  | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |               | TAHUN 2026 |               | TAHUN 2027 |               | TAHUN 2028 |               | TAHUN 2029 |               | TAHUN 2030 |               | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|
|      |   |   |  |                                                             |                                                                  |         |                            | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           | TARGET     | RP.           |                  |
| 1    |   |   |  | 2                                                           | 3                                                                | 4       | 5                          | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18               |
|      |   |   |  |                                                             | perencanaan pembangunan                                          |         |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Persentase Perangkat Daerah yang melakukan inovasi               | %       |                            | 35,51      | 0             | 44,38      |               | 55,48      |               | 60         |               | 60         |               | 60         |               |                  |
| 6    |   |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN                       |                                                                  |         |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 6    | 1 |   |  | INSPEKTORAT DAERAH                                          |                                                                  |         |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 6    | 1 | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Jumlah PD yang diaudit                                           | PD      | 10                         | 7          | 1.306.362.000 | 10         | 1.306.362.000 | 12         | 1.325.957.430 | 15         | 1.345.846.791 | 17         | 1.366.034.493 | 20         | 1.386.525.011 | INSPEKTORAT      |
|      |   |   |  |                                                             | Dokumen yang direviu                                             | Dokumen | 10                         | 6          |               | 10         |               | 12         |               | 15         |               | 17         |               | 20         |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Jumlah PD yang dievaluasi                                        | PD      | 30                         | 30         |               | 30         |               | 30         |               | 30         |               | 30         |               | 30         |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Jumlah Desa yang diaudit                                         | Desa    | 40                         | 15         |               | 17         |               | 20         |               | 25         |               | 27         |               | 30         |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Nilai Kapabilitas APIP                                           | Level   | 2,17                       | 2,20       |               | 2,25       |               | 2,30       |               | 2,35       |               | 2,45       |               | 2,75       |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Persentase tindakan lanjut hasil pengawasan (internal/eksternal) | %       | 83,17                      | 84         |               | 85         |               | 85         |               | 87         |               | 88         |               | 89         |               |                  |
|      |   |   |  |                                                             | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)     | Level   | NA                         | 1          |               | 2          |               | 2          |               | 2          |               | 2          |               | 2          |               |                  |
| 6    | 1 | 3 |  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani                   | %       | 100                        | 100        | 289.296.000   | 100        | 289.296.000   | 100        | 293.635.440   | 100        | 298.039.972   | 100        | 302.510.571   | 100        | 307.048.230   | INSPEKTORAT      |
| 7    |   |   |  | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                                  |         |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |
| 7    | 1 |   |  | KECAMATAN                                                   |                                                                  |         |                            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                  |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                         | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                                                              |                                                                                                                                                             |        |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |   |   | 2                                                            | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
| 7    | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                                                                   | %      | 90                         | 90         | 427.500.500 | 100        | 427.500.500 | 100        | 433.913.008    | 100        | 440.421.703    | 100        | 447.028.028    | 100        | 453.733.449    | KECAMATAN        |
| 7    | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                               | %      | 90                         | 90         | 482.990.332 | 100        | 482.990.332 | 100        | 490.235.186,98 | 100        | 497.588.714,78 | 100        | 505.052.545,51 | 100        | 512.628.333,69 | KECAMATAN        |
| 7    | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan                                                                                     | %      | NA                         | 100        | 19.555.000  | 100        | 19.555.000  | 100        | 20.141.650,00  | 100        | 20.745.899,50  | 100        | 21.368.276,49  | 100        | 22.009.324,78  |                  |
| 7    | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Cakupan kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dan pembinaan kerukunan beragama                                                       | %      | 100                        | 100        | 163.903.664 | 100        | 163.903.664 | 100        | 327.807.328    | 100        | 655.614.656    | 100        | 1.311.229.312  | 100        | 2.622.458.624  | KECAMATAN        |
| 7    | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Cakupan pembinaan pemerintahan desa                                                                                                                         | %      | 90                         | 100        | 7.275.000   | 100        | 7.275.000   | 100        | 7.493.250,00   | 100        | 7.718.047,50   | 100        | 7.949.588,93   | 100        | 8.188.076,59   |                  |
| 8    |   |   | UNSUR PEMERINTAN UMUM                                        |                                                                                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 8    | 1 |   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  |                                                                                                                                                             |        |                            |            |             |            |             |            |                |            |                |            |                |            |                |                  |
| 8    | 1 | 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (%) | %      | 60                         | 80         | 860.251.800 | 100        | 860.251.800 | 100        | 873.155.577,00 | 100        | 886.252.910,66 | 100        | 899.546.704,31 | 100        | 913.039.904,88 | BAKESBANGPOL     |
|      |   |   |                                                              | Jumlah kader wawasan kebangsaan                                                                                                                             | Jumlah | 72                         | 72         |             | 72         |             | 72         |                | 72         |                | 72         |                | 72         |                |                  |
|      |   |   |                                                              | Persentase sekolah atau komunitas yang difasilitasi dalam pembinaan wawasan kebangsaan                                                                      |        | 70                         | 80         |             | 80         |             | 80         |                | 90         |                | 90         |                | 100        |                |                  |



| KODE |   |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                                                      | SATUAN  | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |                | TAHUN 2028 |                | TAHUN 2029 |                | TAHUN 2030 |                | PERANGKAT DAERAH |
|------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|      |   |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |         |                            | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.         | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            | TARGET     | RP.            |                  |
| 1    |   |   | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                        | 4       | 5                          | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18               |
| 8    | 1 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pelaksanaan Kegiatan pembinaan politik di daerah                                                                                                                              | %       | 60                         | 80         | 531.669.654 | 100        | 531.669.654 | 100        | 539.644.698,81 | 100        | 547.739.369,29 | 100        | 555.955.459,83 | 100        | 611.551.005,81 | BAKESBANGPOL     |
| 8    | 1 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN                                                                           | Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan                                                                                                                                           | Jumlah  | NA                         | 22         |             | 25         |             | 30         |                | 33         |                | 35         |                | 35         |                | BAKESBANGPOL     |
|      |   |   |                                                                                                                                        | Jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar                                                                                                                                              | Jumlah  | NA                         | 22         |             | 25         |             | 30         |                | 33         |                | 35         |                | 35         |                |                  |
| 8    | 1 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | %       |                            | 80         | 43.060.000  | 100        | 43.060.000  | 100        | 44.451.800,00  | 100        | 45.682.354,00  | 100        | 47.052.824,62  | 100        | 48.464.409,36  | BAKESBANGPOL     |
| 8    | 1 | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara                    | %       |                            | 80         | 212.404.000 | 100        | 212.919.500 | 100        | 216827881,1    | 100        | 220.985.121,35 | 100        | 225.404.824,03 | 100        | 229.912.920,51 | BAKESBANGPOL     |
|      |   |   |                                                                                                                                        | Jumlah Informasi Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing yang Berasal dari Masyarakat                                                                                                | Laporan | 40                         | 40         |             | 40         |             | 40         |                | 40         |                | 40         |                | 40         |                |                  |



| KODE |  |  |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                            | SATUAN   | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TAHUN 2025 |     | TAHUN 2026 |     | TAHUN 2027 |     | TAHUN 2028 |     | TAHUN 2029 |     | TAHUN 2030 |     | PERANGKAT DAERAH |
|------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------------|
|      |  |  |  |                                                             |                                                                                                |          |                            | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. | TARGET     | RP. |                  |
| 1    |  |  |  | 2                                                           | 3                                                                                              | 4        | 5                          | 6          | 7   | 8          | 9   | 10         | 11  | 12         | 13  | 14         | 15  | 16         | 17  | 18               |
|      |  |  |  |                                                             | Jumlah Kegiatan terkait kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing yang melibatkan masyarakat | Kegiatan | 3                          | 3          |     | 3          |     | 3          |     | 3          |     | 3          |     | 3          |     |                  |
|      |  |  |  |                                                             | Jumlah rekomendasi strategis hasil koordinasi intelegen yang disampaikan kepada pemerintah     | Jumlah   | 2                          | 2          |     | 2          |     | 2          |     | 2          |     | 2          |     | 2          |     |                  |
|      |  |  |  |                                                             | Jumlah Pertemuan Intelegen yang dilaksanakan                                                   | Kegiatan | 4                          | 4          |     | 4          |     | 4          |     | 4          |     | 4          |     | 4          |     |                  |





#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diformulasikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek-aspek tersebut ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator

outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, pembangunan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk daerah, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumba Tengah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan IKK Tahun 2025 – 2029 sebagaimana pada tabel berikut:



4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumba Tengah

| NO | INDIKATOR                                             | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                       |        |                  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | Indeks Reformasi Birokrasi                            | Poin   | 44,41            | 45     | 45,5   | 45,7   | 46     | 47     | 47     |
| 2  | Nilai Akuntabilitas Kinerja                           | Nilai  | 60,15            | 60,25  | 60,30  | 60,35  | 60,40  | 60,45  | 60,50  |
| 3  | Opini BPK                                             | Opini  | WTP              | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | Indeks | NA               | 75     | 80     | 85     | 85,20  | 80,30  | 90     |
| 5  | Skor Survey Penilaian Integritas (SPI)                | Skor   | 73,84            | 75     | 76     | 77     | 78     | 79     | 80     |
| 6  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,19             | 2,20   | 2,25   | 2,30   | 2,45   | 3,00   | 3,10   |
| 7  | Indeks Pembangunan Manusia                            | Poin   | 64,46            | 64,48  | 65,07  | 65,66  | 66,25  | 66,84  | 67,43  |
| 8  | Harapan Lama Sekolah                                  | Tahun  | 13,14            | 13,30  | 13,40  | 13,50  | 13,60  | 13,70  | 13,80  |
| 9  | Rata-Rata Lama Sekolah                                | Tahun  | 7,20             | 7,76   | 8,09   | 8,42   | 8,75   | 9,08   | 9,41   |
| 10 | Usia Harapan Hidup                                    | Tahun  | 69,46            | 69,50  | 69,57  | 69,80  | 70,03  | 70,26  | 70,45  |
| 11 | Indeks Harmoni Indonesia                              | Indeks |                  |        |        |        |        |        |        |
| 12 | Indeks Trantibumlinmas                                | Indeks | 73,9             | 74     | 74,50  | 74,80  | 75,00  | 80,00  | 85,00  |
| 13 | Indeks Demokrasi                                      | Poin   | NA               | 79,47  | 81,06  | 84,24  | 85,83  | 87,42  | 89,01  |
| 14 | Indeks Infrastruktur Daerah                           | Indeks |                  |        |        |        |        |        |        |
| 15 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)               | Poin   | 71,40            | 71,57  | 71,74  | 71,91  | 72,08  | 72,25  | 72,42  |
| 16 | Indeks Resiko Bencana                                 | Poin   | 111, 45          | 113,55 | 118,35 | 118,45 | 118,55 | 118,65 | 118,75 |
| 17 | Perumbuhan Ekonomi                                    | %      | 3,71             | 5,25   | 5,5    | 5,8    | 6,2    | 6,6    | 7,0    |
| 18 | Realisasi investasi PMA dan PMDN                      | %      | 2,5              | 2,5    | 2,6    | 2,9    | 3      | 4,5    | 5      |
| 19 | Angka kemiskinan                                      | %      | 30,84            | 29,90  | 28,96  | 28,02  | 27,08  | 26,14  | 25,20  |
| 20 | Indeks Gini                                           | Poin   | 0,334            | 0,375  | 0,369  | 0,363  | 0,357  | 0,351  | 0,345  |
| 21 | Indeks Ketahanan pangan                               | Angka  | 70               | 70     | 75     | 80     | 85     | 90     | 95     |
| 22 | Skor Pola Pangan harapan                              | Skor   | 73               | 75     | 80     | 85     | 90     | 95     | 95,5   |
| 23 | Persentase PPKS yang Tertangani                       | %      | NA               | 10     | 12     | 16     | 20     | 25     | 25     |

| NO | INDIKATOR           | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET |        |        |        |        |        |
|----|---------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                     |        |                  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 24 | Nilai Tukar Petani  | Nilai  | 100,96           | 101,45 | 101,94 | 102,43 | 102,92 | 103,41 | 103,91 |
| 25 | Nilai Tukar Nelayan | Nilai  | 99,12            | 99,12  | 100,72 | 104,22 | 107,72 | 111,22 | 114,72 |



4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

| NO | INDIKATOR                                                                    | SATUAN    | TARGET |        |         |        |        |        | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|    |                                                                              |           | 2025   | 2026   | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   |     |
| 1  | 2                                                                            | 3         | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10  |
| I. | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI                                                 |           |        |        |         |        |        |        |     |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan                                                      | Angka     | 70     | 75     | 80      | 85     | 90     | 95     |     |
| 2  | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan sarpras Pendukung Kemandirian Pangan | %         | 30     | 40     | 50      | 70     | 80     | 90     |     |
| 3  | Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan                                     | %         | 12,12  | 12,42  | 12,72   | 13,02  | 13,32  | 14,62  |     |
| 4  | Cakupan Rumah Tangga Berlistrik                                              | %         | 80,72  | 84,76  | 89      | 89     | 94     | 99     |     |
| 5  | Akses rumah tangga terhadap konsumsi air                                     | %         | 68,43  | 68,43  | 71,89   | 76,89  | 81,89  | 86,89  |     |
| 6  | IKLH Daerah                                                                  | Angka     | 71,57  | 71,74  | 71,91   | 72,08  | 72,25  | 72,42  |     |
| 7  | Cakupan penanganan limbah B3 (%)                                             | %         | 26,62  | 29,28  | 32,21   | 37,21  | 42,21  | 47,21  |     |
| 8  | Sampah yang tertangani (%)                                                   | %         | 84,42  | 86,53  | 88,69   | 93,69  | 98,69  | 100    |     |
| 9  | Rumah Tangga dengan sanitasi layak                                           | %         | 65,05  | 71,55  | 78,71   | 83,71  | 88,71  | 93,71  |     |
| 10 | Timbunan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah                        | Kg/Orang  | 252    | 277    | 332     | 398    | 477    | 572    |     |
| 11 | Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah                | %         | 6      | 7      | 8       | 9      | 10     | 11     |     |
| 12 | Penurunan intensitas Emisi GRK                                               | %         | 49     | 57     | 66      | 70     | 74     | 80     |     |
| 13 | IRBencana Daerah                                                             | Angka     | 113,55 | 118,35 | 118,45  | 118,55 | 118,65 | 118,75 |     |
| 14 | Indeks Ketahanan Daerah                                                      | Angka     | 0,25   | 0,30   | 0,32    | 0,35   | 0,40   | 0,43   |     |
| 15 | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                    | %         | 0,99   | 1,02   | 1,05    | 1,07   | 1,09   | 1,12   |     |
| 16 | Rasio Penduduk                                                               | %         |        |        |         |        |        |        |     |
| 17 | Kepadatan Penduduk                                                           | Orang/Km2 | 57     | 60     | 62      | 64     | 66     | 68     |     |
| II | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                               |           |        |        |         |        |        |        |     |
| 1  | Laju pertumbuhan ekonomi                                                     | %         | 5,25   | 5,5    | 5,8     | 6,2    | 6,6    | 7,0    |     |
| 2  | Kontribusi PDRB sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan                   | Angka     | 645,77 | 671,52 | 675,824 | 723,02 | 748,77 | 774,52 |     |
| 3  | Angka kemiskinan                                                             | %         | 29,90  | 28,96  | 28,02   | 27,08  | 26,14  | 25,20  |     |





| NO | INDIKATOR                                                                     | SATUAN      | TARGET |       |       |       |       |       | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                                               |             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | 2                                                                             | 3           | 4      | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
| 3  | PDRB Perkapita                                                                | Juta Rupiah | 16,54  | 17,22 | 17,92 | 18,66 | 19,41 | 20,20 |     |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                  | Angka       | 1,84   | 1,75  | 1,70  | 1,67  | 1,65  | 1,60  |     |
| 5  | Indeks Gini                                                                   | Angka       | 0,375  | 0,369 | 0,363 | 0,357 | 0,351 | 0,345 |     |
| 6  | Indeks Modal Manusia/IPM                                                      | Angka       | 67,48  | 68,05 | 68,57 | 68,87 | 69,99 | 70    |     |
| 7  | Usia Harapan Hidup                                                            | Tahun       | 69,50  | 69,57 | 69,80 | 70,03 | 70,26 | 70,45 |     |
| 8  | Indeks Keluarga Sehat                                                         | Indeks      | 64,57  | 67,62 | 68,98 | 70,32 | 71,67 | 73,02 |     |
| 9  | Prevalensi <i>stunting</i>                                                    | %           | 35,0   | 33,7  | 32,5  | 31,1  | 30,00 | 29,00 |     |
| 10 | Rata-rata Lama Sekolah                                                        | Tahun       | 7,76   | 8,09  | 8,42  | 8,75  | 9,08  | 9,41  |     |
| 11 | Harapan Lama Sekolah                                                          | Tahun       | 13,30  | 13,40 | 13,50 | 13,60 | 13,70 | 13,80 |     |
| 12 | Angka literasi/numerasi                                                       | %           | 68,37  | 70,59 | 72,09 | 73,59 | 75,59 | 77,00 |     |
| 13 | Indeks Pembangunan literasi masyarakat                                        | Angka       |        |       |       |       |       |       |     |
| 14 | Indeks literasi digital                                                       | Angka       |        |       |       |       |       |       |     |
| 15 | Cakupan kepesertaan jamsostek                                                 | %           | 60     | 70    | 80    | 80    | 80    | 80    |     |
| 16 | Indeks kerukunan umat beragama                                                | Angka       | 79     | 80    | 83    | 87    | 90    | 90    |     |
| 17 | Indeks pembangunan kebudayaan                                                 | Angka       |        |       |       |       |       |       |     |
| 18 | Indeks perlindungan anak                                                      | Angka       | 56,52  | 56,75 | 57,98 | 59,21 | 60,44 | 61,67 |     |
| 19 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                          | Angka       | 63,27  | 64,62 | 64,67 | 64,72 | 64,77 | 64,82 |     |
| 20 | Indeks Kesenjangan Gender                                                     | Angka       |        |       |       |       |       |       |     |
| 21 | Indeks Pembangunan Gender                                                     | Angka       | 61,74  | 64,84 | 67,94 | 71,04 | 74,14 | 77,24 |     |
| 22 | Indeks Pembangunan Pemuda                                                     | Angka       | 65     | 75    | 85    | 85    | 85    | 85    |     |
| 23 | Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)        | %           | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 24 | Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | %           | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 25 | Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan  | %           | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 26 | Tingkat Penyelesaian Pendidikan SD/MI/ sederajat                              | %           | 79,36  | 80,66 | 81,96 | 82,96 | 83,78 | 85,93 |     |
| 27 | Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP/MTs/ sederajat                            | %           | 48,25  | 49,55 | 50,85 | 55,85 | 58,85 | 60,85 |     |



| NO | INDIKATOR                                                                             | SATUAN | TARGET  |        |       |       |       |       | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                                                       |        | 2025    | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | 2                                                                                     | 3      | 4       | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
| 28 | Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat                                 | %      | 25,06   | 26,36  | 27,66 | 27,66 | 28    | 30    |     |
| 29 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                          | %      | 60      | 63     | 66    | 69    | 72    | 75    |     |
| 30 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional                          | %      | 60      | 63     | 66    | 69    | 72    | 75    |     |
| 31 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                        | %      | 65      | 68     | 71    | 74    | 77    | 80    |     |
| 32 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional                        | %      | 65      | 68     | 71    | 74    | 77    | 80    |     |
| 33 | Iklim Keamanan SD                                                                     | %      | 75      | 78     | 81    | 84    | 87    | 90    |     |
| 34 | Iklim Keamanan SMP                                                                    | %      | 75      | 78     | 81    | 84    | 87    | 90    |     |
| 35 | Iklim Kebhinekaan SD                                                                  | %      | 73      | 76     | 79    | 82    | 85    | 88    |     |
| 36 | Iklim Kebhinekaan SMP                                                                 | %      | 73      | 76     | 79    | 82    | 85    | 88    |     |
| 37 | Iklim Inklusivitas SD                                                                 | %      | 60      | 63     | 66    | 69    | 72    | 75    |     |
| 38 | Iklim Inklusivitas SMP                                                                | %      | 60      | 63     | 66    | 69    | 72    | 75    |     |
| 39 | Harapan Lama Hidup (Tahun)                                                            | Tahun  | 69,34   | 69,57  | 69,80 | 70,03 | 70,26 | 70,45 |     |
| 40 | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                      | Jumlah | 122     | 109    | 97    | 86    | 77    | 65    |     |
| 41 | Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)                                       | Jumlah | 23,0    | 22,80  | 22,00 | 21,80 | 20,0  | 18,20 |     |
| 42 | Cakupan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir (%)       | %      | 19,49   | 15,49  | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |     |
| 43 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                   | %      | 98,62   | 98,82  | 99,02 | 99,02 | 100   | 100   |     |
| 44 | Persentase rumah layak huni (%)                                                       | %      | 71,18   | 74,74  | 78,48 | 83,48 | 88,48 | 93,48 |     |
| 45 | Rasio Elektrifikasi                                                                   | %      | 81,22   | 85,28  | 89,54 | 94,54 | 99,54 | 100   |     |
| 46 | Persentase rumah tangga berakses air layak                                            | %      | 68,43   | 68,43  | 71,89 | 76,89 | 81,89 | 86,89 |     |
| 47 | Persentase Rumah tangga memiliki sanitasi layak                                       | %      | 65,05   | 71,55  | 78,71 | 83,71 | 88,71 | 93,71 |     |
| 48 | Cakupan penduduk miskin dan PMKS yang terlayani jaminan sosial                        | %      | 66,84   | 70,18  | 75,18 | 80,18 | 85,18 | 90,18 |     |
| 49 | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | %      | 60      | 70     | 80    | 80    | 100   | 100   |     |
| 50 | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)     | %      | < 10,00 | < 5,00 | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| 51 | Skor Pola Pangan Harapan                                                              | Skor   | 75      | 80     | 85    | 90    | 95    | 95,5  |     |



| NO  | INDIKATOR                                                 | SATUAN | TARGET |        |         |        |        |        | KET |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|     |                                                           |        | 2025   | 2026   | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   |     |
| 1   | 2                                                         | 3      | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10  |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH                                   |        |        |        |         |        |        |        |     |
| 1   | Angka ketergantungan                                      |        |        |        |         |        |        |        |     |
| 2   | Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Angka  | 645,77 | 671,52 | 805,824 | 723,02 | 748,77 | 774,52 |     |
| 3   | Rasio PDRB akomodasi makanan dan minuman                  | %      |        |        |         |        |        |        |     |
| 4   | Proporsi PDRB Ekraf                                       | %      | 0,60   | 0,65   | 0,68    | 0,70   | 0,75   | 0,80   |     |
| 5   | Proporsi PDRB Sektor Pariwisata                           | %      | 2,5    | 2,7    | 2,72    | 2,75   | 3      | 3,5    |     |
| 6   | Rasio Kewirausahaan Daerah                                | %      | 0,80   | 0,85   | 0,90    | 0,95   | 1,00   | 1,10   |     |
| 7   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                        | %      | 76,66  | 77     | 78      | 79     | 80     | 81     |     |
| 8   | Indeks Inovasi Daerah                                     | Indeks | 27     | 35,01  | 40,59   | 50,76  | 60,01  | 65,59  |     |
| 9   | Indeks Ekonomi Hijau                                      | Indeks | 50,04  | 50,86  | 60,50   | 61,50  | 62,32  | 62,50  |     |
| 10  | Indeks Ekonomi Biru                                       | Indeks | 50,41  | 59,05  | 67,69   | 76,33  | 84,97  | 93,61  |     |
| 11  | Porsi EBT dalam bauran energi primer                      | %      | 15,05  | 18,12  | 21,19   | 24,26  | 27,33  | 30,4   |     |
| 12  | Indeks pembangunan TIK                                    | Angka  | 3,3    | 3,4    | 3,5     | 3,6    | 3,7    | 3,8    |     |
| 13  | Pembentukan modal tetap bruto                             | Rp     |        |        |         |        |        |        |     |
| 14  | Ekspor barang dan jasa                                    | Rp     |        |        |         |        |        |        |     |
| 15  | Indeks infrastruktur Daerah                               | Angka  |        |        |         |        |        |        |     |
| 16  | Pembangunan Rumah Layak Huni / Rumah Mandiri              | Unit   | 325    | 325    | 325     | 325    | 325    |        |     |
| 17  | Rumah tangga dengan akses hunian layak                    | %      | 71,18  | 74,74  | 78,48   | 83,48  | 88,48  | 93,48  |     |
| 18  | Desa Mandiri                                              | %      | 0,5    | 1,14   | 1,78    | 2,42   | 3,06   | 3,7    |     |
| 19  | Rasio pajak daerah terhadap PDRB                          | %      |        |        |         |        |        |        |     |
| 20  | Tingkat inflasi                                           | %      | 2,12   | 2,5    | 2,00    | 1,9    | 1,7    | 1,5    |     |
| 21  | Nilai Tukar Petani                                        | Nilai  | 101,45 | 101,94 | 102,43  | 102,92 | 103,41 | 103,91 |     |
| 22  | Nilai Tukar Nelayan                                       | Nilai  | 99,12  | 100,72 | 104,22  | 107,72 | 111,22 | 114,72 |     |
| 23  | Angka Kriminalitas Tertangani                             | %      | 71     | 74,55  | 78,05   | 81,55  | 85,05  | 88,55  |     |
| 24  | Indeks Resiko Bencana                                     | Angka  | 113,55 | 118,35 | 118,45  | 118,55 | 118,65 | 118,75 |     |



| NO                      | INDIKATOR                                                     | SATUAN | TARGET       |       |       |       |       |       | KET |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                         |                                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                       | 2                                                             | 3      | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
| 25                      | Angka Kelahiran Total<br>(Total Fertility Rate/TFR)           | Angka  | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |     |
| IV                      | ASPEK PELAYANAN UMUM                                          |        |              |       |       |       |       |       |     |
| 1                       | Indeks Kualitas Perencanaan                                   | Angka  | 5,50         | 6,00  | 6,50  | 7,00  | 7,50  | 8,0   |     |
| 2                       | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                     | %      | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |     |
| 3                       | Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) | %      | 65           | 80    | 85    | 90    | 100   | 100   |     |
| 4                       | Indeks Reformasi Hukum                                        | Angka  | 6,00         | 6,50  | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 78,00 |     |
| 5                       | Indeks SPBE                                                   | Angka  | 2,20         | 2,25  | 2,30  | 2,45  | 3,00  | 3,10  |     |
| 6                       | Indeks Reformasi Birokrasi                                    | Angka  | 45           | 45,5  | 45,7  | 46    | 47    | 47    |     |
| 7                       | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                   | Angka  | 60,25        | 60,30 | 60,35 | 60,40 | 60,45 | 60,50 |     |
| 8                       | Opini BPK                                                     | Opini  | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |     |
| 9                       | Skor SPI                                                      | Angka  | 75           | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    |     |
| 10                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                    | Angka  | 75           | 80    | 85    | 85,20 | 80,30 | 90    |     |
| 11                      | Indeks Pelayanan Publik                                       | Angka  | 1,72         | 1,78  | 1,85  | 2,00  | 2,50  | 2,75  |     |
| 12                      | Persentase penegakan Perda                                    | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 13                      | Indeks Demokrasi                                              | %      | 79,47        | 81,06 | 84,24 | 85,83 | 87,42 | 89,01 |     |
| 14                      | Indeks Rasa Aman                                              | Angka  | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 15                      | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban                            | Angka  | 74           | 74,50 | 74,80 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |     |
| 16                      | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)                               | Angka  | 2,7          | 2,76  | 2,82  | 2,88  | 2,94  | 3     |     |
| INDIKATOR KINERJA KUNCI |                                                               |        |              |       |       |       |       |       |     |
| A                       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR           |        |              |       |       |       |       |       |     |
| I                       | URUSAN PENDIDIKAN                                             |        |              |       |       |       |       |       |     |
| NO                      | INDIKATOR                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |     |
|                         |                                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                       | Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar                     | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 2                       | Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)            | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |





| NO | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |                                                                                                          |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |  |
| 3  | Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A                                                              | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 4  | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B                                                            | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 5  | Rata – Rata Lama Sekolah                                                                                 | Tahun  | 7,76         | 8,09  | 8,42  | 8,75  | 9,08  | 9,41  |  |
| 6  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                                             | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 7  | Persentase anak usia 16-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)                           | %      | 80           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 8  | Terbentuknya Sekolah Unggul/Sekolah Model                                                                | Unit   |              |       | 1     |       | 1     |       |  |
| 9  | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | %      | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |  |
| 10 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B                            | %      | 61,53        | 65    | 68    | 71    | 74    | 77    |  |
| 11 | Cakupan Pemenuhan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                | %      | 3,30         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 12 | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum MULOK                                          | %      | 3,30         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 13 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                                                   | %      | 72,72        | 76,36 | 80,18 | 85,18 | 90,18 | 95,18 |  |
| 14 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik                                                        | %      | 75           | 80    | 85    | 90    | 95    | 100   |  |
| 15 | Indeks pemerataan guru                                                                                   | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 16 | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV                                       | %      | 71           | 75    | 80    | 85    | 90    | 95    |  |
| 17 | Cakupan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki izin           | %      | 3,33         | 3,33  | 3,33  | 3,33  | 3,33  | 3,33  |  |
| 18 | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui                                     | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 19 | Cakupan Penerapan Bahasa dan Sastra Daerah dalam pembelajaran                                            | %      | 20           | 30    | 35    | 37    | 40    | 45    |  |
| 20 | Persentase pengembangan bahasa dan sastra                                                                | %      | 10           | 15    | 20    | 25    | 30    | 45    |  |
| II | URUSAN KESEHATAN                                                                                         |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi                                             | %      | 90           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 2  | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                             | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 3  | Cakupan penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat                        | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 4  | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                                             | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 5  | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita                                                | %      | 24,7         | 24,2  | 23,6  | 23,1  | 22,6  | 22,0  |  |
| 6  | Prevalensi Balita <i>stunting</i>                                                                        | %      | 35,0         | 33,7  | 32,5  | 31,1  | 30,0  | 29,00 |  |



| NO  | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|     |                                                                                                              |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |  |
| 7   | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun                   | %      | 8            | 7,5    | 7      | 6,5    | 5      | 4,5    |  |
| 8   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                               | %      | 88           | 89     | 91     | 93     | 95     | 100    |  |
| 9   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                     | %      | 88           | 89     | 91     | 93     | 95     | 100    |  |
| 10  | Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan                                                      | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 11  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar                                                            | %      | 85           | 86     | 87     | 88     | 90     | 90     |  |
| 12  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | %      | 90,0         | 92,5   | 92,5   | 95,0   | 95,0   | 97,5   |  |
| 13  | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                              | %      | 90           | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |  |
| 14  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard sesuai standard | %      | 96           | 96     | 98     | 98     | 100    | 100    |  |
| 15  | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                         | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 16  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                 | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 17  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                   | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 18  | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai                                                | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 19  | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan                                                    | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 20  | Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek                                           | %      | 80           | 90     | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 21  | Rasio Dokter (Tenaga Medis) per 100.000 penduduk                                                             | Rasio  | 29,50        | 32,27  | 34,73  | 37,09  | 39,36  | 44,28  |  |
| 22  | Rasio Bidan per 100.000 penduduk                                                                             | Rasio  | 172,53       | 198,87 | 225,76 | 251,62 | 276,54 | 306,07 |  |
| 23  | Rasio Perawat per 100.000 penduduk                                                                           | Rasio  | 346,33       | 456,05 | 467,87 | 479,19 | 492,07 | 541,28 |  |
| 24  | Persentase Sarana farmasi yang memenuhi standar                                                              | %      | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 25  | Persentase cakupan sediaan alat kesehatan                                                                    | %      | 80           | 85     | 90     | 95     | 100    | 100    |  |
| 26  | Cakupan Pemeriksaan Sarana IRTP Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Memenuhi Ketentuan                  | %      | 80           | 80     | 80     | 80     | 90     | 100    |  |
| 27  | Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                   | %      | 50           | 55     | 60     | 65     | 70     | 75     |  |
| 28  | Persentase masyarakat yang diberdayakan di bidang kesehatan                                                  | %      | 20           | 25     | 30     | 35     | 40     | 45     |  |
| III | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                     |        |              |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                                          | %      | 67,64        | 68,77  | 69,89  | 71,02  | 72,15  | 73,28  |  |
| 2   | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan                                                 | %      | 40           | 43     | 45     | 50     | 55     | 60     |  |



| NO | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |                                                                                                                                        |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |  |
|    | banjir                                                                                                                                 |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 3  | Persentase luas layanan irigasi multikomoditi                                                                                          | %      | 10           | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    |  |
| 4  | Cakupan penduduk berakses air minum                                                                                                    | %      | 66,69        | 69,14 | 71,78 | 74,65 | 77,76 | 80,83 |  |
| 5  | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional                                                                       | %      | 60           | 70    | 80    | 85    | 90    | 100   |  |
| 6  | Terbangunnya TPA/TPST                                                                                                                  | Unit   |              |       | 1     |       |       |       |  |
| 7  | Persentase terpenuhinya dokumen teknis TPST                                                                                            | %      |              | 60    |       |       |       |       |  |
| 8  | Persentase Air Limbah Domestik tertangani                                                                                              | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 9  | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)                   | %      | 50           | 55    | 58    | 60    | 75    | 85    |  |
| 10 | Cakupan drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat                                                             | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 11 | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik                                                                                          | %      | 10,8         | 20,3  | 29,8  | 39,3  | 48,8  | 58,3  |  |
| 12 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                                                            | %      | 10,8         | 20,3  | 29,8  | 39,3  | 48,8  | 58,3  |  |
| 13 | Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik                                                                                             | %      | 41           | 44    | 46    | 49    | 52    | 55    |  |
| 14 | Cakupan jembatan dalam kondisi baik                                                                                                    | %      | 29,89        | 32,06 | 34,26 | 36,46 | 38,66 | 40,86 |  |
| 15 | Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat                                                                                               | Orang  | 77           | 107   | 137   | 167   | 197   | 227   |  |
| 16 | Persentase Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten                                                                     | %      |              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 17 | Persentase Jasa Konstruksi Kabupaten yang mendapat pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan | %      |              | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   |  |
| 18 | Penetapan Perda RDTK                                                                                                                   | %      | 95           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 19 | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang daerah                                                                     | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| IV | URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1  | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program                                                      | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 2  | Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Mandiri yang Dibangun                                                                                    | Unit   | 325          | 325   | 325   | 325   | 325   |       |  |
| 3  | Persentase permukiman yang dilengkapi PSU                                                                                              | %      | 30           | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    |  |
| 4  | Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan PSU                 | %      | 20           | 40    | 50    | 60    | 75    | 100   |  |



| NO | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |                                                                                                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |  |
| 5  | Jumlah Tenaga ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualifikasi                                                       | Orang  | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |  |
| V  | URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                       |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1  | Persentase Cakupan Penegakan PERDA                                                                                            | %      | 80           | 90    | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 2  | Persentase penyelenggaraan tibumtranmas                                                                                       | %      |              | 75    | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 3  | Persentase cakupan perlindungan masyarakat                                                                                    | %      | 80           | 90    | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 4  | Persentase PPNS yang bersertifikat kompetensi                                                                                 | %      | 0,5          | 0,5   | 1     | 1,5   | 1,5   | 1,5   |  |
| 5  | Cakupan penanggulangan bencana                                                                                                | %      | 85           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 6  | Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran                                                                                | %      | 85           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 7  | Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana                                                             | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 8  | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                                                                                 | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| VI | URUSAN SOSIAL                                                                                                                 |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1  | Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan                                                                      | %      | 16,66        | 17,49 | 18,36 | 36,77 | 73,59 | 77,26 |  |
| 2  | Persentase pekerja sosial tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial    | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 3  | Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam YANSOS                                                 | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 4  | Persentase lembaga dibidang sosial yang meningkat kualitas dalam YANSOS                                                       | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 5  | Persentase penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai Standar                               | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 6  | Persentase fasilitasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran                                                              | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 7  | Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Penyandang    | %      | 20,79        | 21,82 | 22,91 | 24,05 | 25.25 | 26,51 |  |
| 8  | Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | %      | 54,55        | 57,27 | 59,88 | 62,87 | 66,01 | 69,31 |  |
| 9  | Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS                                                                                  | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 10 | persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial                                                                        | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |





| NO  | INDIKATOR                                                                    | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |                                                                              |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |  |
| 11  | cakupan pemeliharaan TMP                                                     | %      | -            | -     | -     | -     | -     | -     |  |
| B   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR                    |        |              |       |       |       |       |       |  |
| I   | URUSAN TENAGA KERJA                                                          |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1   | Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja                                 | %      |              |       | 100   |       |       |       |  |
| 2   | Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                  | %      | 21,48        | 26,86 | 33,57 | 38,57 | 43,57 | 48,57 |  |
| 3   | Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                | %      | 27,34        | 34,18 | 42,72 | 47,72 | 52,72 | 57,72 |  |
| 4   | Persentase kepesertaan jamsostek                                             | %      | 55           | 60    | 65    | 70    | 90    | 100   |  |
| II  | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                          |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1   | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah                                   | %      | 55,66        | 56,16 | 61,16 | 66,16 | 71,16 | 75,16 |  |
| 2   | Cakupan penyelesaian secara hukum atas tindakan KDRT                         | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 3   | persentase sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga                  | %      | 65           | 70    | 75    | 75    | 75    | 75    |  |
| 4   | Cakupan dokumen Data Gender dan Anak                                         | %      | 90,27        | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 |  |
| 5   | Persentase Desa layak anak                                                   | %      | 30           | 40    | 50    | 65    | 70    | 80    |  |
| 6   | Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani        | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| III | URUSAN PANGAN                                                                |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1   | Persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | %      | 30           | 40    | 50    | 70    | 80    | 90    |  |
| 2   | Presentase Ketersediaan pangan utama                                         | %      | 70           | 75    | 80    | 87    | 90    | 100   |  |
| 3   | Persentase pengadaan & penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan      | %      | 70           | 75    | 80    | 87    | 95    | 100   |  |
| 4   | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                          | %      | 70           | 80    | 85    | 90    | 100   | 100   |  |
| IV  | URUSAN PERTANAHAN                                                            |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1   | Persentase Penyelesaian izin lokasi                                          | %      | 80           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 2   | Cakupan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                          | %      | 80           | 85    | 90    | 95    | 100   | 100   |  |
| 3   | Cakupan Tertib administrasi pertanahan                                       | %      | 85           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 4   | Cakupan redistribusi tanah                                                   | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 5   | Cakupan ganti rugi tanah                                                     | %      |              |       |       |       |       |       |  |
| 6   | Cakupan Tanah Ulayat Lintas Daerah yang ditetapkan                           | %      | 20           | 25    | 30    | 35    | 37    | 40    |  |



| NO  | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|--|
|     |                                                                                                                                                     |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|     | statusnya                                                                                                                                           |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 7   | Tanah Kosong dimanfaatkan                                                                                                                           | %      | 25           | 25   | 30   | 50   | 60   | 75   |  |
| V   | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                             |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (IKLH, IKPLHD, DDDTLH, KLHS)                                                           | %      | 50           | 60   | 70   | 80   | 100  | 100  |  |
| 2   | Persentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                                      | %      | 80           | 90   | 90   | 100  | 100  | 100  |  |
| 3   | persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota                                                                                 | %      | 65           | 65   | 70   | 70   | 70   | 70   |  |
| 4   | persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3                                                                                                          | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 5   | Persentase pengendalian persetujuan lingkungan                                                                                                      | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 6   | Persentase Sinkronisasi MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 7   | Prosentase Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan                                       | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 8   | Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup                                                                                     | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 9   | Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani                                                                                               | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| 10  | Persentase Penanganan Sampah.                                                                                                                       | %      | 90           | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   |  |
| VI  | URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                            |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran                                                                                 | %      | 85           | 90   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 2   | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik                                                                     | %      | 90           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 3   | Persentase cakupan kepemilikan NIK                                                                                                                  | %      | 90           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 4   | Rasio penduduk berakte                                                                                                                              | %      | 85           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 5   | Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                       | %      | 85           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 6   | Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                                            | %      | 85           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| VII | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                             |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase Fasilitasi Penataan Desa                                                                                                                 | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 2   | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa                                                                                                               | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 3   | Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa                                                                                             | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |



| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN | TARGET TAHUN |      |       |       |      |      |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|-------|-------|------|------|--|
|      |                                                                                                                                                     |        | 2025         | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 |  |
| 4    | Persentase BumDes dengan kategori berkembang dan maju                                                                                               | %      | 10           | 20   | 30    | 40    | 50   | 60   |  |
| 5    | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif                                                                                  | %      | 100          | 100  | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 6    | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif                                                                                                          | %      | 100          | 100  | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| VIII | PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                               |        |              |      |       |       |      |      |  |
| 1    | Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)                                                            | %      | 100          | 100  | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 2    | Persentase Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                         | %      | 100          | 100  | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 3    | Cakupan Peserta Akseptor KB                                                                                                                         | %      | 50           | 55   | 60    | 65    | 70   | 70   |  |
| 4    | Angka prevalensi kontrasepsi modern/Mode rn Contraceptive Prevalence Rate(mCPR)                                                                     | %      | 50           | 55   | 60    | 65    | 70   | 70   |  |
| 5    | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                                                                                       | %      | 6            | 5    | 4     | 4     | 4    | 4    |  |
| 6    | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                   | %      | 70           | 72   | 75    | 78    | 80   | 80   |  |
| 7    | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                   | %      | 55           | 57   | 61    | 64    | 67   | 67   |  |
| 8    | Persentase Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                      | %      | 10           | 12   | 16    | 20    | 25   | 25   |  |
| 9    | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA)                                                                                                               | %      | 35           | 41   | 50    | 53    | 57   | 60   |  |
| IX   | URUSAN PERHUBUNGAN                                                                                                                                  |        |              |      |       |       |      |      |  |
| 1    | cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan                                                                                         | %      | 50           | 50   | 70    | 70    | 70   | 70   |  |
| 2    | cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan                                                                                          | %      | 50           | 50   | 70    | 70    | 70   | 70   |  |
| 3    | Intensitas pelayanan pelabuhan feri                                                                                                                 | Kali   | 15           | 15   | 20    | 20    | 20   | 30   |  |
| X    | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                   |        |              |      |       |       |      |      |  |
| 1    | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | %      | 80           | 80   | 90    | 90    | 90   | 90   |  |
| 2    | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                       | %      | 80           | 80   | 90    | 90    | 90   | 90   |  |
| 3    | Persentase Fasilitas Umum yang terhubung dengan akses internet yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika                              | %      | 35           | 45   | 55    | 65    | 75   | 85   |  |
| XI   | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                  |        |              |      |       |       |      |      |  |
| 1    | Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin                                                                                                | %      | 94,67        | 96   | 97,33 | 98,67 | 100  | 100  |  |



| NO   | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|      |                                                                                                                          |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |  |
| 2    | Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT                                                                            | %      | 30           | 57,33 | 65,33 | 66,67 | 70,67 | 80    |  |
| 3    | Cakupan Koperasi yang Berkualitas                                                                                        | %      | 30           | 57,33 | 65,33 | 66,67 | 70,67 | 80    |  |
| 4    | Cakupan koperasi aktif                                                                                                   | %      | 92           | 93    | 96    | 97    | 98    | 100   |  |
| 5    | Pengawas Koperasi yang Bersertifikat                                                                                     | %      | NA           | 41    | 58    | 83    | 100   | 100   |  |
| 6    | Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha               | %      | 12,11        | 20,44 | 30,32 | 41,83 | 54,89 | 69,50 |  |
| 7    | Cakupan Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha                                                                              | %      | 20           | 40    | 60    | 80    | 100   | 100   |  |
| XII  | URUSAN PENANAMAN MODAL                                                                                                   |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1    | Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten                                                                      | %      | 11,5         | 13    | 14,5  | 16    | 17,5  | 19    |  |
| 2    | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                  | Keg    | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |  |
| 3    | Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP                                                     | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 4    | Persentase Peningkatan Ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku              | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 5    | Prosentase Peningkatan ketersediaan Data/Informasi Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Elektronik                     | %      | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| XIII | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                  |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1    | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                | %      | 31           | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |  |
| 2    | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                            | %      | 30           | 40    | 50    | 50    | 50    | 50    |  |
| 3    | Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan                                        | %      | 25           | 30    | 35    | 35    | 35    | 35    |  |
| 4    | Cakupan sekolah yang membentuk organisasi kepramukaan                                                                    | %      | 90           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| XIV  | URUSAN STATISTIK                                                                                                         |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah           | %      | 75           | 80    | 85    | 90    | 100   | 100   |  |
| 2    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | %      | 75           | 80    | 85    | 90    | 100   | 100   |  |
| XV   | URUSAN PERSANDIAN                                                                                                        |        |              |       |       |       |       |       |  |
| 1    | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                    | %      | 50           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |





| NO    | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN   | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|       |                                                                                                            |          | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |  |
| XVI   | URUSAN KEBUDAYAAN                                                                                          |          |              |        |        |        |        |        |  |
| 1     | Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                                 | %        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 2     | Dokumen Rencana Aksi Karya Budaya                                                                          | Dokumen  | -            | -      | 1      | -      | -      | -      |  |
| 3     | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                                   | Kegiatan | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| 4     | Persentase sanggar seni yang dibina                                                                        | %        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 5     | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                                    | Unit     | 194          | 194    | 204    | 209    | 214    | 219    |  |
| XVII  | URUSAN PERPUSTAKAAN                                                                                        |          |              |        |        |        |        |        |  |
| 1     | Cakupan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan              | %        | 17,54        | 21,93  | 26,32  | 35,09  | 52,63  | 70,18  |  |
| 2     | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Judul)                                                  | Jumlah   | 3000         | 4000   | 5000   | 6000   | 7000   | 8000   |  |
| 3     | Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan dilestarikan                             | %        | NA           | 15     | 20     | 20     | 20     | 20     |  |
| XVIII | URUSAN KEARSIPAN                                                                                           |          |              |        |        |        |        |        |  |
| 1     | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban | %        | 50           | 60     | 70     | 70     | 70     | 70     |  |
| 2     | Cakupan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip                  | %        | 30           | 40     | 50     | 50     | 50     | 50     |  |
| C     | URUSAN PILIHAN                                                                                             |          |              |        |        |        |        |        |  |
| I     | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                              |          |              |        |        |        |        |        |  |
| 1     | Produksi perikanan tangkap                                                                                 | Ton      | 7299         | 7663   | 8249   | 8850   | 9292   | 9756   |  |
| 2     | Jumlah bina kelompok nelayan                                                                               | Kelompok | 72           | 75     | 80     | 84     | 88     | 92     |  |
| 3     | Produksi perikanan budidaya                                                                                | Ton      | 88           | 93     | 98     | 103    | 108    | 112    |  |
| 4     | Jumlah bina kelompok budidaya                                                                              | Kelompok | 84           | 89     | 94     | 99     | 104    | 109    |  |
| 5     | Jumlah ketersediaan bibit ikan air tawar                                                                   | Ekor     | 65.000       | 68.250 | 71.500 | 74.750 | 78.000 | 81.050 |  |
| 6     | Luasan lahan potensi budidaya                                                                              | Ha       | 5,5          | 5,8    | 6,1    | 6,4    | 6,7    | 7,0    |  |
| 7     | Jumlah pengawasan/pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap                                                 | Kelompok |              | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |  |
| 8     | Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya                                                          | Kelompok |              | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |  |
| 9     | Jumlah pengawasan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                    | Kelompok |              | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |  |
| 10    | Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran                                                                   | Kelompok |              | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |  |



| NO  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN              | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|     |                                                                                                      |                     | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |  |
| 11  | Angka Konsumsi Ikan                                                                                  | Kg/Kapita/<br>Tahun | 34,32        | 34,34  | 34,36  | 34,38  | 34,40  | 34,42  |  |
| 12  | Jumlah Pemasar                                                                                       | Orang               | 40           | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |  |
| II  | URUSAN PARIWISATA                                                                                    |                     |              |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Persentase Pengembangan Lokasi Pariwisata                                                            | %                   | 23,26        | 32,56  | 34,88  | 37,21  | 39,53  | 41,86  |  |
| 2   | Jumlah kunjungan wisatawan                                                                           | Orang               | 38.927       | 39.927 | 40.927 | 41.927 | 42.927 | 43.927 |  |
| 3   | Persentase Pengetahuan wisatawan                                                                     | %                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 4   | Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                    | Dokumen             |              |        | 1      |        |        |        |  |
| 5   | Produk benda dan tak benda yang Mendapatkan Perlindunginya Hak Kekayaan Intelektual                  | Jumlah              | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      |  |
| 6   | Cakupan UMKM Ekraf yang Dibina                                                                       | %                   | 60           | 65     | 68     | 70     | 75     | 80     |  |
| 7   | Persentase Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                           | %                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| III | URUSAN PERTANIAN                                                                                     |                     |              |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Persentase Kelompok Tani mendapat Bantuan Benih                                                      | %                   | 94,29        | 96,65  | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 2   | Produktivitas padi                                                                                   | Ton/Ha              | 5,46         | 5,74   | 6,02   | 6,02   | 6,02   | 6,02   |  |
| 3   | Produksi jagung                                                                                      | Ton/Ha              | 4,6          | 4,8    | 5      | 5      | 5      | 5      |  |
| 4   | Luas lahan pertanian fungsional produktif                                                            | Ha                  | 6.550        | 6.570  | 6.590  | 6.600  | 6.650  | 6.670  |  |
| 5   | Perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan unggulan                                               | Ha                  | 21.827       | 22.918 | 24.064 | 25.267 | 26.267 | 26.267 |  |
| 6   | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan                                               | %                   | 88,2         | 92,61  | 92,61  | 95     | 100    | 100    |  |
| 7   | Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | %                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 8   | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah                       | %                   | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 9   | Cakupan Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan Pertanian                                             | %                   | 88,2         | 92,61  | 92,61  | 100    | 100    | 100    |  |
| IV  | URUSAN KEHUTANAN                                                                                     |                     |              |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Indeks keanekaragaman hayati                                                                         | %                   |              |        |        |        |        |        |  |
| V   | URUSAN ESDM                                                                                          |                     |              |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Cakupan Kawasan akses bauran EBT                                                                     | %                   |              |        |        |        |        |        |  |
| VI  | URUSAN PERDAGANGAN                                                                                   |                     |              |        |        |        |        |        |  |



| NO   | INDIKATOR                                                                          | SATUAN   | TARGET TAHUN |       |       |       |       |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|      |                                                                                    |          | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |  |
| 1    | Cakupan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beroleh ijin      | %        | 52,75        | 62,19 | 71,64 | 81,09 | 90,54 | 100  |  |
| 2    | Fasilitasi bimbingan dan pemantauan pengelolaan distribusi perdagangan             | %        | 28,57        | 42,86 | 57,14 | 71,43 | 85,71 | 100  |  |
| 3    | Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting        | %        | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  |  |
| 4    | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten          | %        | 17,66        | 35,66 | 52,33 | 69    | 85,66 | 100  |  |
| 5    | Cakupan Pengawasan Kemetrolagian                                                   | %        | 17,66        | 35,66 | 52,33 | 69    | 85,66 | 100  |  |
| 6    | Pemantauan terhadap barang-barang yang kadaluwarsa (BDKT)                          | %        | 17,66        | 35,66 | 52,33 | 69    | 85,66 | 100  |  |
| 7    | Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan                              | %        | 16,66        | 33,3  | 50    | 66,66 | 83,3  | 100  |  |
| VII  | URUSAN PERINDUSTRIAN                                                               |          |              |       |       |       |       |      |  |
| 1    | Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri                                        | Dokumen  | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    |  |
| 2    | Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten         | %        |              | 20    | 25    | 25    | 25    | 25   |  |
| 3    | Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten                                | Jumlah   | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    |  |
| VIII | URUSAN TRANSMIGRASI                                                                |          |              |       |       |       |       |      |  |
| 1    | Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis | Kawasan  | 1            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |  |
| 2    | Persentase Pembangunan di Kawasan Transmigrasi                                     | %        |              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  |  |
| 3    | Kawasan Trans binaan yang berkembang                                               | Kimtrans | 1            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |  |
| D    | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                               |          |              |       |       |       |       |      |  |
| I    | UNSUR SEKRETARIAT DAERAH                                                           |          |              |       |       |       |       |      |  |
| 1    | Skor Hasil EKPPD                                                                   | Skor     | 3,1          | 3,2   | 3,5   | 4,3   | 5     | 5    |  |
| 2    | Cakupan produk hukum yang ditetapkan                                               | %        | 65           | 67    | 70    | 73    | 75    | 87   |  |
| 3    | Indeks SAKIP                                                                       | Angka    | 60,15        | 65    | 67    | 70    | 75    | 80   |  |
| 4    | Jumlah kerja sama daerah                                                           | Angka    | 3            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    |  |
| 5    | Indeks Kebijakan Kesra                                                             | Angka    | 55           | 60    | 62,5  | 65    | 67,5  | 70   |  |
| 6    | Cakupan layanan bantuan hibah/bansos lembaga                                       | %        |              |       |       |       |       |      |  |
| 7    | Cakupan layanan bantuan hibah/bansos mahasiswa                                     | Orang    | 1000         | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000 |  |
| 8    | Jumlah kebijakan perekonomian dan pembangunan                                      | Angka    |              |       |       |       |       |      |  |



| NO  | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|--|
|     |                                                                                               |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 9   | Indeks penerapan eprocurement (ITKP)                                                          | Angka  |              |      |      |      |      |      |  |
| 10  | Jumlah pejabat fungsional PPBJ                                                                | Orang  |              |      |      |      |      |      |  |
| 11  | Cakupan fasilitasi layanan protokoler                                                         | %      |              |      |      |      |      |      |  |
| 12  | Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | %      |              |      |      |      |      |      |  |
| 13  | Proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE                                                     | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| II  | UNSUR SEKRETARIAT DPRD                                                                        |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase Perda yang dibahas dan ditetapkan                                                  | %      | 80           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| III | UNSUR PERENCANAAN                                                                             |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Cakupan keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                         | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 2   | Cakupan keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD                                                   | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 3   | Cakupan keselarasan RKPD dengan RENJA PD Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia      | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 4   | Cakupan keselarasan RKPD dengan RENJA PD Koordinasi Ekonomi dan SDA                           | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 5   | Cakupan keselarasan RKPD dengan RENJA PD Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan             | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| IV  | UNSUR KEUANGAN                                                                                |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase SILPA terhadap APBD                                                                | %      | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 2   | Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB                                                   | %      | 95           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 3   | Jumlah Bidang Tanah milik Pemda yang bersertifikat                                            | %      | 80           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 4   | Persentase piutang pajak yang tertagih                                                        | %      | 90           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 5   | Persentase cakupan obyek pajak dan retribusi daerah                                           | %      | 80           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| V   | UNSUR KEPEGAWAIAN                                                                             |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Cakupan peningkatan disiplin aparatur                                                         | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 2   | Persentase ASN yang lulus sertifikasi kompetensi                                              | %      | 79           | 80   | 85   | 87   | 90   | 93   |  |
| 3   | Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kinerja                     | %      | 70           | 75   | 80   | 85   | 87   | 90   |  |
| VI  | UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                |        |              |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Persentase PNS yang mengikuti Pelatihan                                                       |        |              |      |      |      |      |      |  |





| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN  | TARGET TAHUN |       |       |       |      |      |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|--|
|      |                                                                                                                                                                                          |         | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 |  |
| VII  | UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                        |         |              |       |       |       |      |      |  |
| 1    | Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan                                                                                           | %       | 58,59        | 73,24 | 91,55 | 91,55 | 92   | 95   |  |
| 2    | Persentase Perangkat Daerah yang melakukan inovasi                                                                                                                                       | %       | 35,51        | 44,38 | 55,48 | 60    | 60   | 60   |  |
| VIII | UNSUR PENGAWASAN                                                                                                                                                                         |         |              |       |       |       |      |      |  |
| 1    | Jumlah PD yang diaudit                                                                                                                                                                   | PD      | 7            | 10    | 12    | 15    | 17   | 20   |  |
| 2    | Jumlah Dokumen yang direviu                                                                                                                                                              | Dokumen | 6            | 10    | 12    | 15    | 17   | 20   |  |
| 3    | Jumlah PD yang dievaluasi                                                                                                                                                                | PD      | 30           | 30    | 30    | 30    | 30   | 30   |  |
| 4    | Jumlah Desa yang diaudit                                                                                                                                                                 | Desa    | 15           | 17    | 20    | 25    | 27   | 30   |  |
| 5    | Peningkatan Kapabilitas APIP                                                                                                                                                             | Level   | 2,20         | 2,25  | 2,30  | 2,35  | 2,45 | 2,75 |  |
| 6    | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani                                                                                                                                           | %       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 7    | Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal                                                                                                                             | %       | 84           | 85    | 85    | 87    | 88   | 89   |  |
| 8    | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                                                             | Level   | 1            | 2     | 2     | 2     | 2    | 2    |  |
| IX   | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                  |         |              |       |       |       |      |      |  |
| 1    | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                                                                                                | %       | 90           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 2    | Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                                                            | %       | 90           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 3    | Cakupan pembinaan pemerintahan desa                                                                                                                                                      | %       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| X    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                              |         |              |       |       |       |      |      |  |
| 1    | Cakupan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (%)                              | %       | 80           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 2    | Jumlah kader wawasan kebangsaan                                                                                                                                                          | Jumlah  | 72           | 72    | 72    | 72    | 72   | 72   |  |
| 3    | Persentase sekolah atau komunitas yang difasilitasi dalam pembinaan wawasan kebangsaan                                                                                                   | %       | 80           | 80    | 80    | 90    | 90   | 100  |  |
| 4    | Persentase pelaksanaan Kegiatan pembinaan politik di daerah                                                                                                                              | %       | 80           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 5    | Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | %       | 80           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |
| 6    | Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,                                                                                                                      | %       | 80           | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |  |

| NO | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN   | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--|
|    |                                                                                                   |          | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|    | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara |          |              |      |      |      |      |      |  |
| 7  | Jumlah Informasi Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing yang Berasal dari Masyarakat         | Laporan  | 40           | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |  |
| 8  | Jumlah Kegiatan terkait kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing yang melibatkan masyarakat    | Kegiatan | 3            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 9  | Jumlah rekomendasi strategis hasil koordinasi intelegen yang disampaikan kepada pemerintah        | Jumlah   | 2            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| 10 | Jumlah Pertemuan Intelegen yang dilaksanakan                                                      | Kegiatan | 4            | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |





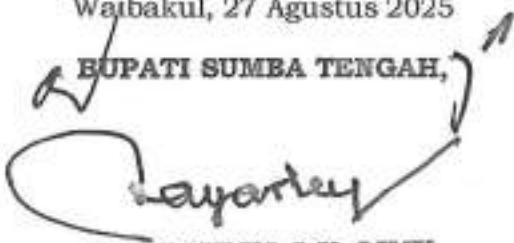
## BAB V

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen yang strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pembangunan dan layanan publik untuk lima tahun ke depan. Karena strategisnya Dokumen RPJMD ini, maka perumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah mutlak memperhatikan Visi dan Misi Nasional **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan **“Misi Asta Cita”**, Visi Nusa Tenggara Timur **“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”** dengan **“Dasa Cita dan Program Prioritas 7 Pilar”** yang diintegrasikan dalam Visi Sumba Tengah **“Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala Yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”** dengan **“7 Misi dan 9 Program Prioritas Strategis Pro Oli Milla”**.

Tatakelola pemerintahan berjenjang secara terstruktur dan sistematis berdasarkan pelimpahan kewenangan, tugas dan fungsi akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan hingga akhir periode kepemimpinan baik nasional dan daerah. Demikian halnya bagi perangkat daerah dijadikan acuan dan arah kebijakan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan untuk menerjemahkan tugas dan fungsi sesuai urusan dan kewenangan dengan bersinergi dengan pemangku pembangunan lainnya.

Komitmen ***Good and Clean Governance*** dalam kolaborasi, integrasi dan sinergi menjadi tuntutan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengukuran kinerja periode berkenaan demi **“Terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala Yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera”**.

Waibakul, 27 Agustus 2025  
BUPATI SUMBA TENGAH,  
  
Drs. PAULUS S.K. LIMU